

297-431

AA 14

8

1997

16 DEC 1997



BUDAYA SIRI' BUGIS-MAKASSAR SEBAGAI LANGKAH PREVENSI DELIK

**Suatu Kajian Delik Pembunuhan dan Pencemaran
Nama Baik Orang Lain**

**Disusun Dalam Rangka Memenuhi Persyaratan
Program Studi Magister Ilmu-Ilmu Hukum
Bidang Kajian Sistem Peradilan Pidana**

**Oleh:
KAMRI AHMAD**

**PROGRAM PASCASARJANA (MAGISTER)
ILMU-ILMU HUKUM
UNIVERSITAS DIPONEGORO
SEMARANG
1997**

395. 02

AHM

b

1997 e/

BUDAYA SIRI' BUGIS-MAKASSAR SEBAGAI LANGKAH PREVENSI DELIK

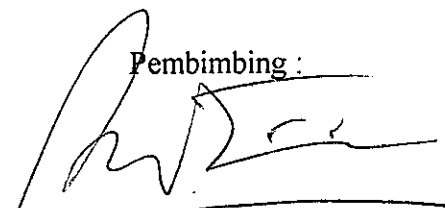
Suatu Kajian Delik Pembunuhan dan Pencemaran
Nama Baik Orang Lain

Disusun Oleh :
KAMRI AHMAD
NIM : B. 102 94 0064

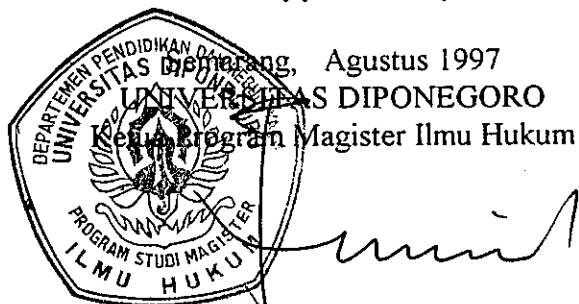
Dipertahankan di Depan Dewan Penguji
Pada Tanggal : Agustus 1997

Tesis ini telah diterima
Sebagai Persyaratan untuk Memperoleh Gelar
Magister Ilmu Hukum

Pembimbing :



Prof. Dr. Satjipto Rahardjo, S.H.



Prof. H. Purwahid Patrik, S.H.

KATA PENGANTAR

"*Qaalu subhaanaka laa'ilmalana 'illa maa 'allamtana Inaka antal 'alimul hakiim*" (Q.S, 1: 32). Artinya: Mereka (para Malaikat) berkata "Maha Suci Engkau, tidak ada yang kami ketahui kecuali apa yang Engkau ajarkan kepada kami, sesungguhnya Engkau yang Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana". Demikian pengakuan para Malaikat di depan Tuhan ketika menyaksikan kepintaran Adam mengenai pengetahuan tentang dunia.

Firman di atas menunjukkan bahwa hanya manusialah yang diberikan oleh Allah ilmu yang sempurna. Betapa mulia di sisi Allah bagi orang yang diberi ilmu dan kemudian mengajarkannya kepada orang yang lain, sampai-sampai malaikat pun hormat kepadanya. Terasa benar di hati sanubari ini, betapa kami tiada berarti di hadapan para guru dan para dosen kami. Legitimasi keilmuan yang kami miliki sepenuhnya diantar oleh para guru dan dosen kami tersebut. Untuk itulah dengan selesainya tesis ini sebagai prasyarat Magister di bidang Ilmu-ilmu Hukum, dengan rasa syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, patut rasanya saya menyampaikan terima kasih yang tak terhingga kepada:

1. Bapak Prof. DR. Muladi, S.H., baik selaku Rektor UNDIP maupun sebagai dosen,
2. Bapak Prof. DR. Satjipto Rahardjo, S.H. selaku dosen terlebih lagi sebagai pembimbing utama,
3. Bapak Prof. DR. Barda Nawawi Arif, S.H. selaku Dekan

Fakultas Hukum UNDIP maupun selaku dosen. di mana beliau banyak memberikan arahan tentang masalah pidana ketika penulisan tesis ini sedang dilakukan,

4. Bapak DR. I.S. Soesanto, S.H. selaku mantan Ketua Program Magister Ilmu-Ilmu Hukum maupun selaku dosen, ketika awal penelitian ini banyak memberikan petunjuk-petunjuk terutama dari segi metode penulisan yang baik,
5. Bapak Prof. H. Purwahid Patrik, S.H. selaku Ketua Program Magister Ilmu-Ilmu Hukum UNDIP, juga selaku dosen,
6. Bapak Prof. Ronny Hanitidjo, S.H. selaku dosen, yang pada saat penelitian ini berlangsung, beliau banyak memberikan petunjuk tentang metode penelitian yang baik
7. Segenap dosen kami di Pascasarjana UNDIP yang tidak sempat disebut satu persatu,
8. Segenap staf tatausaha Pascasarjana UNDIP yang tidak pernah bosan melayani kepentingan kami,
9. Bapak DR. H. Abdurahman A. Basalamah, SE. MSi, selaku Ketua Yayasan Badan Wakaf Universitas Muslim Indonesia beserta jajarannya, maupun selaku mantan Rektor UMI Ujung Pandang, di mana penulis banyak mendapat motivasi, bantuan moril dan materiil,
10. Bapak H. Muchtar Noor Jaya, SE. MSi selaku Rector UMI beserta jajarannya, di mana penulis banyak diberikan bantuan moril maupun materiil,
11. Bapak H. Hambali Thalib, S.H. M.H. selaku mantan Dekan Fakultas Hukum UMI, yang selama ini mengarahkan kami, dan kini menjabat sebagai Pembantu Rektor I,
12. Bapak H. Ma'ruf Hafidz, SH. MH, selaku Dekan Fakultas

Hukum UMI berserta segenap pimpinan fakultas.

13 Bapak-bapak dan Ibu-ibu, rekan-rekan di fakultas hukum yang telah banyak memberikan sumbangan pemikirannya atas hasil penelitian ini,

14 Adik-adik segenap penghuni dan pengurus Asrama Sultan, yang turut pula memberikan bantuannya dalam rangka penulisan tesis ini. Secara khusus saya sebut satu per satu: Sjamsyria Djamal, S.S., Elvis, Ihsan Ramli, Yus-
veri, S.Pt. Madhy, Muh. Aksa dan Ir. Muh. Subri

15 Semua pihak yang turut memberikan bantuannya, langsung ataupun tak langsung yang tidak sempat disebut satu per satu.

Semoga insya Allah, segala bantuannya kepada kami apakah berupa moril maupun materil, Allah jadikan amal jariyah di sisi Bapak-bapak dan Ibu-ibu sekalian.

Akhirnya, penulis berharap bahwa semoga tesis ini bermanfaat adanya, terutama dalam kepentingan penegakan hukum serta pengembangan ilmu-ilmu hukum. Sungguhpun demikian, penulis menyadari bahwa tesis ini masih sarat dengan kelemahan dan kekurangan-kekurangan. Oleh sebab itu keritikan dan sumbangan saran yang bersifat membangun, sangat diharapkan. Namun harus difahami bahwa dukungan dan kritikan sama pentingnya.

Semarang, Juli 1997

Penulis,

KAMRI AHMAD

A B S T R A K S I

Bangsa Indonesia dikenal sebagai masyarakat bangsa yang memiliki kehidupan. budaya yang pluralistik. Dan setiap masyarakat budaya yang bersifat pluralistik itu mempunyai pranata susila sosial dengan ciri khas budayanya masing-masing. Salah-satu di antaranya yang dibahas dalam tesis ini adalah *siri'* yang merupakan ciri tersendiri kehidupan masyarakat Bugis-Makassar di Sulawesi Selatan.

Dalam sistem kehidupan masyarakat budaya Bugis-Makassar di Sulawesi Selatan, *siri'* adalah salah-satu bentuk pranata susila sosial yang dianggap cukup tabu oleh masyarakat di daerah ini. Begitu tabunya masalah *siri'* ini dalam sistem kehidupan kemasyarakatan semesta (dibaca: mencakup seluruh bentuk dimensi kehidupan bagi suku Bugis-Makassar), termasuk di antaranya adalah *siri'* sebagai upaya *privensi terjadinya delik* dalam kehidupan bermasyarakat dan berbudaya, bahkan sampai kepada bernegara sekalipun. Karena *siri'* dianggap suatu sebagai pandangan hidup, dan seolah olah masalah itu ditaati sebagai suatu undang-undang yang tertulis.

Dalam penerapan nilai-nilai budaya *siri'* ke dalam sistem kehidupan sehari-hari, bagi suku Bugis-Makassar bukanlah sekedar simbol. Tetapi lebih dari itu sangat penting artinya terutama sekali dalam kehidupan kemasyarakatan, tata pemerintahan, dan bahkan tata hukum sebagai hukum tak tertulis (dalam hal ini, khususnya hukum adat pidana). Orang yang tidak memiliki nilai *siri'* dalam dirinya, maka orang tersebut dianggap tidak bernilai atau tidak beradab dan tidak berharkat-martabat (demikian tulisan Kamri, dalam laporan hasil penelitiannya yang berjudul "Budaya Siri' Sebagai Pola Tatanan Kehidupan Masyarakat Bugis- Makassar: Suatu Tinjauan Pelestarian Nilai-nilai Budaya Berdasarkan Pasal 14 UULH, 1995 hal. v-vi).

Terdapat empat macam prototipe manusia menurut konsep *siri'*. Pertama, *Tomasiri' = Toengka siri'na*. Orang yang sangat menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia dan kemanusiaan. Orang seperti ini paling dibutuhkan dalam KEPEMIMPINAN. Kedua, *tositengnga-tengnga siri'na*. Orang yang memiliki rasa *siri'* hanya setengah-setengah. Pada umumnya orang seperti ini tidak memiliki pendirian yang tetap. Ketiga, *Tomakurang siri'* dan keempat, *Todegaga siri'na* = orang yang tidak memikirkan rasa *siri'*. Pada umumnya orang seperti ini cenderung melakukan tindak pidana tanpa tujuan kecuali kejatan.

Bertautan dengan hal tersebut di ataslah sehingga penulis berpandangan bahwa *siri'* merupakan salah satu bentuk pranata susila sosial yang dapat dijadikan

instrumen pranata hukum pidana yang bersifat preventif. Hanya saja dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dewasa ini, lalu kondisi kehidupan sosial masyarakat adat Bugis-Makassar turut terpengaruh. Salah-satu pengaruhnya adalah pemahaman terhadap makna hakikat *siri'* ternyata berkembang. Yaitu ada *siri'* dalam arti positif dan ada dalam arti negatif. *Siri'* dalam arti positif inilah yang dimaksudkan oleh penulis dalam judul tesis ini. Sebab pada dasarnya memang hakikat makna *siri'* itu terletak pada *siri'* dalam arti positif dan bukan dalam arti yang negatif.

Sebagai gambaran persamaannya meskipun dalam konteks yang lebih luas adalah, bahwa sekiranya bangsa Indonesia pranata susila sosialnya adalah Pancasila, maka di dalamnya terdapat pranata susila kehidupan sosial bangsa Bugis-Makassar dikenal dengan istilah *siri'*. Sudah menjadi ijma'di kalangan pakar budaya di Sulawesi Selatan, bahwa *siri'* adalah salah satu bentuk pandangan hidup yang dapat dijadikan instrumen dalam rangka pencegahan terjadinya delik.

Dalam tesis ini nantinya, hal-hal tersebut di atas itulah sebagai gambaran yang menjadi substansi penelitian dan pembahasan. Demikian kiranya intisari pokok bahasan tesis ini.

DAFTAR TABEL I

- Tabel 1 halaman 89: persepsi hakim mengenai hubungan *siri'* dengan hukum pidana dalam KUHP.
- Tabel 2 halaman 92: persepsi budayawan/antropolog mengenai nilai-nilai budaya *siri'* dengan hukum pidana.
- Tabel 3 halaman 100, tentang penilaian anggota Polisi berdasarkan pengalamannya dalam menangani perkara pidana pembunuhan dan pencemaran nama baik orang lain yang berlatar belakang *siri'*.

DAFTAR TABEL II

- Tabel 1 halaman 218: persepsi hakim mengenai hubungan hukum pidana menurut KUHP dengan budaya *siri'*.
- Tabel 2 halaman 219 frekuensi jawaban hakim berdasarkan tabel pada halaman 218.
- Tabel 3 halaman 222: pernyataan sikap anggota POLISI terhadap penting tidaknya budaya *siri'* diperhitungkan dalam perkara pidana.
- Tabel 4 halaman 222: persentasi pernyataan sikap anggota polisi berdasarkan tabel 3 di atas.
- Tabel 5 halaman 223: maksud sama dengan di atas.
- Tabel 6 halaman 224: frekuensi pengalaman anggota POLISI dalam menangani perkara pidana pembunuhan dan pencemaran nama baik orang lain yang berlatar belakang *siri'*.
- Tabel 7 halaman 225: persentasi sikap budayawan/antropolog mengenai budaya *siri'*.
- Tabel 8 halaman 226: persentasi sikap praktisi hukum (pengacara) mengenai budaya *siri'*.

Tabel 9 halaman 226: identifikasi nilai data.

DAFTAR BAGAN

Figur 1 halaman 196: tentang *Bilatheral Kingship* atau bentuk hubungan kekerabatan pola bilateral.

Figur 2 halaman 206: tentang *Tomanurung* dengan pola hubungan *Hierarchical Society* atau hubungan kemasyarakatan yang berpola hirarkhis, tetapi tidak otoriter.

Figur 3a halaman 208: tentang pola kemasyarakatan berdasarkan *Regali* (*arajang* atau *kalompoang*).

Figur 3b halaman 209: bagan lain dari figur 3a.

Figur 4 halaman 209: pola perkawinan dengan tiga bentuk pertanggungjawaban pidana atas dasar *siri*.

DAFTAR ISI

hal.

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
KATA PENGANTAR	iii
A B S T R A K S I	vi
DAFTAR TABEL	viii
DAFTAR BAGAN	viii
DAFTAR I S I	x
 I. PENDAHULUAN:	1
A. Latar Belakang Penelitian	1
B. Rumusan Permasalahan	18
C. Metode Penelitian	19
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian	20
E. Lokasi dan Waktu Penelitian	21
F. Kerangka teoretis	23
 II. TINJAUAN PUSTAKA	24
A. Pengertian Budaya Siri'	24
B. Istilah Bugis-Makassar	42
C. Langkah-langkah Preventif	43
D. Pandangan Umum Tentang Delik	48
E. Delik Pembunuhan	59
F. Pencemaran Nama Baik Orang Lain	62
G. Adat Delik	65
 III. OBYEK DAN METODE PENELITIAN	74
A. Metode Pendekatan	74
B. Metode Pengumpulan Data	75

C. Populasi dan Sampel	79
D. Metode Sampling	81
E. Metode Analisis Data.....	82
IV. HASIL PENELITIAN:	
DATA DAN ANALISIS DATA	85
A. D a t a	85
a. Hakim Pengadilan Negeri	88
b. Budayawan/Antropolog	91
c. Pengetahuan Anggota Polisi Terhadap Per- sepsi Pelaku Tindak Pidana Bugis Makassar Mengenai Budaya Siri'	99
d. Praktisi Hukum	101
e. Data dari Sampel	102
1. Sampel I	102
2. Sampel II	108
f. Anatomi Siri'	115
B. Analisis Data	121
1. Dasar Berlakunya Hukum Adat Pidana (Secara Eksplisit Budaya Hukum Siri')	121
2. Kajian Dari Sisi Aspek-aspek Budaya <i>Siri'</i> ..	124
a. Pendahuluan	124
b. Aspek-aspek Budaya Siri' dan Implikasi- nya	125
c. Aspek Budaya Siri' Positif	154
a) Ekspresi Siri' Positif Pada Diri Pri- badi	160
b) Penilaian Eksternal	166

3. Langkah Preventif Budaya Siri' Terhadap....	
Delik	175
4. Pembuktian Logika Dalam Tindak Pidana Yang	
Berlatar Belakang Siri'	181
5. Karakteristik Budaya Siri'	187
C. DATA DAN ANALISIS STATISTIK	217
V. KESIMPULAN DAN SARAN	233
A. Kesimpulan	233
B. Saran - Saran	239
DAFTAR PUSTAKA	244

BAB I

P E N D A H U L U A N

A. LATAR BELAKANG

Terbentuk dan berfungsinya sistem hukum nasional yang mantap berdasarkan Pancasila dan Undang Undang Dasar 1945 dengan memperhatikan kemajemukan tatanan hukum yang berlaku, yang mampu menjamin kepastian, ketertiban, penegakan, perlindungan hukum yang berintikan keadilan dan kebenaran, serta mampu mengamankan dan mendukung pembangun nasional dan didukung oleh aparatur hukum, sarana, dan prasana yang memadai serta masyarakat yang sadar dan taat hukum (GBHN, 1993: 67).

Mengacu kepada sasaran pembangun hukum nasional sebagaimana yang dituangkan dalam GBHN tersebut, maka para aparat penegak hukum (polisi, jaksa, hakim, dan bahkan masyarakat) telah melakukan berbagai upaya-upaya. Baik upaya repressif maupun upaya preventive. Upaya-upaya itu tidak terkecuali di bidang hukum pidana.

Menurut H.F.M.Gombag dalam prasarannya di muka Perhimpunan Sarjana Hukum Belanda pada tahun 1970 mengenai pendidikan hukum meliputi bidang-bidang di sekitar konflik, yaitu:

1. Bidang penyelesaian konflik secara formal, yaitu peradilan;
2. Bidang penyelesaian konflik secara informal, yaitu penyelesaian di luar pengadilan;
3. Bidang penyelesaian konflik, yaitu bidang preventensi (Soemitro, 1990: 1).

Pandangan Grombag tersebut ternyata ada yang dapat berkenaan dengan substansi rencana penelitian hukum ini. Terutama poin ketiga, yaitu tentang langkah-langkah prevensi untuk mengatasi suatu konflik. Hanya saja apa yang dikemukakan Grombag, sifatnya menyeluruh. Artinya, boleh jadi yang dimaksudkan oleh Grombag adalah "Penyelesaian konflik pada semua bidang hukum. Sementara tindakan prevensi yang dimaksudkan oleh penulis dalam tesis ini, adalah tindakan prevensi di bidang hukum pidana melalui sarana pranata susila sosial Bugis, Makassar, yaitu "Budaya *siri*". Kendati demikian, penulis tidak bermaksud menonjolkan salah satu nilai-nilai budaya yang satu ini, yaitu budaya *siri*. Karena di persada nusantara banyak sekali nilai-nilai budaya yang apik dan terpelihara dengan ajek pula. Apalagi melebih-lebihkan seolah-olah budaya *siri* mengkaver seluruh permasalahan hukum dalam hukum pidana. Penelitian hukum ini sungguh jauh dari tendensi dan prretensi yang demikian itu.

Menurut hemat penulis, sosio-kultur bertaut langsung dengan budaya hukum. Karena budaya hukum juga merupakan bagian dari perkembangan dan dinamika sosial. Salah satu perkembangan yang berkaitan langsung dengan budaya hukum adalah penanggulangan masalah tindak pidana (delik), baik secara

preventive, maupun secara repressif, serta penyelesaian perkara di luar pengadilan.

Salah satu aspek budaya hukum pada hukum yang tidak tertulis yang kini dikenal dan terpelihara dalam kehidupan rakyat Bugis - Makassar, adalah budaya *siri'*. Oleh sebab itu penelitian hukum yang dilakukan penulis dalam rangka penulisan tesis ini, adalah berkenaan dengan budaya *siri'* Bugis-Makassar, suatu tinjauan sosio-kultur sebagai upaya prevensi terjadinya suatu delik, khususnya masalah delik pembunuhan dan pencemaran nama baik orang lain. Dengan demikian, muara substansinya tertuju kepada upaya-upaya yang bagaimana sehingga nilai-nilai budaya *siri'* dapat menjadi langkah preventif dalam kehidupan masyarakat. Ruang lingkup pembahasannya adalah sekitar masalah delik pembunuhan dan pencemaran nama baik orang lain yang berlatar belakang *siri'*.

Menurut hemat penulis, budaya *siri'* dapat dikatakan budaya hukum karena berkaitan dengan tiga aspek perilaku sosial budaya:

1. Aspek idealita yang implementasinya berwujud berupa hukum adat serta hakikat dan martabat. Inilah yang banyak dikenal oleh masyarakat Sulawesi Selatan. Dan sudah tentu juga masyarakat lain di seluruh nusantara. Pancasila menye-

butnya "Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab". Aspek idealita menurut Soeharjo Ss., Guru Besar Fakultas Hukum UNDIP Semarang, dalam kuliahnya tentang Filsafat Hukum (1994), adalah "Suasana susila bathiniah kultural yang dapat diterima oleh akal sehat, hendak mewujudkan pranata-pranata susila kultural tersebut" (berdasarkan hukum adat, pen.). Agaknya *siri'* termasuk salah satu dalam katagori seperti yang disebutkan Soehardjo di atas. Mengapa penulis mengkatagorikan seperti itu? Karena Budaya *siri'* merupakan bagian dari *suasana susila bathiniah kultural* yang dapat diterima oleh akal sehat. Bahkan sudah mempola dalam perilaku bagi etnis Bugis-Makassar.

2. Aspek yang integral dengan kesejahteraan sosial, yang dalam budaya *siri'* disebut *pecce*. Artinya, orang-orang Bugis, Makassar dengan modal *siri'* yang dimilikinya dapat dijadikan sumber motivasi untuk menjunjung tinggi nilai kehidupan sosial. Menurut Kontjaraningrat (Marsuki, 1995: hal.20), dilihat dari *dimensi wujud kebudayaan* maka paling sedikit wujud dari padanya, yakni:

1. Wujud sebagai kompleks cita-cita gagasan, konsep serta pikiran manusia lazim disebut sistem budaya (*culture system*). Wujud idiil kebudayaan ini disebut pula *covert culture* atau unsur-unsur kebudayaan yang paling abstrak, antara lain sistem nilai budaya, pandangan hidup, etika, idiologi dan sistem norma. Sebagai kompleks gagasan, konsep dan pikiran maka wujud ini tidak dapat dilihat,

diraba dan difoto. Lokasinya berada di dalam kepala dan pikiran para warga pendukung kebudayaan yang bersangkutan.

2. Wujud sebagai kompleks aktivitas kelakuan ber pola serta saling berinteraksi dari manusia dalam masyarakat, lazim disebut *sistem sosial* (*social system*). Wujud kebudayaan ini disebut *overt cultur* atau unsur-unsur kebudayaan yang tampak, bersifat lebih konkret, dapat diamati atau diobservasi, difoto dan difilm.
 3. Wujud sebagai benda-benda hasil karya manusia lazim disebut *kebudayaan phisik* (*physical culture* atau *material culture*), seperti halnya lukisan, patung, candi, pesawat udara, gedung pencakar langit dan sebagainya. ...
3. Aspek nilai-nilai budaya *siri'* yang berkaitan dengan hak dan kewajiban. Hak dalam budaya *siri'* di antaranya adalah "menimang dan mempertahankan harkat dan marbat diri sebagai seorang manusia". Misalnya mempertahankan harga diri atas penghinaan orang lain. Implikasi dari hak untuk mempertahankan diri seperti yang disebutkan penulis di atas sering melahirkan akibat yang sangat patal. Menurut Andi Zainal Abidin (1983: 33), antara lain disebutkan:

"Delik adat di Sulawesi Selatan sering menimbulkan pertumpahan darah, karena perbuatan tersebut dianggap melanggar *siri'* (= *harkat dan martabat*) ... Menurut Hukum Adat Sulawesi Selatan, selama keluarga lelaki tidak mengadakan perbaikan yang terganggu (jika korbannya adalah perempuan, pen.) (= melamar si perempuan) atau belum ditangani oleh penguasa adat maka pihak keluarga wanita berhak untuk membunuh lelaki pelaku delik tersebut (alasan pembenar).

Dalam kenyataannya, benar apa yang dikemukakan

oleh Andi Zainal Abidin di atas. Hal itu menunjukkan bahwa nilai-nilai budaya *siri'*, perlu kiranya dikaji lebih jauh sebagai bagian dari budaya nasional. Oleh sebab itu, terdapat beberapa hal yang melatar-belakangi penelitian hukum tentang nilai-nilai budaya *siri'* ini. Pertama, alasan pengembangan ilmu pengetahuan hukum (khususnya hukum pidana dikaitkan dengan hukum budaya *siri'*). Kurang lebih 4 tahun yang lalu ketika penulis mengikuti suatu pertemuan ilmiah di Aula II UMI di mana Prof Andi Zainal menyatakan bahwa "Hingga kini belum ada satu pun karya ilmiah hasil penelitian tentang hukum adat (*siri'*) dalam kaitan dengan hukum pidana". Pernyataan ini sebenarnya sudah agak lama. Namun ketika rencana proposal tesis ini dibuat, penulis masih mencoba menelusuri kebenaran pernyataan dari Andi Zainal itu. Upaya yang dilakukan oleh penulis untuk membuktikn pernyataan tersebut, yaitu dengan mengikuti anjuran dari Prof. Satjipto Rahardjo untuk meneliti di Perpustakaan Nasional di Jakarta. Dan ini penulis lakukan pada tanggal 23 September 1996, ternyata bahasan mengenai hukum budaya *siri'* dalam kaitannya dengan hukum pidana belum ditemukan penulis.

Kemudian daripada itu, Andi Zainal dalam buku terbarunya terbitan tahun 1995 yang berjudul *Hukum Pidana I*, hanya menggunakan satu-satunya literatur

yang membicarakan tentang Hukum Adat Pidana Sulawesi Selatan, dari deretan literatur yang digunakan oleh beliau dalam buku tersebut. Karya tersebut ditulis sendiri oleh Andi Zainal dalam rangka Pidato Pengukuhan Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin pada tahun 1967. Jadi lebih dari seperempat abad yang lalu. Dengan demikian yang dimaksud oleh Prof. Zainal, adalah hasil penelitian sesudah generasinya, yang kini berselang 30 tahun yang lalu

Masih dalam kaitan dengan alasan yang pertama. Prof. Barda Nawawi dalam sambutannya pada Dies Natalis Fakultas Hukum UNDIP Semarang ke-38 yang berlangsung pada tanggal 9 Januari 1995 di UNDIP, ia berkata "Kecenderungan materi Hukum Adat di fakultas hukum sejak dahulu hingga kini, orientasinya hanya tertuju kepada hukum perdata saja. Misalnya, hukum kewarisan, hukum perkawinan, dan hukum perjanjian. Sedangkan hukum adat dalam kaitannya dengan hukum pidana hampir tidak ada (artinya, tidak disajikan, pen). Padahal dewasa ini Indonesia tengah mempersiapkan Pembaharuan Hukum Pidana Nasional.

Kedua statemen di atas merupakan dasar utama bagi penulis dalam merencanakan atau memilih judul sebagaimana proposal tesis ini. Betapa kedua pernyataan tersebut sangat mengesankan bagi perwujudan penelitian hukum budaya *siri'* ini. Karena seolah-olah memberi dan mengandung suatu obsesi nilai.

Dalam GBHN tahun 1993 sangat jelas dikatakan, bahwa:

"Pengembangan kebudayaan nasional diarahkan untuk memberikan wawasan budaya dan makna pada pembangunan nasional dalam segenap dimensi kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara serta ditujukan untuk meningkatkan harkat dan martabat manusia Indonesia serta memperkuat jati diri dan kepribadian bangsa. Kebudayaan nasional yang mencerminkan nilai luhur bangsa terus dipelihara, dibina, dan dikembangkan dengan memperkuat penghayatan dan pengamalan Pancasila, meningkatkan kualitas kehidupan, memperkuat jati diri dan kepribadian bangsa, mempertebal rasa harga diri dan kebanggaan nasional ...

Penelitian dan pengembangan hukum serta ilmu hukum dilaksanakan secara terpadu yang meliputi semua aspek kehidupan dan terus ditingkatkan agar hukum nasional senantiasa dapat menunjang dan mengikuti dinamika pembangunan, sesuai dengan perkembangan aspirasi masyarakat, serta kebutuhan masa kini dan masa depan.

Dengan demikian, dalam GBHN sangat jelas bahwa penelitian dan pengembangan nilai-nilai (hukum) budaya merupakan bagian terpenting dari sistem kehidupan hukum nasional. Unsur-unsur kebudayaan daerah suku Bugis-Makassar yang tumbuh sejak sebelum kedatangan islam di daerah ini, tentu tidak terkecuali sebagai bagian dari budaya nasional. Bahkan ada yang berpandangan, bahwa ... tinggi rendahnya suatu bangsa dapat dilihat dari Agamanya, Seni Budayanya, Ilmu pengetahuan Ketatanegaraannya dan lain-lain (Moeing, 1977: 22-23). Jadi tegasnya bahwa kebudayaan nasional sangat ditentukan oleh unsur-unsur kebudayaan daerah.

Kedua, alasan idealita; bahwa bangsa Indonesia yang

dikenal sebagai bangsa yang mejemuk di mana Pancasila sebagai pandangan hidup, sarat akan nilai-nilai (hukum) kebudayaan luhur yang pluralistik di mana kedudukannya dilindungi oleh negara. Dan setiap masyarakat budaya yang pluralistik itu mempunyai pranata susila sosial dengan ciri khas budayanya masing-masing. Salah satu budaya pranata susila sosial yang akan diteliti oleh penulis adalah "*budaya siri Bugis Makassar*". Jadi sifatnya sangat empirik. Ketiga, mengacu kepada alasan yang dikemukakan oleh Marzuki (1995: 5-6), antara lain disebutkan:

"Penelitian yang dilakukan guna menelaah dan menggali nilai-nilai (hukum) budaya daerah perlu mendapat perhatian di kalangan para ilmunan, utamanya dalam rangka pembangunan hukum nasional. Pasal 32 Undang Undang Dasar 1945 meletakkan dasar bahwa *kebudayaan bangsa* (Kebudayaan Nasional Indonesia) "*yang timbul sebagai buah usaha budinya rakyat Indonesia seruhnya*" adalah terdiri dari dua unsur budaya utama, yakni 1. "*Kebudayaan lama dan asli terdapat sebagai puncak kebudayaan di daerah-daerah di seluruh Indonesia*" dipandang "*terhitung sebagai kebudayaan bangsa*" sepanjang "*menuju ke arah kemajuan adab, budaya dan persatuan*", serta 2. "*...unsur-unsur baru dari kebudayaan asing yang dapat memperkembangkan atau memperkaya kebudayaan bangsa sendiri serta mempertinggi derajat kemanusiaan bangsa Indonesia*".

Penjabaran Pasal 32 Undang Undang Dasar 1945 pada GBHN 1988 antara lain menetapkan sebagai berikut:

"Dalam rangka upaya mengembangkan kebudayaan bangsa yang berkepribadian dan berkesadaran nasional perlu ditumbuhkan kemampuan masyarakat untuk mengangkat nilai-nilai sosial budaya daerah yang luhur serta menyerap nilai-nilai dari luar yang positif dan yang diperlukan bagi pembaharuan dalam proses pembangunan.

Dalam pada itu perlu dicegah sikap-sikap feodal dan kedaerahan yang sempit serta pengaruh kebudayaan asing yang negatif.

Dalam GBHN 1993 dikemukakan bahwa kebudayaan nasional yang merupakan puncak-puncak kebudayaan daerah harus mengangkat nilai budaya daerah yang luhur, menyaring dan menyerap nilai budaya dari luar dan sekaligus menolak nilai budaya yang merugikan pembangunan dalam upaya menuju kemajuan adab dan mempertinggi derajat kemanusiaan bangsa Indonesia.

Keempat, alasan perspektif tentang nilai-nilai budaya masyarakat Indonesia dewasa ini. Beberapa kalangan budayawan dan pakar hukum menilai, bahwa "nilai-nilai luhur budaya kita dewasa ini telah mengalami degradasi (keburukan) kultur", yaitu bergeser ke posisi yang jelek dan tidak lagi bermakna luhur. Satu di antaranya adalah Satjipto Rahardjo, Guru Besar Sosiologi Hukum UNDIP Semarang (Marzuki, 1995: 14), dalam tulisannya yang berjudul "*Tempat Rasa Malu Dalam Hukum*", antara lain disebutkan, bahwa:

"Pola perilaku hukum di Indonesia cenderung menyamai perilaku orang-orang Jepang yang mengunggulkan moralitas (*supermacy of moral*) dalam kehidupan hukum mereka. Dikatakan, banyak daerah di negeri kita, rasa malu memegang peranan penting, seperti halnya dengan *wirang* di kalangan suku bangsa Jawa, *siri* di kalangan suku bangsa Bugis-Makassar, tetapi rasa malu dimaksud kini telah banyak menyusut, melemah serta rusak. Satjipto Rahardjo mengajak kita merenungkan masalah tersebut.

Demikian pula budayawan Muchtar Lubis berpendapat, di Indonesia budaya malu sudah semakin musnah. Dikatakan, banyak manusia Indonesia tidak lagi merasa malu kalau jadi kaya-raya selagi memegang jabatan resmi, pada

hal jika dihitung-hitung, gaji mereka tidak mungkin mampu mendorong menjadi kaya-raya sedemikian.

"Jika budaya malu di kalangan birokrat sudah hilang, kemudian budaya malu di kalangan pejabat dan masyarakat juga hilang, maka jangan heran jika manusia Indonesia akan melakukan hal-hal yang aneh, mengerikan serta memalukan" kata Muchtar Lubis (Marzuki, 1995: 14).

Dalam 50 tahun Indonesia merdeka, katakanlah menjelang pasca liberalisasi perdagangan, muncul apa yang disebut "*Sindrom Kebudayaan Kemunafikan*" sebagaimana yang ditegaskan oleh Ketua MPR-DPR Wahono dalam salah satu Sidang DPR. Yang dimaksudkan oleh Wahono sindrom kebudayaan kemunafikan adalah "*tidak satunya langkah antara perbuatan dengan ucapan oleh sebagian pelaku penyelenggara negara dan masyarakat*" (Berita Nasional tanggal 19 Juli 1996 yang disiarkan oleh RRI).

Lebih lanjut, Wahono menyatakan:

"Akhir-akhir ini kita dapat menyaksikan ciri nyata budaya kemunafikan yang melanda sebagian masyarakat, termasuk lapisan kepemimpinan, yaitu ketidakmenyatuan kata dari perbuatan.

Menurut dia, gejala primordialisme intelektual juga mulai tampak. Obyektivitas dan ketajaman pandangan serta kepekaan rasa kepedulian sosial sudah menipis. "Ini meyedihkan dan dapat berpengaruh terhadap martabat bangsa dan generasi penerus kita dan jauh dari cita-cita moral yang tercantum dalam Undang Undang Dasar 1945" kata Wahono ketika menutup masa persidangan 1995/1996 di Gedung DPR Senayan (Suara Merdeka, tanggal 20 Juli 1996).

Bertitik tolak dari apa yang ditegaskan oleh

Ketua MPR-DPR tersebut tentang *sindrom kebudayaan masa kini*, berarti telah terjadi *degradasi* dan *dekadensi moral* terhadap nilai-nilai luhur budaya nasional yang bertentangan dengan Undang Undang Dasar 1945. Berarti pula semakin perlu artinya meneliti dan mengkaji serta mengangkat ke permukaan nilai-nilai luhur (hukum) budaya bangsa, termasuk budaya *siri'* agar tidak sekedar menjadi *simbol*. Sebab jika tidak, maka dapat saja nilai-nilai luhur (hukum) itu menjadi semakin tenggelam.

Kekhawatiran yang sama seperti yang dikemukakan oleh Wahono, juga pernah dikemukakan oleh Satjipto Rahardjo tentang sindrom masa kini, yang dimuat dalam Harian Suara Merdeka tanggal 26 april 1996. Dan ini sangat empirik karena sifatnya kasuistik.

Fenomena - fenomena sosial seperti di atas semakin memperkuat alasan penulis, bahwa betapa pentingnya meneliti dan mengkaji nilai-nilai (hukum) budaya *siri'*, yang dalam konsep budaya nasional disebut "*harkat dan martabat*", *wirang* suku bangsa Jawa serta istilah-istilah lain pada masing-masing kebudayaan daerah di seluruh nusantara.

Menurut hemat penulis, bahwa salah satu faktor penyebab munculnya *degradasi* terhadap nilai-nilai budaya bangsa, karena ketidakmampuan sebagian

masyarakat kita (seperti yang disebut di muka) mengaktualkan dan mensosialisasikan makna harkat dan martabat (*siri'*, *wirang*) ke dalam perilaku sehari-hari.

Dalam kajian tentang budaya (*hukum*) *siri'* suatu tinjauan sosio-kultur sebagai langkah-langkah preventensi terhadap terjadinya tindak pidana, adalah dapat menghindarkan adanya korban, sekaligus mencegah munculnya pelaku-pelaku kriminal termasuk pelaku-pelaku kriminal intelektual sekalipun.

Penekanan dalam rencana pembahasan tesis seperti itu kiranya dapat pula dibandingkan dengan kebijakan kriminal (*criminal policy*) yaitu upaya non-penal sebagaimana yang ditulis oleh Barda Nawawi, yang disampaikan oleh beliau pada Seminar Nasional Kriminologi VI di Semarang tanggal 16-18 September 1991.

Kelima, alasan persepsi atau pemahaman. Sebagaimana yang dikemukakan oleh Marzuki (1995: 3) bahwa "hingga kini masih terdapat persepsi atau pemahaman yang keliru dari sebagian besar orang berkenaan dengan *siri'*. *Siri'* acapkali masih dikonotasikan dengan luapan impuls dendam kesumat (*'wraakzuchtig'*) dari seorang atau sekelompok orang yang menyebabkan terjadinya pelbagai peristiwa

berdarah (atau tindak pidana) pada masyarakat suku bangsa Bugis-Makassar".

Mantan Kepala Kepolisian R.I., Jenderal Pol.Drs Widodo Budidarmo dalam sambutannya pada Seminar Nasional tentang masalah *Siri'* di Sulawesi Selatan yang diselenggarakan oleh KODAK XVIII Sulselra dan UNHAS dari tanggal 11 sampai dengan 13 Juli 1977 di Kantor Gubernur Sulawesi Selatan (Andi Zainal Abidin, 1983: xii-xiii), antara lain dekemukakan sebagai berikut:

Istilah "*siri'*" mula-mula menimbulkan gambaran bagi saya, yang saya asosiasikan dengan segala bentuk kekerasan dan kekejaman, bersumber pada rasa benci dan dendam, yang refleksinya terlihat pada angka-angka kejahatan, penganiayaan dan pembunuhan yang diklasifisir bermotifkan *SIRI'*, dan menunjukkan kenaikan frekuensi pada dua tahun terakhir ini. Tadinya *SIRI'* saya asosiasikan dengan KEJAHATAN.

Namun setelah saya membaca karangan (paper) mengenai masalah *SIRI'* yang telah disajikan anggapan saya tersebut di atas! Saya dapat mempelajari bahwa *SIRI'* adalah pandangan hidup (*Lebensanschauung*) yang mengandung etiek dan perbedaan manusia dan binatang dengan adanya rasa harga diri dan kehormatan yang melekat pada manusia dan mengajarkan moralitas kesusilaan berupa anjuran, larangan, hak dan kewajiban yang memedomani tindakan manusia untuk menjaga dan mempertahankan harga diri dan kehormatan tersebut. *Siri'* adalah hasil proses endapan kaidah-kaidah yang diterima dan berlaku dalam lingkungan masyarakat, mengalami pertumbuhan berabad-abad, sehingga membudaya ... Rasa harga diri dan kehormatan sebagai esensi *SIRI'* secara implisit membawa serta pengertian malu, suatu rasa yang timbul akibat adanya perkosaan terhadap HARGA DIRI dan KEHORMATAN, karena itu

SIRI' malah diidentikkan dengan MALU. SIRI' mewajibkan adanya tindak terhadap penyebab timbulnya MALU sepadan dengan tingkatan rasa malu yang ditimbulkan (*reprociteit*), dan bentuk-bentuk tindak *reprociteit* tertentu yang kemudian sebagai kejahatan, berdasarkan kaidah-kaidah baru sesuai karena perkembangan keadaan.

Menurut KAPOLRI bahwa sesungguhnya SIRI' dikenal pula di daerah lain di Indonesia, seperti *Wirang* di Jawa, *Jengga* di Bali, *Pantang* di Sumatra.

Dalam penelitian inilah diharapkan nantinya dapat dijadikan bahan informasi untuk meluruskan pelbagai persepsi (penafsiran) yang keliru berkenaan dengan makna dan hakikat *siri'*.

Keenam, alasan tinjauan masa depan hukum pidana materiil nasional. Menurut Baharuddin Lopa dalam salah satu kuliah umum di Universitas Muslim Indonesia Ujung Pandang, bahwa hukum pidana materiel itu bukan hanya sebagaimana yang dirumuskan di dalam KUHP seperti yang berlaku sekarang, tetapi juga meliputi nilai-nilai budaya (hukum) yang hidup dan terpelihara di dalam masyarakat bangsa Indonesia. Misalnya hukum pidana adat yang tak tertulis. Dengan demikian, oleh karena *budaya siri'* Bugis-Makassar di Sulawesi Selatan merupakan bagian dari hukum adat pidana, maka sudah tentu budaya (hukum) *siri'* dapat dijadikan landasan dalam rangka sosialisasi hukum pidana materiil. Terutama dalam rangka melakukan langkah-langkah prevensi untuk mengurangi

dan mencegah terjadinya suatu tindak pidana (delik) atau kejahatan yang bertalian dengan masalah *siri*.

Menurut Sugangga dalam Orasi Ilmiah yang disampaikan pada Acara Peringatan Dies Natalis Fakultas Hukum UNDIP Semarang ke-38 pada tanggal 09 Januari 1996, ia mengemukakan bahwa:

"Nilai-nilai atau asas-asas hukum adat yang mempunyai nilai universal sangat perlu mendapat perhatian dalam pembentukan hukum sipil nasional tersebut, bahkan lembaga-lembaga hukum adat yang dalam bentuk pernyataan modern diketemukan pula dalam hukum internasional".

Kemudian daripada itu, Sugangga berkesimpulan bahwa:

1. Dalam pembangunan hukum nasional di Indonesia, hukum adat berperan yang sangat penting, untuk memberi bahan-bahan dalam pembentukan kodifikasi di Indoneia.
2. Hukum adat dapat langsung dipakai di dalam lapangan yang belum mungkin dapat dikodifikasikan.
3. Hukum adat sebagai hukum kebiasaan maupun sebagai hukum tidak tertulis akan tetap menjadi sumber hukum yang baru dalam hal-hal yang tidak atau belum ditetapkan dengan Undang-undang.

Hal yang senada namun cakupan yang lebih luas lagi, dikemukakan oleh Muladi dalam Pidato Pengukuhan sebagai Guru Besar Bidang Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang pada tanggal 24 Februari 1990, antara lain disebutkan bahwa "... penalaran dan penjabaran pemikiran-pemikiran yang sudah baku berupa asas-asas hukum yang

berlakunya sudah tidak diragukan lagi, ... serta mengkaji hal-hal yang bersipat empiris, termasuk kecenderungan-kecenderungan di bidang hukum dan hukum pidana yang berjangka panjang, baik nasional maupun universal". Ini berarti Muladi menilai bahwa betapa pentingnya penjabaran (dibaca: penelitian) pemikiran asas-asas hukum yang sudah berlaku dan bersifat empirik bagi pengembangan hukum pidana nasional demi menjangkau masa yang akan datang.

Dengan demikian dapat disimpulkan, bahwa latar belakang penelitian hukum yang menjadi persyaratan tesis ini adalah sebagai berikut:

1. Budaya *siri'* sebagai bagian dari budaya daerah, merupakan bagian dari budaya nasional. Budaya nasional merupakan salah satu amanat pembangunan nasional yang telah dituangkan di dalam Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN). Berarti pula, bahwa penelitian tentang budaya *siri'* termasuk bagian dari amanat pembangunan nasional.
2. Diperkirakan oleh penulis, bahwa lebih dari seper empat abad yang lalu, penelitian tentang budaya *siri'* dalam kaitannya dengan hukum pidana yang bersifat spesialisasi keilmuan, hampir tidak ditemukan oleh penulis. Itulah sebabnya judul tesis ini dianggap oleh penulis sangat aktual untuk dibahas.
3. Beberapa ahli hukum pidana menilai (termasuk

Barda Nawai), bahwa kecenderungan Hukum Adat di Fakultas Hukum baik Perguruan Tinggi Negeri maupun Perguruan Tinggi Swasta, sejak dahulu hingga kini, orientasinya hanya tertuju kepada hukum perdata semata. Artinya, pembahasan mengenai hukum adat dalam kaitannya dengan hukum pidana hampir tidak ada sama sekali. Oleh sebab itu perlu kiranya ada pemikiran-pemikiran baru untuk mengikutsertakan substansi hukum pidana adat dalam pokok-pokok pembahasan materi Hukum Adat. Penulisan Tesis ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran untuk hal tersebut.

4. Budaya *siri'* di Sulawesi Selatan selama ini justru dikenal sebagai kausa berbagai peristiwa berdarah. Penelitian ini akan dicoba untuk meneliti langkah-langkah preventif untuk tidak terjadinya suatu peristiwa berdarah di mana *siri'* sebagai instrumen.

Khusus alasan atau latar belakang yang kedua dan ketiga merupakan alasan pengembangan akademik ilmu-ilmu hukum.

B. RUMUSAN PERMASALAHAN

Berpangkal tolak dari uraian latar belakang penelitian hukum tentang budaya *siri'*, sebagai suatu tinjauan sosio-kultur dalam upaya melakukan langkah-langkah prevensi terjadinya delik atau

peristiwa pidana, maka permasalahan pokok yang diperkirakan muncul adalah:

1. Sejauh manakah upaya sosialisasi budaya *siri'* dapat mencegah terjadinya delik?
2. Langkah-langkah prevensi yang bagaimana dapat dijadikan ukuran?
3. Apakah perbedaan persepsi di kalangan masyarakat Bugis-Makassar selama ini merupakan faktor terjadinya delik?

C. METODE PENELITIAN

Dalam meneliti hal-hal yang bersifat teoretis seperti asas-asas hukum, konsep-konsep, pandangan-pandangan, doktrin-doktrin hukum, kaedah-kaedah budaya *siri'*, sebagaimana yang terdapat di dalam manuskrip-manuskrip *lontara*, apakah itu menyangkut tindak pidana pembunuhan atau delik pencemaran nama baik orang lain, penulis lebih banyak menggunakan penelitian kepustakaan (*library research*). Begitu pula halnya penelitian yang ditujukan kepada penerapan norma-norma hukum budaya *siri'* dan ketentuan undang-undang hukum pidana yang terjadi di dalam praktik, baik yang berkaitan dengan pembunuhan yang berlatar belakang *siri'* ataupun yang berkaitan dengan pencemaran nama baik orang lain. Sedangkan langkah-langkah preventif menurut budaya *siri* untuk mencegah terjadinya tindak pidana, lebih banyak dilakukan melalui penelitian lapangan.

D. TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN

1. TUJUAN PENELITIAN

Adapun maksud tujuan penelitian hukum ini adalah sebagai berikut:

- a. Sedapat mungkin dapat memberikan wacana teoretis berkenaan dengan langkah-langkah prevensi budaya *siri'* dalam menanggulangi perbuatan pidana. Sekaligus untuk mengetahui takaran kebenaran langkah-langkah yang dimaksud.
- b. Memberikan sumbangan pemikiran teoretis mengenai konsepsi budaya *siri'* dalam perkembangan hukum pidana materiel.
- c. Memberikan sumbangan pemikiran teoretis berkenaan dengan sosialisasi nilai-nilai budaya *siri'* baik dalam arti *malu*, *harga diri*, *harkat* dan *martabat* manusia dalam kaitan dengan upaya preventif terhadap perbuatan-perbuatan pidana di dalam masyarakat.
- d. Untuk mengetahui bagaimana budaya *siri'* dilaksanakan di dalam masyarakat sehingga dapat menekan angka kejadian tindak pidana.
- e. Memberikan sumbangan pemikiran secara teoretis bahwa dengan menggali nilai-nilai budaya daerah sebagai bagian dari budaya nasional, adalah sangat bermanfaat bagi pembangunan hukum nasional di masa datang khususnya hukum pidana.

2. MANFAAT PENELITIAN

Manfaat penelitian antara lain:

- a. Secara praktis, penelitian ini dapat memberikan sumbangan pemikiran kepada masyarakat (ilmiah, eksekutif, yudikatif) terutama pada para praktisi hukum dan masyarakat Bugis-Makassar Sulawesi Selatan dalam rangka mencapai suatu upaya-upaya preventif dari tindak pidana.
- b. Dalam bidang akademik, dengan penelitian ini tentunya dapat menjadi sumbangan pemikiran teoretis atau sebagai tambahan bahan referensi.

E. LOKASI DAN WAKTU PENELITIAN

1. LOKASI PENELITIAN

Dalam penelitian ini penulis memilih lokasi sebagai daerah sampel antara lain di Kabupaten Gowa, Bone, Kabupaten Luwu dan Kotamadya Ujung Pandang.

Alasan penulis memilih lokasi ini adalah, bahwa tiga daerah tingkat dua di antaranya merupakan pusat kebudayaan Bugis-Makassar terbesar di Sulawesi Selatan dari zaman dahulu kala hingga kini.

2. WAKTU PENELITIAN

Penelitian ini telah memakan waktu selama enam (6) bulan terhitung sejak disetujuinya proposal ini

Jadwal penelitian yang dimaksud adalah sebagai berikut:

Kegiatan	b u l a n					
	I	II	III	IV	V	VI
1. Persiapan	x					
2. Pengumpulan data dan analisis data di lapangan		x	x	x		
3. Seminar data lapangan				x		
4. Finalisasi analisis data dan penyusunan rencana laporan.					x	
5. Perbaikan dan penyerahan laporan penelitian.						x

F. KERANGKA TEORETIS

Bertitik tolak dari judul penelitian hukum yang dijadikan tesis ini, yaitu *Budaya Siri' Bugis-Makassar Sebagai Upaya Prevensi Delik*, maka secara sepintas dapat dimengerti jika pokok-pokok uraiannya adalah budaya *siri'* dikaitkan dengan pembedaan. Jadi budaya *siri'* diorientasikan kepada hukum pidana, yakni difokuskan kepada kajian delik pembunuhan dan delik pencemaran nama baik orang lain. Dengan demikian titik tolaknya adalah nilai-nilai budaya yang berbarengan dengan hukum pidana.

Dari sisi kajian nilai-nilai budaya *siri'*, paradigmanya terdapat dua kemungkinan, yaitu, dapat berupa paradigma fenomenologi dan dapat berupa paradigma normatif, tetapi normatif yang materiel. Sedangkan dari sisi kajian hukum pidana, hal ini jelas digunakan paradigma normatif.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. PENGERTIAN BUDAYA SIRI'

Menurut Walikota Madya Ujung Pndang, H. Malik B.Marsy saat menerima Piagam Penghargaan Adipura untuk Kotamadya Ujung Pandang menyatakan, bahwa "*budaya siri'*" itu ada *dua macam penafisran* yang berkembang. Pertama, ada penafisran yang bersifat negatif, dan kedua, ada yang bersifat positif. *Siri'* dalam arti yang pertama adalah menafsirkan *siri'* secara bebas nilai. Bebas nilai artinya bahwa nilai-nilai budaya *siri'* dapat ditempatkan dalam segala hal kehidupan manusia. Misalnya, "*main hakim sendiri*". Pandangan seperti ini kebanyakan dipunyai oleh masyarakat awam atau masyarakat yang kurang memahami makna hakikat *budaya siri'* itu sendiri. Persepsi-persepsi seperti itu sangat rawan akan munculnya suatu kejahatan atau mudah sekali menimbulkan perbuatan pidana. Kedua, penafsiran *budaya siri'* dalam arti yang positif, yaitu meletakkan nilai-nilai (*hukum*) budaya *siri'* pada suatu tempat yang sangat bernilai. Penafsiran seperti ini tetap berpegang kepada acuan-acuan nilai-nilai luhur budaya Bugis, Makassar. Artinya tidak menyimpang dari makna *siri'* yang hakikat, sekalipun nantinya ia telah melakukan perbuatan pidana atau delik, misalnya pembunuhan, tetapi

diyakini olehnya bahwa itu merupakan pelanggaran yang menyangkut *siri'*, menurut Andi Zainal Abidin, perbuatan itu dapat merupakan "*alasan pembenar*". Tetapi Petta Nabba menilai bahwa zaman sekarang, hal itu tidak mutlak lagi (hasil wawancara penulis pada tanggal 13 Nopember 1996).

Petta Nabba, seorang tokoh masyarakat sekaligus sebagai budayawan dari Bone pada prinsipnya berpendapat, bahwa hakekat pengertian *siri'* dapat dibedakan atas dua bahagian, yaitu:

1. *Siri'* yang positif yang sebaiknya tetap dipertahankan dan ditanamkan ke dalam dada setiap orang, tetapi bukan berarti orang yang mengalami *siri'* harus bertindak di luar hukum. Karena negara kita adalah negara hukum.
2. *Siri'* yang negatif, yang tidak wajar, yang dibuat-buat. *Siri'* seperti ini harus disingkirkan dari tengah-tengah masyarakat sebab kecenderungannya, adalah melahirkan kejahatan.

Sungguhpun Petta Nabba mengemukakan bahwa *siri'* yang positif sebaiknya ditanamkan ke dalam jiwa setiap orang, tetapi nampaknya belaiupun yakin bahwa "*Siri'* sangat sukar oleh orang yang tidak bersangkutan". Artinya, tidak semua orang dapat mencerna nilai-nilai budaya *siri'*. Karena dalam konsepsi *siri'* banyak sekali hal-hal yang tidak dapat dituturkan, dan banyak di antaranya tidak dapat diterima oleh rasio

manusia. Tetapi tidak dapat dikesampingkan, karena benar-benar besar pengaruhnya untuk menimbulkan peristiwa berdarah atau delik.

Selanjutnya, Petta Nabba mengutip salah satu pesan yang ada di dalam *Lontara*, bahwa "*siri'emmi natotau*" (Bugis), *siri'emmi nikana tau* (Makassar), Artinya 'karena *siri*'-lah sehingga kita dikatakan manusia'. Ini pulalah yang membedakan kita dengan binatang. Artinya, di mana ada *siri*', maka di situ ada manusia. dan jika *siri*' tidak ada, maka di situ tidak ada manusia. Yang ada hanyalah *rupa-manusia*.

Siri' dalam konteks seperti di atas nampaknya mengarah kepada makna filosofis. Oleh karena itu, *siri*' adalah *pola dasar* yang dapat disamaartikan dengan kemanusiaan. Dalam kaitan ini, Anwar Ibrahim yang mengutip dari *Lontara paseng* (Marzuki, 1995: 40) mengamati adanya *lima akkatenningeng* (lima pegangan). Lima akkatenningeng itu antara lain:

1. *Ada tongeng* (=kata-kata yang benar), maksudnya agar manusia berpegang pada *ada tongeng*, melakukan perbuatan sesuai apa yang diucapkan.
2. *Lempuk* (=lurus,jujur), utamanya yang berkaitan dengan kejujuran terhadap harta.
3. *Getteng* (=teguh pada kenyataan yang benar), yakni manakal suatu kebenaran telah dianut maka manusia harus teguh pada kenyataan dan tidak akan goyah.
4. *Sipakatau* (=saling memanusiaikan), maksudnya saling menghargai sesama manusia.
5. *Mappesona ri-Dewata Seuwae* (=berserah diri pada Dewata yang Tunggal), maksudnya berserah diri pada Tuhan Yang Maha Esa.

Menurut Andi Zainal Abidin Farid (1983: 3),

siri' tidak lain adalah "harkat dan martabat sebagai manusia". Harkat menurut kamus bahasa Indonesia (Poe-wadarminta, 1991: 634), yaitu 1 mutu; nilai; harga; taraf; derajat (kemuliaan dan sebagainya; 2 tenaga; kekuatan; gerakan. Sedangkan "Martabat", disebut juga tingkatan; derajat; pangkat; dan gensi.

Dalam *Al-quran* disebutkan oleh Allah SWT., "*Daraajatun*" (bahasa Arab) yang sama artinya dengan "*derajat*" (*Surah Al-Mujaadalah* ayat 11). Berdasarkan ayat ini, Allah hanya memberikan derajat (kemuliaan) itu kepada orang-orang yang berilmu namun bertaqwa dan beriman. Jika sekiranya kita mengidentikkan *siri'* dengan "*derajat*" sebagaimana yang disebutkan oleh Allah dalam ayat ini, maka seolah-olah Allah berkata "*yang memiliki siri' hanyalah orang-orang yang berilmu atau orang-orang yang menggunakan akalnyanya*".

Ada juga yang mengidentikkan *siri'* dengan malu atau rasa malu, antara lain, Marzuki (1995: 35-36) menyebutkan sebagai berikut:

"Kata *siri'* dalam bahasa Bugis atau dalam bahasa Makassar adalah berarti malu atau rasa malu, sekalipun kata *siri'* tidak hanya dipahami menurut makna harfiah (leksikal) tersebut.

Pada manuskrip-manuskrip *Lontara* tidak ditemukan batasan baku berkenaan dengan kata *siri'*. Kata *siri'* tidak dengan tegas disebut dalam *Surek Selleang I La Galigo* namun terdapat kata *siri atakka* dalam manuskrip sastra Bugis Kenamaan itu, yakni nama dua jenis tanaman yang dipandang mengundang pelambang (*'sennureng*) terhadap kata *siri'*. B.F. Matthes (1874) berpendapat

bahwa nama tanaman yang dilambangkan sebagai *bali atakka* (=pasangan tanaman atakka) adalah tidak lain dari tanaman *siri* atau *sirih*. Matthes (1874, ibid: 815) memahami istilah *bali atakka* sebagai kata bahasa *To Bakke*, yang digunakan mereka sebagai "*om te zinspelen op siri*", *zich schamen, zijn eer kwijt zijn, enz, dewijl de siri-heester en de atakka-boom in de oude gedichten doorganstegelijk vermeld worden, zoodat de siri-heester als't ware de neven-man van de atakka is*". Namun tanaman *siri* atau *sirih* ... mempunyai kesamaan fonem dengan kata *siri*. Penulisan kedua kata dimaksud adalah sama pula yakni (aksara Bugis).

Salahuddin (1984: 9-14) menggaris bawahi penyebutan nama tanaman *siri atakka* pada bagian episode *Riulokkana Batara Guru* dalam *Surek Sel-leang I La Galigo*. Diturunkan bahwa *Datu Patoto To Palanroe*, dewata pencipta langit, bernama *La Patiganna Adji Sangkuru Wira* menghendaki salah seorang puteranya turun ke bumi ('*alekawa*') guna memimpin dunia tengah itu. Setelah dimusyawarakan, pilihan jatuh kepada putera sulungnya bernama *La Tongelangi* bergelar *Batara Guru*. Ketika melepas anaknya, *Datu Patoto* berpesan kepada anaknya agar apabila ia turun ke bumi maka "...*tiwikko ritu ...siri atakka ... narek-kuae mattengnga lalenna nonno ri lino ... mudan-keng siri atakka riataummu ... ianatu matu mancaji alek* (=bawalah ...*siri atakka ... manakala engkau telah di tengah perjalanan menuruni bukit ... susurkan siri atakka di bagian kananmu ... itulah kelak menjadi hutan*). Menurut Salahuddin, kata *alek* ('*hutan*') di sini bermakna perlambang bagi kehidupan (Marzuki, 1995: 36).

Seiring dengan hasil penelitian Laica Marzuki (1995: 36-37) berupa hasil wawancara dengan Muh. Amin Thalib, pensiunan Kepala Seksi Kebudayaan, Kandep Pendidikan Kebudayaan Kabupaten Dati II Sinjai pada tanggal 29 Februari 1984, dan 17 Juni 1992, antara lain dikemukakan:

"Hingga kini, pada masyarakat suku bangsa Bugis masih terdapat beberapa petuah lisan ('*paseng, pappaseng*') yang menjadikan nama tanaman

sirih selaku kata pelambang terhadap *siri'*, seperti halnya ungkapan:

- *Abekekko raung sirih* (=lilitkan daun sirih pada pinggangmu). Maksudnya, selalulah menyertakan *siri'* pada dirimu.
- *Tanekkon raung sirih riolo bolamu, mutanemg perring rimonri bolamu* (=tanamlah daun sirih di depan rumahmu dan tanamlah bambu di belakang rumahmu). Kata *siri'* dilambangkan pada *siri'*, sedangkan katam *perring* (=yang berarti bambu) dilambangkan pada *perri* (=kesulitan, hambatan, penderitaan) maksudnya, *siri'* pa *moloi perrie nariulle pajajiwi* (*siri'*lah yang harus ditegakkan dalam menghadapi kesulitan serta hambatan).

Ada juga yang berpendapat, bahwa kata *siri'* itu bermakna ganda. Yang berpendapat seperti ini adalah Leonard Y. Andaya (Hamid Abdullah, 1985: 50), antara lain ia mengemukakan sebagai berikut:

Di dalam istilah *siri'* ini terkandung dua pengertian yang saling bertentangan. Ia dapat berarti "malu", tetapi juga "rasa kehormatan" atau "harga diri". Sering terdengar seseorang itu dibuat *siri'* atau "dipermalukan" karena diabaikan, baik sengaja maupun tidak sengaja. Lebih jarang diutarakan mengenai seseorang yang berusaha memperoleh kembali atau memulihkan *Siri'*-nya atau "harga diri". Namun, kedua segi kata tersebut sangat hakiki dalam memenuhi totalitas konsep tersebut. Situasi *Siri'* muncul pada saat seseorang merasa bahwa kedudukan atau perbawa sosialnya dalam masyarakat, atau rasa harga diri dan kehormatannya telah dicemarkan pihak lain secara terbuka. Biasa juga terjadi kalau seseorang yakin, bahwa ia telah dituduh melakukan sesuatu yang tidak ia lakukan, yang berarti dipersalahkan secara tidak adil. Dalam Bugis atau Makassar akan menerima dengan rendah hati cacian yang kasar sekalipun kalau ia merasa dirinya bersalah, tetapi ia akan melawan dengan kekerasan terhadap sikap yang demikian itu apabila ia percaya bahwa dirinya benar, dan sebab itu merasa pribadinya terhina di depan masyarakat.

Sekali seseorang dibuat *siri'* (dipermalukan) maka ia dituntut oleh masyarakat untuk meng-

ambil langkah menebus dirinya dengan menyingkirkan penyebab malu yang tidal adil itu dan dengan demikian memulihkan *siri'*-nya (harga dirinya) di matanya sendiri dan di mata masyarakat. Masyarakat mengharapkan seseorang yang telah dibuat *siri'* itu mengambil tindakan terhadap si pelanggar, karena dirasakan lebih baik mati mempertahankan harga diri (*mate ri siri'*) daripada hidup tanpa harga diri (*mate siri'*)...

Apa yang dikatakan oleh Andaya tentang mempersamaartikan antara *siri'* dan malu pada dasarnya tidak salah. Tetapi menurut hemat penulis, antara *siri'* dan malu tidak selamanya sinonim. Karena antara keduanya, kadang-kala pada waktu dan tempat tertentu sifat malu (rasa malu) dan harkat martabat sebagai hakikat *siri'* sama sekali tidak sama. Misalnya, sikap malu seseorang untuk tidak melakukan suatu perbuatan tercela (perbuatan pidana) karena ada faktor eksternal. Suatu faktor yang mempengaruhi seseorang untuk tidak berbuat tercela yang bersumber dari luar dirinya, sehingga pada waktu dan tempat itu tidak dilakukannya. Sekaligus mungkin ia ingin mendapat pengakuan atas faktor eksternal tadi, bahwa "ia tidak melakukan perbuatan yang memalukan". Namun mungkin sekali pada waktu dan kesempatan yang lain di mana tidak dipengaruhi faktor eksternal yang mempengaruhi, ia sebenarnya cenderung berbuat pelanggaran memalukan.

Berbeda dengan *siri'* dalam arti harkat dan martabat manusia, benar-benar merupakan suatu konsep nilai yang tidak membedakan antara ada tidaknya suatu

faktor yang mempengaruhi dalam setiap tindakan seseorang. Karena yang mendahului perbuatan adalah faktor harkat dan martabatnya. Jadi pengertian yang kedua lebih sensitif dibandingkan dengan yang pertama.

Dengan demikian, *siri'* dalam arti "malu" masih memungkinkan suatu sikap (*attitude*) yang ambivalen. Artinya, terkadang pada waktu tertentu sikap malu ada tetapi pada waktu dan tempat yang lain, rasa malu itu lenyap sama sekali. Namun, *siri'* sebagai harkat dan martabat di mana tempat dan waktu yang sama ataupun berbeda, selalu menampilkan perilaku yang khas. Perilaku yang khas itu adalah kejujuran yang berwibawa, yang dalam ilmu administrasi negara disebut *energi phisikologism*.

Dalam konteks seperti di atas, penulis berani menelorkan suatu postulat bahwa *siri'* itu merupakan kedalaman sikap budi yang dilandasi oleh akal sehat yang bersifat interioritas. Kedalaman sikap budi seperti itu tidak berada di luar akal sehat dan perilaku positif.

Siri' dalam kaitannya dengan masalah pembelaan diri ini pada dasarnya berkaitan juga dengan masalah pembelaan kehormatan keluarga. Karena dinilai, bahwa antara diri pribadi dengan keluarga (sanak famili baik melalui hubungan darah semenda, maupun melalui hubungan tali perkamwinan) tidak dapat dipisahkan.

Dalam kaitan seperti itu, Nurdin Yatim (Hamid Abdullah, 1985: 44) menilai, bahwa masalah membela kehormatan keluarga sebagai manifestasi adat/*siri'* dalam kehidupan masyarakat Bugis-Makassar, ia berpandangan bahwa:

"Filsafat hidup mereka (Bugis-Makassar) yang dipegang secara teguh bahkan sering ditonjolkan secara emosional, dirangkai dalam kata-kata bahasa Makassar *sirik na pecce* (*siri'* dan *kepedihan*, pen.)... Kata *siri'* yang secara harfiah berarti malu, juga berarti kehormatan. *Rasa* dan *nilai kehormatan* ini ditanam dan dikembangkan dalam diri pribadi setiap anggotanya dalam kaitan dengan kehidupan keluarga (hubungan darah). Seseorang *harus* menjaga kehormatan dan nama baik keluarganya. Perempuan adalah yang menjadi lambang keluarga. Oleh karena itu, tidak mengherankan kalau sebuah perbuatan yang menjurus kepada tindakan yang merusak nama keluarga, dengan mencemarkan perempuan anggotanya, berarti dengan peristiwa berdarah yang bermaksud *pembunuhan*, dilakukan oleh anggota keluarga itu.

Menurut Hamid Abdullah sendiri (1985: 45), membela kehormatan keluarga, adalah sesuatu yang bersifat hakiki bagi manusia yang berada dalam siklus *siri'*. Bahkan lebih tegas lagi Abdullah berpandangan, bahwa "tidak ada alternatif lain bagi orang yang berada dalam siklus itu untuk dapat terhindar dari suatu tanggung jawab moral dalam membela kehormatan keluarga, termasuk kehormatan dirinya".

Pernyataan atau pandangan-pandangan seperti di atas menunjukkan betapa budaya *siri'* bagi Bugis, Makassar berperan sebagai alternatif hidup dan kehidup-

an. Hampir dapat dikatakan bermuara ke segala aspek, termasuk aspek hukum pidana nasional maupun hukum pidana adat. Pandangan agaknya lebih luas dikemukakan oleh A. Mattulada (salah seorang budayawan Sulawesi Selatan dan juga Guru Besar di bidang Antropologi Universitas Hasanuddin Ujung Pandang), dengan tegas menyatakan pandangannya tentang arti *Siri'* dan peranannya dalam hidup dan kehidupan manusia Bugis Makassar. Pandangan yang tegas itu, Mattulada berdasar kepada pencerminan darisikap manusia Bugis-Makassar terhadap adatnya. Pencerminan dan sikap yang dimaksud adalah "Berbagai ungkapan dalam bahasa Bugis yang terwujud dalam kesusastraan, *paseng*, dan amanat-amanat dari leluhurnya yang dapat dijadikan petunjuk untuk memahami *siri'*" (Hamid Abdullah, 1985: 46).

Selanjutnya, Mattulada menguraikan *paseng* dan amanat-amanat itu sebagai berikut:

1. *Siri' emmi ri onroang ri lino*. Artinya, hanya untuk *siri'* itu sajalah kita hidup di dunia. Dalam ungkapan ini, termaktub arti *siri'* sebagai hal yang memberi identitas sosial dan martabat kepada seseorang. Hanya kalau ada martabat atau harga diri, maka itulah hidup yang ada artinya.
2. *Mate ri siri' na*. Artinya, mati dalam *siri'*, atau mati untuk menegakkan martabat/harga diri. Mati yang demikian dianggap suatu hal yang terpuji dan terhormat.
3. *Mate siri'*. Artinya, orang yang sudah hilang martabat/harga dirinya, adalah sebagai bangkai hidup. Orang Bugis-Makassar yang merasa *mate siri'*, maka melakukan *jallo* (amuk), hingga ia mati sendiri. *Jallo* yang

demikian disebut: *Napatettongngi siri' na*, artinya: ditegakkan kembali martabat dirinya. Banyak terjadi dalam Bugis-Makassar, baik dalam daerah maupun dalam daerah mereka, peristiwa bunuh membunuh dengan *jallo*, dengan latar belakang *siri'*. Secara lahir, sering tampak seolah-olah orang Bugis-Makassar yang karena alasan *siri'*, dan sanggup membunuh atau dibunuh memperbuat sesuatu yang fatah karena alasan-alasan *sepele* atau karena masalah perempuan yang sesungguhnya harus dapat dipandang biasa saja. Akan tetapi pada hakekatnya, apa yang kelihatan oleh orang luar sebagai suatu hal yang *sepele* dan biasa tadi, sesungguhnya (bagi orang Bugis-Makassar) hanya merupakan suatu alasan lahiriah saja dari suatu kompleks sebab-sebab lain yang menjadikan ialah *merasa kehilangan martabat atau harga diri*, yang menjadi *identitas sosialnya* (Hamid Abdullah, 1985: 46-47).

Siri' adalah kebanggaan atau keagungan harga diri (*pride*). Bagi orang-orang suku Bugis-Makassar diwariskan amanah oleh leluhurnya untuk menjunjung tinggi adat istiadatnya yang di dalamnya terpatri pula sendi-sendi *siri'*.

Bagi pihak-pihak yang terkena *siri'*, tetapi membungkem 1001 bahasa (tanpa aksi-aksi perlawanan), dijuluki sebagai *'tena siri'na* (Makassar), artinya orang yang tidak punya harga diri (Moeing, 1977:19). Dengan demikian betapa besar pengaruh nilai-nilai budaya *siri'* itu terhadap sikap (*attitude*) dan mental orang-orang Bugis Makassar pada umumnya. Bilamana hal itu merupakan ruang lingkup persoalan sikap-mental, maka tentu ia tidak terlepas dengan akal budi sebagai mana postulat yang dikemukakan oleh penulis di atas.

Hasan Mahmud dalam bukunya *Silasa* (1976: 59),

antara lain disebutkan "*narekko siri'na narangreng tenritenrengina nariewa*". Artinya, kalau harga diri yang disinggung tanpa tanggapanpun dilawan. Mahmud menjelaskan sebagai berikut:

Siri' adalah hal yang sangat rawan karena menyangkut harga diri. Oleh sebab itu kalau menyangkut *siri'* tidak ada lagi jalan lain kecuali langsung mengadakan perlawanan, karena keberanian dalam keadaan bahaya adalah suatu kebijaksanaan dalam menghadapi bahaya.

Penjelasan Mahmud tersebut di atas menunjukkan bahwa ia mengartikan *siri'* sebagai *harga diri*. Penafsiran seperti ini sama dengan definisi hasil rumusan Seminar Masalah *Siri'* di Sulawesi Selatan yang diselenggarakan oleh KODAK XVIII Sulselra dan Universitas Hasanuddin dari tanggal 11 sampai dengan 13 Juli 1977 di Kantor Gubernur Sulawesi Selatan yang merumuskan definisi *Siri'* sebagai berikut:

SIRI' ADALAH SUATU SISTEM NILAI SOSIO KULTURAL DAN KEPRIBADIAN YANG MERUPAKAN PRANATA PERTAHANAN HARGA DIRI DAN MARTABAT MANUSIA SEBAGAI INDIVIDU DAN ANGGOTA MASYARAKAT (Andi Zainal Abidin Farid, 1983: xiii).

Dalam sambutan (mantan) KAPOLRI, Drs. Widodo Budidarmo, di mana Andi Zainal Abidin menilainya bahwa pandangan KAPOLRI itu sungguh tepat mengenai arti *Siri'*, yang pada umumnya tidak diketahui lagi oleh orang-orang Sulawesi Selatan, sebagaimana penulis utarakan di muka, yaitu pada alasan kelima penelitian ini. Itulah sebabnya Andi Zainal berpendapat

bahwa SIRI' dapat diartikan sebagai harkat dan martabat (kata benda) dan dapat juga bermakna rasa malu karena harkat dan martaba dilanggar oleh orang lain (Andi Zainal Abidin, 1983: xiv).

Menurut Andi Zainal, ada juga bentuk SIRI' yang (sebagai reaksi) ditimbulkan oleh keadaan, seperti merasa sangat malu karena bodoh, miskin, terkebela-kang dan sebagainya. Hal ini dijelaskan oleh Andi Zainal (1983: xv) sebaagai berikut:

Bentuk SIRI' tersebut yang mendorong banyak orang-orang Sulawesi Selatan untuk merantau dengan maksud untuk meningkatkan SIRI' di daerah lain. Bentuk SIRI' demikianlah yang terkandung di dalam nilai budaya Jepang yang disebut *ON*, *GIRI*, *GIMU*, *HAJI* yang dimo-tori oleh semangat *BUSHIDO* yang berhasil mengangkat derajat, harkat dan martabat bangsa Jepang sehingga berhasil dalam pembangunan nasionalnya. SIRI'lah juga yang menyebabkan bangsa Korea Selatan untuk maju dan mengekang nafsu untuk berkorupsi.

Pandangan Andi Zainal yang terakhir merupakan pandangan yang sangat menarik sekali karena sudah mencakup pelbagai aspek kehidupan sosial, bukan hanya kehidupan sosial secara individu, tetapi juga masyarakat dan negara sekalipun. Penafsiran-penafsiran seperti inilah yang dapat mengantarkan hasil pembahasan tesis ini nantinya lebih menarik lagi. Sepanjang ingatan penulis, pandangan seperti itu juga pernah dikemukakan oleh Satjipto Rahardjo dalam salah satu perkuliahan tentang *Aspek-aspek Pengubah Hukum*,

walaupun ia tidak memformulasikan bahwa itu adalah *perilaku siri'*. "Bagaimana orang-orang Jepang itu membangun dirinya atas dasar keuletan (malu, jika kita bangsa Indonesia, pen.). Demikian juga di Singapura, mereka malu membuang sampah jika bukan pada tempat yang telah disediakan", kata Rahardjo. Ini berarti *malu* atau *siri'* juga identik dengan "kesadaran hukum".

Menurut Andi Zainal (1983: xv), pandangan dan persepsi orang-orang Sulawesi Selatan dahulu kala, bahwa orang-orang yang suka melanggar hukum dianggap *mate siri'* (mati harkat dan martabatnya), pejabat yang sewenang-wenang dipandang tidak mempunyai SIRI'. *Konsepsi siri'* seperti ini mengandung pengertian, bahwa *siri'* identik dengan "kesadaran hukum atau patuh terhadap hukum", karena orang-orang yang suka melanggar hukum dianggap orang itu tidak punya SIRI'.

Ada juga pengetahuan *siri'* secara psikologis, sebagaimana yang dikemukakan oleh Hasan Machmud (1976 hal. 40-41), antara lain: "*Pawuno siri'e mappalete ripanmassareng esse babuwae*". Artinya, mematikan *siri'* mengantar ke liang lahat iba hati. Dalam penjelasannya disebutkan bahwa "Siri' yang tak bertanggung lagi dapat menekadkan yang mungkin berakhir dengan kematian. Demikian pula iba hati yang tak terbebani dapat menghancurkan diri (jasmaniah dan rohaniah yang berakhir pula di liang lahat).

Demikian pula dengan istilah "*Masiri' toi, riasiri' toi ripadanna tau*". Artinya, menyegani serta disegani oleh sesamanya manusia; tahu akan harga diri. Tidak ada kehormatan tanpa harga diri dan kehormatan akan datang bila kita sendiri bersedia pula memberikannya kepada orang lain.

Menarik juga dikemukakan konsepsi *siri'* sebagai hasil temuan dalam penelitiannya Laica Marzuki (1995: 37-38), antara lain dikemukakan sebagai berikut:

Konsepsi *siri'* telah sejak dahulu dikenal serta dihayati di kalangan masyarakat Bugis-Makassar. Hal tersebut ternyata pada beberapa ungkapan kalimat bijak yang dikemukakan oleh para leluhur mereka melalui petuah-petuah lisan (*pappaseng, pappasang*):

- *Siri' emmi nariasenng tau* (=bahasa Bugis) artinya, hanya *siri'* sehingga dinamakan manusia, maksudnya karena adanya *siri'* maka kita dinamakan manusia. Orang yang tidak memiliki *siri'* adalah bukan manusia tetapi *rapang-rapang tau* (boneka) atau *olok-kolok* (binatang).
- *Siri' emmi rionroang ri lino* (=bahasa Bugis) artinya, hanya karena *siri'* maka hidup di dunia.
- *Naia tau de'e siri'na, de'i rilainna olok-kolok'e* (bahasa Bugis) artinya, adapun manusia yang tidak memiliki *siri'* tiada bedanya dengan binatang.
- *Siri' emmitu tariaseng tau. Narekko de'i siri'ta, tenniaki tau, rupa taumani asenna* (=bahasa Bugis) artinya, hanya karena *siri'* maka kita dinamakan manusia. Manakala kita tidak memiliki *siri'*, kita bukan manusia lagi tetapi hanya menyerupai manusia.
- *Siri'taji nakitau* (bahasa Makassar) artinya, hanya karena *siri'* maka kita dinamakan manusia.
- *Sirikaji tojeng, Siri'taji tojeng* (=bahasa Makassar) artinya, hanya *siri'lah* yang benar.

- *Puang, siri`kumi kipuata* (=bahasa Bugis); *Karaeng, siri`kuji ki atai* (=bahasa Makassar) artinya, Tuanku, hanya karena siri` maka Tuan memperhambakan diriku. (Terjemahan bebas dari penulis, yaitu; Tuhanku, hanya karena siri` sehingga aku dapat dinamakan hamba yang sebenarnya).
- *Rekkuwa dekni siri`ku, mau gajangekki`, dekna namallebbo-lebbong* (=bahasa Bugis); *Punna taenamo siri`ku, manna kupannobokang ki`, taenamo nalantang-lantang* (=Bahasa Makassar) artinya, manakala tiada lagi siri`ku, maka sekalipun aku menikamkan krisku kepada tuan, tidaklah menjadi dalam lagi (tidaklah berarti lagi, pen.).
- *Siri`ga rodo ri Puang tonget-tongetta?* (bahasa Bugis) artinya, (terjemahan bebas Marzuki); siri`apapulakah namanya, siri`aku kepada Allah?

Catatan dari penulis terhadap tulisan B.F. Matthes di atas, bahwa mungkin ada kesalahan redaksi jika terjemahan bebas dari Marzuki seperti itu. Mungkin redaksinya sebagai berikut: *Siri`aga rodo ri Puang tonget tongetta?* Ini baru dapat sesuai dengan terjemahan bebas dari Marzuki di atas. Kalau terjemahan bebas dari penulis sendiri, maka petuah tersebut bermakna sebagai berikut: Siri` yang bagaimanakah yang sepatutnya kepada Tuhan Yang Maha Esa?

- *Kaanne buttaya ri Gowa majarremi ni kasi-rikang* (=bahasa Makassar) artinya (terjemahan bebas Marzuki), bahwa sanya negeri (tanah, pen.) Gowa ini telah ditekadkan guna dibela siri`-nya.

Berdasarkan sejarah, konsep siri` barulah dapat dibaca dan diamati dalam bentuk manuskrip *Lontara* pada awal abad XVI, bersamaan dengan disempurnakannya aksara Makassar oleh *tumarilalang* (orang dalam) kera-

jaan Gowa merangkap Syahbandar, *Daeng Pamatte* di masa pemerintahan raja Gowa IX, *Daeng Matanre Karaeng Manguntungi*, yang juga bergelar *Karaeng Tumapa'risi Kallonna (1510-1546)*. (Marzuki, 1995: 38-39).

Sepanjang pengetahuan penulis, ditemukan pula istilah-istilah *Siri'* di Sulawesi Selatan, istilah-istilah mana sering dijadikan suatu pranata susila sosial di kalangan masyarakat. Istilah-istilah itu ternyata cukup *sensitif* (sangat peka) dalam pergaulan hidup sehari-hari, seperti:

a. *mitte' siri'*, b. *minreng siri'*, c. *maega siri'*, d. *engka siri'na*, e. *degaga siri'na*, f. *mappakasiri'-siri'*, g. *matanre siri'*, h. *napakasiri'ki'*, i. *mate siri'*.

ad. a. *Mitte siri'* (bahasa Bugis) artinya, memungut (mencontoh) *siri'* (harkat dan martabat) orang lain. Atau mengambil sifat-sifat yang elok dan mulia dari orang lain yang dilihatnya untuk digunakan pada dirinya sendiri. *Siri'* di sini diartikan sebagai *perilaku yang baik*. Selain daripada itu, *mitte siri'* dapat juga bermakna *membuang sikap yang jelek*.

ad. b. *Minreng-inrekko Siri'* (=bahasa Bugis) artinya, pinjam-pinjamlah *siri'*. Jadi hampir sama dengan yang pertama di atas.

ad. c. *Maega siri'* (=bahasa Bugis) artinya, tingkah

laku yang berlebihan. Sehingga kadangkala orang yang berwatak seperti ini biasanya bertindak melewati batas norma-norma adat. Ada istilah yang berlawanan dengan istilah *maega siri'*, tetapi mempunyai konotasi yang sama. Yaitu *makurang siri'* (=bahsa Bugis) artinya, tidak punya *siri'*.

ad. d. *Toengka siri'na* (bahasa Bugis) artinya, orang yang memiliki *siri'*. Ini bisa juga bermakna; orang yang mempunyai keuletan terhadap suatu masalah. Misalnya, malu jika jadi orang miskin sehingga ia berupaya sedemikian rupa dengan segenap kemampuannya untuk menghindarkan diri dari kemelaratan. Penjelasan seperti ini dapat dilihat kembali Andi Zainal (1983: xv).

ad. e. *To de'gaga siri'na* (=bahasa Bugis) artinya, orang yang tidak mempunyai *siri'*. Sama maksudnya dengan ungkapan *mate siri'* seperti uraian di muka.

ad. f. *Tomappakasiri'-siri'* (=bahasa Bugis) artinya, orang yang mencoreng arang muka keluarganya dengan suatu perbuatan tercela.

ad. g. *Napakasiri'ki* (bahasa Bugis) artinya, membuat malu orang lain di hadapan orang lain pula. Misalnya mengemukakan kejelekan seseorang di depan orang lain.

Adapun istilah *matanre siri'* dan *mate siri'*,

penulis telah jelaskan di muka.

B. ISTILAH BUGIS MAKASSAR

Istilah Bugis-Makassar yang diantarai oleh tanda penghubung menunjukkan dua etnik yang berdomisili di Sulawesi Selatan. Penulis gunakan tanda penghubung di antara kedua kata tersebut menunjukkan, bahwa dalam penelitian hukum tentang budaya *siri'* ini ditujukan kepada dua etnik tersebut. Kadang kala pula penulis menggunakan tanda "koma", yang sesungguhnya maksud penulis adalah sama dengan penggunaan tanda "penghubung" di atas.

Di Sulawesi Selatan terdapat 4 (empat) etnik besar, yaitu Bugis, Makassar, Toraja, dan Mandar dengan dialek bahasa sebanyak lima; antara lain Bugis, Makassar, Toraja, Mandar dan Duri (Kuntjaraningrat, 1985: 260).

Menurut Mattulada (Kuntjaraningrat, 1985: 259), antara lain dikemukakan bahwa:

Kebudayaan Bugis-Makassar adalah kebudayaan dari suku bangsa Bugis-Makassar yang mendiami bagian terbesar dari jazirah selatan pulau Sulawesi. Jazirah itu merupakan suatu propinsi, ialah Propinsi Sulawesi Selatan, yang sekarang terdiri dari 23 kabupaten, di antaranya dua buah kotamadya. Penduduk sekitar 5.600.000 orang (ditahun 1969).

Orang Bugis mendiami kabupaten-kabupaten Bulukumba, Sinjai, Bone, Soppeng, Wajo, Sidenreng Rappang, Pinrang, Polewali-Mamasa, Enrekang, Luwu, Pare-Pare, Barru,

Pangkajene Kepulauan, dan Maros. Kedua kabupaten tersebut terakhir, merupakan daerah-daerah peralihan yang penduduknya pada umumnya mempergunakan baik bahasa Bugis maupun bahasa Makassar. Kabupaten Enrekang merupakan daerah peralihan Bugis-Toraja dan penduduknya sering dinamakan orang Duri (Massenrengpulu), mempunyai suatu dialek yang khusus ialah bahasa Duri.

Orang Makassar mendiami kabupaten-kabupaten Gowa, Takalar, Jeneponto, Bantaeng, Maros dan Pangkajene Kepulauan. Yang terakhir seperti tersebut di atas, merupakan daerah peralihan antara Bugis dan Makassar.

C. LANGKAH LANGKAH PREVENTIF

Kata *preventif* lawan kata dari *repressive*. Secara leksikal, *preventif* artinya pencegahan sedangkan *represif* artinya penindasan; penekanan (penanggulang-suatu kejahatan dengan cara menindas). Kedua kata ini berasal dari kata asing, yaitu *preventive* dan *repressive*.

Dalam pelanggaran hukum, untuk menghadapi suatu konflik pada lazimnya memang terdapat dua cara menanganinya, yaitu penyelesaian konflik secara formal melalui lembaga peradilan, dan penyelesaian konflik secara informal yaitu penyelesaian konflik di luar lembaga peradilan, seperti upaya damai dan lain-lain. Upaya-upaya seperti ini banyak dilakukan melalui pengacara, advokat. Kelebihan-kelebihan penyelesaian dengan upaya damai misalnya, prosesnya cepat dan biaya ringan dan tidak berbelit-belit. Kemudian dari-

pada itu kedua belah pihak tidak ada yang merasa dirugikan, karena penyelesaian berdasarkan kesepakatan bersama.

Berbeda dengan penyelesaian konflik secara formal atau penyelesaian melalui peradilan. Karena harus dilakukan secara prosedural sebagaimana yang diatur dalam hukum acara. Dalam bidang hukum pidana misalnya, harus memenuhi syarat-syarat hukum acara pidana. Umpamanya, melalui penyidikan, penyelidikan, pemeriksaan jaksa penuntut umum, lalu pemeriksaan di sidang pengadilan hingga kepada penjatuhan vonis dan pelaksanaan putusan. Itulah sebabnya dikatakan penyelesaian konflik secara formal.

Baik penyelesaian konflik secara formal maupun penyelesaian konflik secara informal, keduanya menunjukkan adanya sengketa (jika itu adalah perkara perdata) atau sudah ada tindak pidana (jika itu adalah perkara pidana). Langkah-langkah yang digunakan oleh aparat pelaksana hukum dalam menyelesaikan perkara seperti itulah disebut "*langkah-langkah represif*". Dan memang itulah cara yang terbaik menangani perkara-perkara hukum secara prosedural. Kebalikan daripada langkah-langkah itulah disebut langkah preventif atau penulis menyebutnya sebagai langkah *informal*.

Selain daripada itu, dikenal pula langkah-lang-

kah penyelesaian di luar persidangan. Langkah ini biasa disebut jalan damai. Langkah ini sekalipun dinyatakan bahwa langkah seperti itu adalah tidak secara prosedural, tetapi setelah terjadi kesepakatan antara pihak-pihak yang bertikai atau bersengketa, maka di saat itu pula secara tidak langsung mereka membuat prosedur tersendiri di luar sistem hukum acara. Namun demikian kesepakatan damai itu tetap punya hubungan integral dengan hukum acara.

Dalam Pasal 2 ayat (1) Konsep Rancangan KUHP yang dirumuskan oleh Lembaga Pembinaan Hukum Nasional menyebutkan, bahwa suatu pidana dikatakan efektif apabila:

a. dapat mencegah dilakukannya melakukan tindak pidana, b. dapat membimbing terpidana menjadi orang yang baik dan berguna, dan c. dapat menghilangkan noda-noda yang diakibatkan oleh tindak pidana (Muladi dan Barda Nawawi, 1992: 101).

Menurut Muladi dan Barda, dalam menanggapi rumusan di atas, maka diperlukan suatu indikator yang mudah dan dapat diukur untuk ketiga kriteria keberhasilan itu. Dalam konteks ini beliau menjelaskan sebagai berikut:

Apabila yang dimaksud dengan "mencegah" dalam tujuan pertama di atas mencakup pengertian mencegah agar si pembuat tidak melakukan lagi tindak pidana (prevensi spesial) dan "mencegah agar orang lain calon pembuat potensiil atau masyarakat pada umumnya tidak melakukan tindak pidana" (prevensi general), maka hemat kami tujuan prevensi spesial tercakup juga dalam tujuan yang kedua. Dengan membimbing terpidana menjadi orang yang baik dan berguna, jelas dimak-

sudkan agar ia tidak melakukan lagi tindak pidana (1992: 101).

Makna preventif seperti di atas itu, sebetulnya dilihat dari sisi normatif. Dan lebih khusus lagi dilihat dari sudut efektifitas pidana penjara. Bila dikaitkan dengan efektifitas pidana penjara, maka R. Hood dan R. Sparks, mengartikan privensi (*prevention*) itu sebagai *perbaikan si terpidana* (Barda Nawai, dalam makalah yang berjudul *Efektifitas Pidana Penjara*, yang disajikan pada Seminar Nasional Tentang Pemasyarakatan, tanggal 24 Juli 1995 di UII Yogyakarta).

Dalam makalah itu diuraikan, bahwa dilihat dari aspek perbaikan si pelaku, maka ukuran efektifitas terletak pada aspek "pencegahan khusus" (*special prevention*) dari pidana. Jadi ukurannya terletak pada seberapa jauh pidana penjara mempunyai pengaruh terhadap si pelaku/terpidana, yaitu aspek pencegahan awal (*deterent aspect*) dan aspek perbaikan (*reformative aspect*). Aspek yang pertama (*deterent aspect*) diukur dengan menggunakan indikator residivis, sedangkan aspek yang kedua yaitu aspek perbaikan si pelaku (*reformative aspect*) diukur dengan indikator yang berhubungan dengan masalah perubahan sikap dari terpidana. Permasalahan yang muncul dalam kerangka teori seperti di atas tidak dibahas dalam bagian ini.

Akan tetapi jika kita membawanya kepada

pendekatan fenomenologi mengenai langkah preventif tindak pidana, maka dalam kenyataan tidak seperti apa yang diperkirakan. Misalnya, dalam langkah-langkah preventif untuk menangani peristiwa-peristiwa hukum seperti tindak pidana pembunuhan yang berlatar belakang *siri'* adalah jauh lebih sulit. Kesulitannya menurut penulis, karena pada delik ini ibarat penyakit yang sangat membahayakan Yang diobati bukan orang yang sakit itu melainkan yang diobati adalah sumber penyebab penyakit. Bahkan di dalam Ilmu Kedokteran, untuk menangani menjalarnya penyakit yang berbahaya, ada yang disebut *penanggulangan secara amputasi*". Namun demikian, bagaimanapun amputasi dilakukan untuk mencegah menularnya penyakit tetapi kenyataannya si pasien sudah menjadi korban. Dikaitkan dengan sosialisasi budaya (hukum) *siri'* dalam rangka melakukan tindakan preventif untuk mencegah (mengurangi) terjadinya tindak pidana (kejahatan) bukanlah suatu hal yang gampang. Letak kesulitannya adalah, bahwa dalam melaksanakan langkah-langkah yang baik tidak ada satu format yang baku sebagaimana misalnya hukum acara. Tetapi kesulitan ini bukanlah suatu alasan bagi penulis untuk tidak melaksanakan penelitian ini. Kendatipun pada akhirnya penulis akan banyak meminta petunjuk dari semua pihak, khususnya kepada Gurunda Prof. Satjipto Raharjo.

D. PANDANGAN UMUM TENTANG DELIK

Kerangka teoretis yang terakhir ini pada dasarnya sudah banyak dikemukakan oleh para ahli hukum pidana. Sampai-sampai penggunaan istilah delik tersebut berpariasi. Misalnya, ada yang menggunakan istilah perbuatan pidana, peristiwa pidana, tindak pidana serta istilah delik. Namun bagi penulis tidak ada salahnya istilah-istilah itu dikenal dan diketahui terutama dalam rangka memperkaya perbendaharaan serta argumentasi hukum.

Di dalam KUHP dan Rancangan Kitab Undang Undang Hukum Pidana (Baru), tahun 1993 secara resmi digunakan istilah "tindak pidana". Pengertian tentang tindak pidana menurut Konsep KUHP Baru diatur dalam Pasal-pasal 14, 15, 16, 17 dan 18. Demikian juga pengertian tentang "waktu tindak pidana dilakukan" (Pasal 12) dan pengertian tentang "tempat terjadinya tindak pidana" (Pasal 13).

Penjelasan Pasal 14 berbunyi sebagai berikut:

Hukum pidana Indonesia didasarkan kepada perbuatan dan pembuatnya (*daad-dader-starfrecht*). Perbuatan dan pembuatnya menjadi dasar hukum pidana. Di atas dasar inilah dibangun asas legalitas dan asas kesalahan.

Dengan demikian maka tindak pidana dan pertanggungjawaban pidana memperoleh kontur yang jelas. Perumusan dimaksudkan sebagai pendahulu dari penentuan apakah yang disebut tindak pidana, yaitu baik perbuatan melakukan tidak melakukan perbuatan tertentu yang oleh peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana.

Barangsiapa dipanggil sebagai saksi, tetapi tidak datang, dan tidak datangnya itu bertentangan dengan hukum, merupakan contoh melakukan tindak pidana karena tidak melakukan perbuatan tertentu yang oleh peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai perbuatan yang dilarang. Membikin tidak terbaca atau merusak suatu pemberitahuan di muka umum yang dikeluarkan oleh penguasa yang berwenang atau berdasarkan peraturan perundang-undangan, merupakan contoh tindak pidana melakukan perbuatan tertentu (aktif).

Dengan perbuatan "tidak melakukan" (pasif) termasuk pula perbuatan lalai (*nalaten*) dalam rangka mencegah suatu akibat yang merupakan unsur atau bagian dari suatu tindak pidana....

Penjelasan Pasal 15 berbunyi:

Perbuatan yang dituduhkan harus dilarang dan diancam dengan pidana. Yang dimaksud dengan perbuatan yang dilarang selalu adalah perbuatan melakukan atau tidak melakukan sesuatu. Selain itu masih disyaratkan bahwa perbuatan tersebut bertentangan dengan hukum. Dengan kata-kata doktrin: perbuatan tersebut secara formal harus bertentangan dengan undang-undang dan secara materiil harus juga bertentangan dengan hukum.

Penjelasan Pasal 16 berbunyi:

Pembentuk undang-undang wajib dengan bijaksana merumuskan apa yang ditentukan sebagai tindak pidana. Perumusan itu harus selaras, sesuai, seimbang dengan perasaan hukum yang hidup dalam masyarakat. ...

Menurut hemat penulis, baik penjelasan Pasal 15 maupun Pasal 16 di atas keduanya sudah memperluas pengertian delik (tindak pidana) bukan hanya berdasarkan undang-undang secara formal, tetapi termasuk juga pelanggaran-pelanggaran hukum yang tidak tertulis yang biasa dikenal dengan istilah delik adat atau pidana adat. Tentang pengertian delik adat akan dikemukakan secara tersendiri.

Hampir semua ahli hukum pidana berpendapat bahwa pengertian tentang delik atau tindak pidana itu diambil dari pengertian *strafbaarfeit*, termasuk pembuat Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (Baru). Pembuat undang-undang kita menggunakan istilah "*strafbaar feit*" untuk mengidentikkan apa yang kita sebut "tindak pidana" di dalam Kitab Undang Undang Hukum Pidana. Padahal menurut Lamintang (1984: 172), pembuat undang-undang tidak memberikan penjelasan tentang apa yang dimaksud dengan *strafbaar feit*.

Lamintang (1984: 272) menyebutkan bahwa "perkataan *feit*" itu sendiri di dalam bahasa Belanda berarti 'sebagian dari suatu kenyataan' atau "*een gedeelte van de werkelijkheid*", "sedangkan *strafbaar*" berarti 'dapat dihukum'. Dengan demikian, menurut Lamintang bahwa *strafbaar feit* berarti "sebagian dari suatu kenyataan yang dapat dihukum". Menurutny pengartian ini tidak tepat dengan alasan bahwa yang dapat dihukum itu sebenarnya adalah manusia sebagai pribadi dan bukan kenyataan, perbuatan ataupun tindakan.

Menurut Hezwinkel-Suringa, misalnya, membuat suatu rumusan yang bersifat umum dari "*starfbaar feit*" sebagai suatu "perilaku manusia yang pada suatu saat tertentu telah ditolak dalam suatu pergaulan hidup dan dianggap sebagai perilaku yang harus diiadakan oleh hukum pidana dengan menggunakan sarana

sarana yang bersifat memaksa yang terdapat di dalamnya" (Lamintang, 1984: 172).

Prof. van Hemel merumuskan *starfbaar feit* itu sebagai "suatu serangan atau ancaman terhadap hak-hak orang lain" (Lamintang, 1984: 173)

Menurut Profesor Pompe, perkataan "*strafbaar feit*" secara teoretis dapat dirumuskan sebagai "suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap tertib hukum) yang dengan sengaja ataupun tidak dengan sengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku, di mana penja-tuhan hukuman terhadap pelaku tersebut adalah perlu demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya ke-pentingan umum" (Lamintang, 1984: 173).

Rumusan Pompe di atas mirip dengan rumusan tin-dak pidana sebagaimana yang dikemukakan di dalam Pasal 14 dan Pasal 15 Rancangan Kitab Undang Undang Hukum Pidana Baru Tahun 1993.

Menurut Andi Zainal Abidin (1987: 264-265) me-nyebutkan bahwa suatu delik untuk dapat memenuhi syarat pemidanaan maka diperlukan syarat obyektif dan syarat subyektif. Untuk jelasnya, Andi Zainal menge-mukakan sebagai berikut:

A. *Actus Reus (Delictum)*

PERBUATAN KRIMINAL - Syarat pemidanaan Obyektif.

- a. Unsur-unsur konstitutif sesuai delik (*bestanddelen*).
- b. Unsur-unsur diam-diam (*kenmerk elementen*); *Tatbestandszigeit*).

- ba. perbuatan aktif atau pasif (positif atau negatif).
- bb. melawan hukum obyektif atau subyektif.
- bc. tak ada dasar pembenar (*rechtsvaardigingsgrond, justification*).

B. *MENS REA* - Syarat pemidanaan subyektif.
PERTANGGUNGJAWABAN KRIMINAL

- a. kemampuan bertanggung jawab (*toerekeningver-
vaarheid*) C. SYARAT-SYARAT.
- b. kesalahan dalam arti luas PEMIDANAAN
(*Strafvoraussetzungen*)
 - ba. *dolus* (kesengajaan)
 - baa. sengaja sebagai niat (*oogrnek*)
 - bab. sengaja akan kepastian atau keharusan
(*zekerheidbewustzijn*)
 - bac. sengaja sadar akan kemungkinan (*dolus
eventualis, mogelijkheidsbewustzijn*)

$$A + B = C$$

(syarat obyektif + syarat subyektif) =
syarat pemidanaan.

Kalau *actus reus* menyangkut perbuatan yang melawan hukum (*unlawful act*), maka *mens rea* mencakup unsur-unsur pembuat delik, yaitu sikap batin, yang oleh pandangan monistis tentang delik disebut unsur subyektif suatu delik atau keadaan *psikis* pembuat ... (Andi Zainal, 1995: 51).

Suatu delik dapat diwujudkan dengan kelakuan aktif atau positif, sesuai dengan uraian delik yang mensyaratkannya, misalnya mencuri (pasal 362 KUUHPidana), menipu (pasal 378 KUUHPidana) dan lain-lain. Delik demikian dinamakan *delictum commissionis*. Ada juga ketentuan undang-undang yang mensyaratkan kelakuan pasif atau negatif, seperti misalnya pasal 164, 165, 224, 522, 523, 529, 631 KUUHPidana. Delik semacam ini terwujud dengan mengabaikan apa yang diperintahkan oleh undang-undang untuk dilakukan, yang dinamakan *delictum* atau *delicta ommissionis*. Di samping itu ada juga delik yang dapat diwujudkan dengan berbuat positif pada umumnya, tetapi dapat juga diwujudkan dengan berbuat negatif, yang dinamakan *delicta commissionis per ommissionem commissa*. Delik demikian antara lain diuraikan di dalam pasal 338-340 KUUHPidana, yaitu seorang ibu yang dengan sengaja menghilangkan nyawa anaknya dengan jalan tidak memberikannya makanan. Pasal 194 KUUHPidana juga mengandung delik

demikian, yaitu seorang penjaga pintu kereta api yang dengan sengaja tidak menutup pintu kereta api pada waktunya, yang menyebabkan terjadinya kecelakaan lalu lintas. Delik ini dapat juga terwujud dengan berbuat positif, yaitu barangsiapa yang memasang rintangan atau melepaskan paku-paku rel jalan kereta api atau trem yang menimbulkan bahaya lalu lintas umum (Andi Zainal, 1987: 265-266).

Kecenderungan Andi Zainal di dalam menguraikan pengertian tentang delik, ia tidak menggunakan istilah-istilah lain seperti peristiwa pidana, perbuatan pidana, atau tindak pidana. Tetapi ia tetap memakai istilah "delik". Meskipun demikian bukan berarti Andi Zainal tidak menghargai penggunaan istilah istilah yang lain itu. Nampaknya Andi Zainal tetap mengacu kepada sumber asli istilah delik, yaitu asas *nullum delictum*. Begitu berkembangnya peristilahan hukum tentang pengertian delik, tindak pidana, perbuatan pidana, dan atau peristiwa pidana ini di Indonesia sehingga bukan hanya mempengaruhi perbendaharaan istilah-istilah dalam hukum pidana tertulis tetapi juga terjadi perembesan istilah (infiltrasi) terhadap hukum tidak tertulis. Sehingga muncullah apa yang disebut delik adat, pidana adat atau adat pidana dan lain-lain sebagainya.

Dalam kaitannya dengan penelitian ini, maka pengertian tentang delik adat atau semacamnya penting sekali untuk diutarakan melalui beberapa pendapat.

Pengertian delik yang dikaitkan dengan pelanggaran-pelanggaran terhadap adat-istiadat, ada yang

mengartikan sebagai delik adat atau *adatdelictenrecht*. Dan dalam kaitannya dengan budaya *siri'*, para ahli hukum adat masih lebih menitikberatkan pengamatan mereka dari sudut pandang keberlakuan *siri'* sebagai bagian dari hukum adat delik Bugis-Makassar yang berkaitan dengan perbuatan penyerangan kehormatan (martabat) perempuan (Laica Marzuki, 1995: 44).

Istilah *adat delik* yang digunakan oleh Marzuki merupakan rujukan dari istilah *adat delictenrecht* yang digunakan oleh W.F. Lublink Weddik dalam disertasinya berjudul *Adatdelictenrecht in de Rapatmarga-rechtspraak van Palembang* [(1939). B. Ter Haar (1939, 1950: 218) menggunakan istilah *delictenrecht*. R. Soepomo (1963: 90-108) menggunakan istilah hukum adat delik. van Vollenhoven (1936) cenderung menggunakan istilah *adatstrafrecht* (Marzuki, 1995: 45)].

Menurut Soerjono Soekanto (Marzuki, 1995: 45):

"tidak menyetujui penggunaan istilah hukum adat delik, hukum adat pidana dan semacamnya, karena baginya cakupan dari suatu perbuatan tercela menurut hukum adat merupakan pula penyelewengan di bidang hukum tantra adat serta hukum perdata adat. Soerjono Soekanto menggunakan istilah *hukum penyelewengan adat*. Laica Marzuki menilai, bahwa cakupan dari istilah *hukum penyelewengan adat* yang digunakan Soerjono Soekanto adalah bermakna luas, sedangkan sifat perbuatan tercela yang diamati masih dalam batas *strafbaarheid*, lagi pula akibat hukum daripadanya adalah tetap *strafrechtsgevolg*.

Menurut Marzuki (1995: 45), pengamatan hukum sedemikian (*siri'* sebagai bagian hukum adat delik, pen.) amat dipengaruhi oleh pelbagai putusan hakim-hakim pengadilan adat (*'adat-vonnissen van inheemsche rechtbanken'*) serta

landraad di Sulawesi Selatan yang pada umumnya memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara-perkara penganiayaan, pembunuhan yang disebabkan oleh hal zinah (*mukah, overspel*), *silariang* (*scheking met toestemming van de vrouw*), *mallariang*, *nialle magassing* (*scheking tegen den zin van de vrouw*), perzinahan antara hubungan sedarah (*sapa' ri tana, salimara', bloedschande*), dan lain-lain.

R. Soepomo (1903-1958), seorang nestor hukum mengemukakan catatan tentang *silariang* dalam bukunya *Bab-Bab Tentang Hukum Adat*, di bagian bab *Hukum Adat Delik* (1963: 103-104) (Laica Marzuki, 1995: 46-47) berikut ini:

Membawa lari orang perempuan (*schaking*) merupakan delik yang di Sulawesi Selatan (masyarakat Bugis dan Makassar) disebutkan *silariang* dan dianggap delik yang sangat berat.

Pada zaman dahulu, lebih dari lima puluh persen dari jumlah pembunuhan yang sering terjadi di daerah tersebut adalah disebabkan oleh perbuatan melarikan gadis. Keluarga si gadis mendapat malu (*tumasiri'*) oleh perbuatan si lelaki dan mereka berkewajiban membunuh orang yang bersalah tersebut (*tumanyalla*).

Hanya apabila si lelaki serta si gadis yang dilarikan mencari perlindungan di istana raja, di rumah kepala kampung atau di rumah seorang imam (setelah si lelaki memeluk agama islam), maka keluarga si gadis tidak boleh membunuh lelaki yang bersalah. Kepala kampung atau imam dalam hal ini mencari ikhtiar untuk mendamaikan keluarga si gadis dengan pihak si lelaki. Apabila perdamaian dapat tercapai maka si gadis dapat dikawinkan dengan lelaki itu, dan si lelaki selain wajib membayar antaran (*sunrang*), juga harus membayar denda (*pappasala*) kepada keluarga si gadis.

Memang harus diakui bahwa asas-asas hukum adat

pidana sebagai hukum tidak tertulis tidak begitu banyak mendapat tempat di dalam hukum pidana tertulis yang sudah terkodifikasikan. Tetapi harus pula diakui bahwa Asas-asas Hukum Adat Pidana, terdapat delik-delik tertentu justru berlaku di daerah-daerah tertentu pula, terutama di daerah-daerah bekas Swapraja dan daerah kekuasaan peradilan adat Gorontalo (Andi Zainal, 1995: 76).

Menurut Andi Zainal (1995: 76), ada dua alasan berlakunya hukum adat pidana di Indonesia yaitu:

- a. Tanpa adanya pemahaman Asas-asas Hukum Adat Pidana tak mungkin dapat diketahui makna delik menurut Hukum Adat Pidana yang masih diakui berlakunya di daerah-daerah bekas Swapraja dan Pengadilan asli di Gorontalo oleh Undang-Undang Darurat Tahun 1951 No. 1 (LN. 1951 No. 9). dan
- b. Untuk pembentukan KUHP Nasional baru. Hukum Adat Pidana dapat memberikan bahan-bahan yang dianggap perlu sesuai dengan Pasal 32 UUD 1945 dan GBHN 1983.

Apa yang dikemukakan oleh Andi Zainal di atas nampaknya sangat beralasan. Terbukti misalnya, Rumusan Rancangan KUHP Nasional yang baru (tahun 1993), di mana hukum tidak tertulis mendapat tempat sama dengan hukum pidana yang tertulis. Asas berlakunya hukum pidana adat di dalam Konsep KUHP Baru disebut "asas pengecualian", yakni suatu perbuatan yang menurut hukum yang hidup harus dianggap sebagai tindak pidana. Inilah pengecualian dari asas yang menyatakan bahwa "perbuatan hanya merupakan tindak

pidana apabila ditentukan demikian oleh atau didasarkan pada undang-undang. Hal ini dapat dilihat dalam penjelasan Pasal 1 ayat (3), Pasal 16.

Di Sulawesi Selatan, masyarakat mendasarkan adat pidana itu pada dua dasar, yaitu:

- a. *Lontara* (peraturan-peraturan Hukum Adat Pidana yang berlaku sejak abad ke-XV, termasuk pemahanan tentang hukum asli dahulu kala. (Himpunan peraturan-peraturan Adat di pelbagai bidang, antara lain sejarah, hukum adat, yang ditulis di atas kertas dengan aksara Bugis, dihimpun oleh La Sangaji Puanna La Sengngeng, atas perintah La Mappajung Puanna Salawong, Arung Matoa Wajo pada tahun 1764-1767).
- b. *latoa*, yang disusun setelah orang-orang Sulawesi Selatan memeluk agama islam ... Kumpulan aturan-aturan adat Kerajaan Bone yang juga diakui di kerajaan-kerajaan lain (Andi Zainal, 1987: 99, 1995: 77- 86, 1983: 104).

Sedangkan dasar formalnya adalah Undang-undang Darurat No. 1 Tahun 1951 Pasal 5.

Penulis-penulis lain yang juga mendasarkan pandangannya (tentang delik adat) pada kedua sumber di atas antara lain, Laica Marzuki, 1995: 38-45), Hamid Abdullah, 1985: 15-31), A.Mattulada dan lain-lain.

Menurut Hadikusuma (1984: 17) menyebutkan bahwa:

"Istilah hukum pidana adat yaitu terjemahan dari istilah Belanda "adat delicten recht" atau "hukum pelanggaran adat". Istilah-istilah ini tidak dikenal di dalam masyarakat adat. Masyarakat adat misalnya hanya memakai kata-kata "salah" (Lampung), atau "sumbang" (Sumatra Selatan) untuk menyatakan perbuatan yang bertentangan dengan hukum adat. Hadikusuma mencontohkan, suatu perbuatan dikatakan "sumbang kecil" apabila ia merupakan pelanggaran yang berakibat merugikan seseorang atau beberapa orang (sekeluarga, sekerabat), dan dikatakan "sumbang besar" apabila peris-

tiwa atau perbuatan itu merupakan kejahatan yang berakibat merugikan dan mengganggu keseimbangan masyarakat seluruhnya.

Jadi pengertian pidana adat menurut Hadikusuma, terdiri dari dua bagian yaitu ada yang disebut "sumbang kecil" dan ada yang disebut "sumbang besar" penegasan mana agak terasa janggal, karena sifatnya "mengeneralisasai". Terutama sekali jika dikatakan bahwa "hukum pelanggaran adat" tidak dikenal di kalangan masyarakat adat. Menurut hemat penulis, justru kalangan masyarakat adatlah yang sangat mengenal *hukum pelanggaran adat* tersebut. Inilah yang dimaksudkan oleh Andi Zainal (1987: 98), "kelemahan pengamatan pengamat hukum adat". Demikian pula halnya bahwa "*adat delicten recht*" sebagai istilah Belanda. Karena istilah tersebut bukan sepenuhnya istilah Belanda melainkan terdapat pula istilah Indonesia, yaitu "istilah adat". Demikian juga halnya dengan pembagian "sumbang kecil" dan "sumbang besar". Hemat penulis, tidak semua ke-salah-an yang jika hanya ter-tuju kepada seseorang atau keluarga, lalu hal itu di- anggap sebagai ke-salah-an kecil. Dapat saja suatu kesalahan yang walau hanya tertuju kepada seorang saja tetapi sifatnya sangat prinsip bagi keluarga si korban maka itupun dapat dikategorikan sebagai suatu kesalahan besar. Misalnya *siri* (Bugis-Makassar), *wirang* (suku bangsa Jawa) sebagai *human dignity*-nya.

E. DELIK PEMBUNUHAN

Delik pembunuhan dikenal pula dalam KUHP dengan istilah *kejahatan terhadap nyawa orang*. Diatur dalam Pasal-pasal 338 sampai dengan 350 KUHP.

Menurut estimasi penulis, delik pembunuhan dapat digolongkan ke dalam tiga bagian:

1. Pembunuhan sebagai *dolus* yang meliputi:

- a. pembunuhan biasa yang dikenal dengan istilah *doodslag*, diatur dalam Pasal 338;
- b. pembunuhan berencana atau pembunuhan yang direncanakan terlebih dahulu (*moord*), diatur di dalam Pasal 340, oleh R. Soesilo (1984) memakai istilah *met voorbedachte rade*. Andi Zainal (1983) menyebutnya sebagai *dolus premeditatus* (sengaja yang direnakan untuk melakukan suatu pembunuhan).
- c. pembunuhan biasa terhadap anak yang diatur di dalam Pasal 341, dan dikenal dengan istilah *kinderdoodslag*;
- d. pembunuhan terhadap anak secara berencana (*kindermoord*).

2. Pembunuhan dengan secara *culpa*.

Yang dimaksudkan oleh penulis pembunuhan secara culpa di sini ialah unsur utama dari suatu perbuatan pidana tetap ada, seperti *sengaja* dan *seterusnya*. Namun kematian orang lain bukanlah tujuan

dari tindak pidananya. Pembunuhan secara *culpa* ini meliputi:

- a. pembunuhan yang semula hanya ditujukan untuk menganiaya, seperti yang diatur dalam Pasal 351 ayat (3) KUHP. Mungkin orang lain menilai, bahwa Pasal 351 tidak dapat digolongkan sebagai bentuk kelalaian. Namun penulis menilainya lain. Memang dalam delik penganiayaannya bukan merupakan kelalaian (*culpa*), tetapi aspek delik pembunuhannya tetap merupakan kelalaian, karena matinya korban bukan merupakan tujuan.
 - b. pembunuhan karena *culpa* murni, misalnya meninggal karena kecelakaan lalu lintas (tabrakan).
3. Pembunuhan yang tidak termasuk kategori *dolus* sebagaimana pidana umum dan juga tidak tergolong sebagai *culpa*. Misalnya, *eutanasia*. Eutanasia adalah mengakhiri kehidupan seorang pasien dengan kematian yang dilakukan dengan sengaja atas permintaan si pasien sendiri. Walaupun mungkin di dunia ini baru satu negara yang memberlakukan undang-undang tentang eutanasia, yaitu *Northern Territory Australia*. Dan orang yang pertama kali memanfaatkan undang-undang yang masih kontroversial itu, adalah Bob Dent (66) tahun, seorang pasien kanker prostat (demikian suara BDC London, 27 September 1996). Kompas memuatnya pada tanggal 28 September 1996 dengan judul *Pelaksanaan Undang-undang*

Eutanasia Menyulut Kontroversi".

Pada perinsipnya, Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP), pembunuhan itu atau kejahatan terhadap nyawa orang, adalah dilarang. Namun kenyataannya, hukum mengharuskan pula orang tertentu harus dibunuh. Penulis gunakan istilah hukum, karena pada nyatanya atas dasar yuridis normatif, orang tertentu itu harus dibunuh, demikian pula secara yuridis sosiologis. Yang penulis maksudkan dasar yuridis normatif mengharuskan orang tertentu harus dibunuh adalah Undang-undang Tindak Pidana Subversif. Sedangkan dasar yang kedua, yaitu dasar yuridis sosiologis yakni suatu pembunuhan yang dilakukan atas dasar alasan pembeda. Misalnya, delik Adat Pidana berdasarkan siri' (Andi Zainal, 1983).

Berdasarkan uraian-uraian di atas, maka di sini penulis tidak akan menelorkan suatu definisi tentang apa yang dimaksud dengan delik pembunuhan. Karena apabila kita merumuskan suatu definisi berdasarkan undang-undang hukum pidana, maka sudah pasti bertentangan dengan undang-undang lainnya. Paling tidak definisi itu tidak dapat digeneralisir. Sebab di satu sisi, ada aturan hukum yang melarang sama sekali orang melakukan pembunuhan, dan pada sisi lain ada pula aturan hukum yang mengharuskan dan membolehkan orang tertentu harus dibunuh. Bukan berarti definisi

di sini tidak penting.

F. PENCEMARAN NAMA BAIK ORANG LAIN

Di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, pencemaran nama baik orang lain biasa juga disebut dengan "Penghinaan". Penghinaan ini diatur dalam Buku II, Bab XVI, yang meliputi Pasal 310 sampai dengan Pasal 321 KUUHP.

Terdapat beberapa istilah yang digunakan dalam Undang-Undang Hukum Pidana berkenaan dengan penghinaan atau pencemaran nama baik orang lain. Misalnya, *menista* atau *smaad*, *menista* secara tulisan atau *smaadschrift*, *mempitnah*, *menghina* yang tidak sama dengan *menista*, *menuduh* dalam arti *memfitnah*.

Terdapat juga bentuk-bentuk pencemaran nama baik orang lain yang tidak tergolong ke dalam pasal-pasal seperti tersebut di atas. Bentuk-bentuk pencemaran itu antara lain seperti yang diatur di dalam Pasal 330, dan 332. Pasal-pasal ini sebenarnya menyangkut Kejahatan Terhadap Kemerdekaan Orang. Tetapi pada sisi lain dapat digolongkan sebagai bentuk pencemaran nama baik orang lain. Pasal 330 dan 332 KUHP ini jika di dalam Hukum Adat Pidana Siri', maka sering berbuntut dengan pertumpahan darah. Dalam adat siri' dikenal dengan *mallariang* atau *silariang*

Pasal 310 (1) KUHP berbunyi sebagai berikut:

Barangsiapa sengaja menyerang *kehormatan* atau *nama baik seseorang*, dengan menuduh sesuatu hal, yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum, diancam, karena pencemaran, dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau denda paling banyak tiga ratus rupiah.

Menyimak tentang delik penghinaan ini, intinya tertuju pada dua masalah pokok, yaitu *kehormatan*, dan pencemaran nama baik. Kedua kalimat ini memang dapat mempunyai nuansa makna yang berbeda. Menurut hemat penulis, istilah *kehormatan* agaknya lebih sensitif dibandingkan dengan istilah *pencemaran nama baik*, kendatipun tidak selamanya demikian. Demikian juga bahwa pencemaran nama baik itu tidak lebih penting daripada *kehormatan*. Tergantung peletakan kedua istilah itu terhadap obyek tindak pidananya. Jadi bukanlah istilahnya yang terpenting, tetapi justru obyek tindak pidana-lah yang menentukan penting tidaknya suatu istilah.

Dalam hukum lingkungan, istilah "pencemaran" dapat diartikan sama dengan "pengrusakan". Penjelasan seperti ini dapat dilihat dalam penjelasan Prof. Hadiati Hermien Koeswaji, dalam judul *Integritas Moral Penegak Hukum Lingkungan Masih Lemah* (Kompas 9 Januari 1997). Sesuatu yang dirusak, maka konsekwensinya adalah harus mendapat perbaikan. Dalam KUHP disebut pemulihan.

Kembali kepada istilah pencemaran. Pencemaran asal kata dari "cemar" yang berarti pula "noda". Mencemari berarti "menodai" yang dalam kamus bahasa Inggris disebut *dirty, soiled, filthy, cast espersion* dll, yang bermakna *penodaan*. Bilamana pencemaran diartikan *dirty* dalam bahasa Inggris itu berarti *kotor*. Kotor artinya sesuatu yang tadinya bersih lalu terkontaminasi dengan benda luar yang tidak bersih. Berikutnya, bila pencemaran disamaartikan dengan *filthy* maka pencemaran berarti *cabul* atau *mesum*. Agaknya istilah-istilah di atas dapat berkenaan dengan apa yang disebut "pencemaran". Apakah itu kotor, penodaan, terlebih lagi jika pencemaran diartikan dengan cabul atau mesum.

Pencemaran dalam arti pengrusakan sebagaimana yang disinonimkan dalam hukum lingkungan, juga dapat bermakna "sesuatu yang sebelumnya baik lalu dirusak". Dengan demikian pengertian pencemaran dari beberapa istilah termasuk istilah-istilah dalam bahasa Inggris dapat bersesuaian dengan istilah-istilah yang ada dalam bahasa Indonesia. Kedua macam istilah dari dua bahasa tersebut, ternyata mempunyai kesamaan arti yang dapat bersesuaian. Bahkan istilah *filthy* lebih mendekati kepada apa yang dimaksud dengan pencemaran dalam pokok bahasan penelitian hukum ini.

Pencemaran menurut pandangan budaya hukum *siri'* mungkin agak lebih luas daripada pencemaran nama baik

orang lain menurut KUHP. Karena di dalam budaya *siri* pencemaran nama baik dapat meliputi mulai dari hal-hal yang sangat sepele, sampai kepada hal-hal yang sangat prinsip. Misalnya, membawa lari anak orang lain dapat disebut "mencoreng arang dimuka orang lain". Jadi indikator pencemaran nama baik menurut budaya *siri* adalah semua bentuk perilaku yang jelek yang berkaitan dengan harga diri, dapat dinyatakan *pencemaran*. Padahal dalam KUHP tidaklah demikian halnya.

Dalam KUHP, pencemaran nama baik orang lain diatur dalam pasal 134, 310, 311, 314 dan seterusnya. Dalam Pasal 311 misalnya disebutkan bahwa:

Barangsiapa sengaja menyerang kehormatan atau nama baik orang lain, dengan menuduh sesuatu hal, yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum, diancam karena pencemaran, dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau denda paling banyak tiga ratus rupiah.

Jadi batas-batasnya pun sangat jelas.

G. ADAT DELIK

Sebelum mengemukakan apa dan bagaimana pengertian delik adat, ada baiknya penulis kemukakan terlebih dahulu pengertian hukum adat secara umum. Karena sekalipun sudah banyak dikemukakan oleh para pakar, tetapi secara induktif sangat penting artinya dikemukakan dalam uraian ini.

Dalam kenyataannya sudah banyak definisi-definisi

yang pernah dikemukakan oleh para ahli hukum khususnya pakar hukum adat. Bertitik tolak dari definisi-definisi itulah Prof. Satjipto Rahardjo (1977: 185) mengungkapkan beberapa karakteristik hukum adat antara lain:

- (1) hukum yang tidak dibuat dengan sengaja;
- (2) hukum yang memperlihatkan aspek-aspek kerohanian yang baik;
- (3) hukum yang berhubungan erat dengan dasar-dasar dan susunan masyarakat setempat.

Lebih jauh daripada itu, Prof. Satjipto juga menguraikan pengertian hukum adat dalam kaitan dengan antropologi, hal mana beliau merujuk kepada apa yang dirumuskan oleh *Llewellyn* sebagai berikut:

Untuk meminjam pengertian dalam antropologi hukum maka hukum adat telah memenuhi fungsi idiologis dari hukum, yaitu membuat aturan-aturannya diraskan anggota masyarakat sebagai aturan yang sesuai (*proper*) untuk menyalurkan dan mengontrol tingkah laku anggota masyarakatnya.

Selain daripada itu dikenal pula istilah "hukum yang hidup dan terpelihara dalam masyarakat" (*living law*), hukum yang senyatanya dan lain-lain. Sedangkan menurut jenisnya, maka hukum adat ada yang disebut hukum adat di bidang keperdatan, hukum adat di bidang kewarisan, dan hukum adat di bidang hukum pidana. Yang terakhir inilah yang menjadi sub-uraian dalam penelitian tesis ini.

Istilah delik adat terdapat beberapa macam atau variasi yang digunakan para penulis. Misalnya, ada yang menggunakan istilah pidana adat, adat pidana, delik adat dan lain-lain. Bahkan ada yang berpendapat bahwa istilah pidana adat berasal dari istilah Belanda "*adat delicten recht*" (Hadikusuma, 1984: 17). Alasan-alasan penggunaan istilah itu pun bervariasi. Sebabnya menurut I.G.N. Sugangga, istilah tentang pidana adat tidak ada penggunaan yang bersifat baku. Ketika penulis menemui Sugangga, dosen Fakultas Hukum Undip pada tanggal 18 Mei 1997, ia berprinsip menggunakan istilah hukum pidana adat. Alasannya, karena hukum pidana sebagai titik fokus.

Berbeda dengan pandangan Prof. Barda Nawawi, Guru Besar Fakultas Hukum Undip, cenderung menggunakan istilah *Hukum Adat Pidana*. Alasannya, bahwa hukum adat tidak membedakan antara semua jenis cabang hukum yang melekat padanya. Jenis-jenis cabang hukum itu adalah hukum tata negara, hukum perdata, hukum pidana, hukum administrasi dan lain-lain. Jadi hukum adat tetap sebagai "induk" dari semua jenis cabang hukum itu. Dengan demikian selamanya cabang hukumlah yang selalu mengekor pada induk. Disebutlah dia "*Hukum Adat Pidana*". Demikian Barda Nawawi ketika penulis meminta pandangannya pada tanggal 21 Mei 1997 di Fakultas Hukum Undip Semarang. Pandangan Barda Nawawi ini mirip dengan

Pandangan Prof. Andi Zainal Abidin (1997: 97, 1995: 76).

Persoalan penggunaan istilah adat pidana, atau pidana adat menurut hemat penulis semuanya baik. Tergantung dari sudut yang bagaimana yang akan digunakan. Bagi penulis sendiri cenderung menggunakan istilah *adat delik*. Karena istilah *delik* adalah merupakan awal dari istilah pidana, sekaligus dikenal secara umum dan universal dalam asas *nullum delictum*.

Kecuali pandangan yang menyatakan bahwa istilah *adat delicten recht* merupakan murni istilah Belanda, agaknya penulis kurang setuju. Karena istilah *adat delicten recht* memakai istilah tambahan istilah Indonesia, yaitu kata "*adat*", istilah mana merupakan bahasa Indonesia yang dikompersi dari bahasa Arab (*'adat*). Nyatalah bahwa istilah *adat delicten recht* adalah istilah campuran.

Dalam laporan Simposium Pembaharuan Hukum Pidana Nasional 1980 angkatan II, menggunakan istilah hukum pidana adat (Barda Nawawi, dalam makalahnya berjudul *Permasalahan Hukum Adat dalam Pembangunan Hukum di Indonsia, 1994*) yang disampaikan pada ceramah ilmiah di Fakultas Hukum UNDIP. Bagi etnis Bugis-Makassar, pelanggaran terhadap nilai-nilai budaya *siri'*, adalah termasuk adat *delik*.

Berdasarkan pada kerangka teoretis di atas, maka untuk merumuskan variabel hukum budaya *siri'* dalam langkah prevensi atas perbuatan pidana (delik) yang berprikemanusiaan, sudah tentu ditemukan terlebih dahulu letak budaya *siri'* dalam konteks prikemanusiaan itu. Karena budaya (hukum) *siri'* sendiri adalah sesuatu yang ber-prikemanusiaan. Pengertian prikemanusiaan bersumber pada butir-butir Sila Kemanusiaan yang adil dan beradab, sebagaimana yang dirumuskan di dalam TAP MPR Nomor II/MPR/1978. Sehingga semua masalah pokok di dalam *budaya siri'* dalam kaitan dengan perbuatan pidana (delik) seperti perilaku sosial Bugis-Makassar, sifat melawan hukum suatu perbuatan, adanya kesalahan, dan pidana) perlu diperhadapkan ke dalam nilai-nilai yang ada dalam butir-butir prikemanusiaan yang dimaksud.

Menurut Muladi (1992: 8), antara lain disebutkan bahwa: "Penghayatan terhadap butir-butir berupa pengakuan persamaan derajat, persamaan hak dan persamaan kewajiban antara sesama manusia, saling mencintai sesama manusia, semena-mena terhadap orang lain, menjunjung tinggi nilai kemanusiaan, mengharuskan kita untuk mengutamakan tindakan pencegahan daripada tindakan represif dan menempatkan faktor-faktor yang berkaitan dengan si pelaku tindak pidana dalam kedudukan yang penting di samping

faktor-faktor yang berkaitan dengan kedudukannya.

Bertitik tolak dari uraian di atas maka dapat diketahui bahwa ternyata ada beberapa faktor yang mempengaruhi sosialisasi budaya *SIRI'* dalam langkah-langkah preventif suatu peristiwa pidana (delik), yaitu:

- faktor penekanan budaya *siri'* sebagai suatu pranata susila sosial Bugis-Makassar.
- faktor yang mengacu kepada indikator-indikator eksternal dan internal. Indikator eksternal seperti kewajiban antara sesama manusia, serta mengutamakan tindakan-tindakan pencegahan daripada tindakan-tindakan represif. Sedangkan indikator internal, seperti menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan (harkat dan martabat) dan semacamnya.
- faktor penegakan (sosialisasi) budaya *siri'*.
- faktor perangkat hukum.

Tentu saja ada pula beberapa faktor lain yang mempengaruhi keberhasilan budaya (hukum) *siri'* dalam menekan terjadinya suatu delik. Hal ini dapat terjadi karena budaya *siri'* pada hakekatnya bukan hanya dimiliki oleh suku bangsa Bugis-Makassar, tetapi juga oleh suku-suku bangsa lain di seluruh nusantara ini. Misalnya, *Wirang* bagi suku bangsa Jawa, *Jingga* bagi suku bangsa Bali, *Pantang* di Sumatera dan lain-lain.

Akan tetapi, pada sisi lain terdapat pula

peluang-peluang kegagalan, mengingat budaya *siri'* kadang-kala ditafsirkan secara berlebihan, sehingga terjadi penerapan yang tak proporsional. Jadi kembali kepada faktor individu.

Mengingat betapa luasnya kaitan budaya *siri'* dengan kehidupan sosial lainnya, maka dalam penelitian hukum ini penulis akan membatasi diri pada sosialisasi budaya *siri* dalam upaya preventif untuk menekan angka kejadian peristiwa pidana. Sedangkan yang berkaitan dengan sistem pemidanaan menurut hukum pidana materiel tidak ditelusuri secara mendalam.

Jika sikap atau cara pandang penekanan budaya *siri'* ditempatkan sebagai variabel non-hukum, maka indikator-indikator eksternal dan internal, faktor penegakan budaya *siri'*, serta faktor perangkat hukum merupakan variabel hukum. Karena secara empirik keterlibatan faktor yang terdiri dari sikap dan cara pandang penekanan budaya *siri'* sebagai suatu pranata susila sosial, hal mana dapat dijadikan pembatas. Artinya, variabel non-hukum tersebut dalam konteks relevansi budaya *siri'* dengan langkah-langkah preventif suatu perbuatan pidana dapat dirumuskan sebagai faktor yang mempengaruhi. Oleh sebab itu proporsinya sebagai variabel antara.

Dalam konteks yang lebih ideal, antara budaya

siri' dan perilaku sosio-kultur Bugis-Makassar keduanya perlu disatukan dalam satu titik taut. Karena dengan cara yang demikian itu maka budaya *siri'* diharapkan dapat mempengaruhi perilaku sosio-kultur sebagai perilaku susila sosial masyarakat untuk menekan terjadinya tindak pidana. Dengan metode seperti ini maka budaya hukum dan sistem sosial lainnya dapat dioperasionalkan. Jadi faktor yang satu dengan faktor yang lain menunjukkan sikap integral.

Dalam penelitian ini penulis menggunakan dua variabel utama, yaitu variabel pengaruh (*independent variable*), variabel yang dipengaruhi (*dependent variable*). Hubungan antar keduanya merupakan hubungan siklus. Artinya, antara variabel yang satu dengan yang lain tidak dapat dipisah-pisahkan. Saling pengaruh mempengaruhi.

Selain daripada itu terdapat suatu variabel lain yang disebut dengan variabel antara (*intervening variable*). Variabel antara ini sipatnya *perekat* terhadap jalinan hubungan antara variabel independen dan variabel dependen. Untuk singkatnya dapat dilihat dalam bentuk kolom dan jalur di bawah ini:

Variabel yang mempengaruhi (A)	Variabel antara (B)	Variabel dipengaruhi (C)
	1.faktor sikap atau cara pandang pen- akan budaya <i>siri'</i> sebagai suatu pra- nata susila sosial	

Budaya (hukum) <i>siri'</i>	2.faktor penegakan (sosialisasi) bu- daya <i>siri'</i> .	Perilaku sosio-kul- tur Bugis- Makassar
	3.faktor yang meng- acu kepada indika- tor eksternal dan internal	yang meng- hindari de- lik atas dasar <i>siri'</i>
	4.faktor perangkat hukum.	

Dalam struktur kolom dan jalur di atas maka dalam pe-
nelitian ini variabel-variabel tersebut diketahui:

- (A) Budaya (hukum) *siri'* sebagai variabel yang berpe-
ngaruh (*independent variable*).
- (A) Sikap dan cara pandang penekanan budaya *siri'*
sebagai suatu pranata susila sosial sosio-kultur
sebagai variabel antara (*intervening variable*).
- (C) Perilaku sosio-kultur Bugis-Makassar yang meng-
hindari perbuatan-perbuatan pidana karena *siri'*.

BAB III

OBJEK DAN METODE PENELITIAN

A. METODE PENDEKATAN

Penelitian ini digunakan pendekatan yuridis sosiologis. Pendekatan yuridis dimaksudkan untuk mengkaji aspek-aspek hukum budaya *siri'* yang ada. Aspek-aspek hukum budaya *siri'* yang dimaksud adalah budaya *siri'* dikaitkan dengan tindak pidana pembunuhan dan pencemaran nama baik orang lain. Sedangkan kajian dari sudut sosiologisnya digunakan karena untuk mengkaji aspek aspek budaya *siri'* apa yang senyatanya yang terjadi di dalam masyarakat Bugis-Makassar.

Adapun keterkaitan faktor-faktor penentu keberhasilan budaya hukum (*siri'*) untuk mengurangi angka terjadinya perbuatan pidana, penulis cenderung menggunakan pendekatan sosiologi hukum secara empirik. Namun tidak mengabaikan pendekatan-pendekatan normatif dan historis. Hal ini dimaksudkan untuk memperoleh keseimbangan informasi yang lebih obyektif. Pendekatan sosiologi hukum yang dikaitkan dengan hukum pidana dalam penelitian ini sangat ditentukan oleh aplikasi norma-norma budaya *siri'*, yang tergantung tidak hanya pada variabel variabel hukum, tetapi juga pada variabel non-hukum seperti kondisi daerah dan kondisi individu dan masyarakat.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif, di samping itu tidak pula mengabaikan metode kuantitatif sebagai alat perbandingan. Hal ini dimaksudkan untuk menguji tingkat akurasi dan validitas dari suatu data berupa fakta-fakta yang diperoleh baik melalui observasi, wawancara, kuisioner dan pengamatan secara langsung.

Metode kualitatif yang penulis maksudkan adalah mendeskripsikan atau melukiskan permasalahan-permasalahan tersebut melalui pendekatan yuridis sosiologis, baik normatif maupun secara empirik. Normatif itu sendiri terdiri dari normatif yang formal dan normatif yang materiil, sedangkan secara empirik lebih mendekati kepada fenomenologi antropologik. Artinya penulis mendeskripsikan tentang apa yang menjadi pokok pembahasan, yakni upaya-upaya prevensi menurut budaya *siri'* dalam rangka menekan terjadinya delik melalui sekumpulan data dan fakta yang telah diperoleh. Misalnya, data kepustakaan serta analisis-analisis historis nilai-nilai budaya *siri'*, perilaku budaya *siri'* yang sudah dan masih mempola selama ini.

Dengan demikian spesifikasi penelitian ini adalah deskriptif infarensial, yaitu penulis mencoba memaparkan hubungan antara variabel yang satu dengan variabel yang lainnya untuk mengetahui perkembangan terjadinya suatu fenomena sosial tertentu (Sangaribun dan Effendi,

1982: 4). Fenomena sosial yang dimaksud adalah budaya hukum *siri'* Bugis-Makassar dikaitkan dengan hukum pidana. Hal ini dapat dilihat pada tabel-tabel frekuensi Bab IV.

B. METODE PENGUMPULAN DATA

Dalam penelitian ini lebih difokuskan pada penelitian kualitatif. Pekerjaan pengumpulan data langsung diikuti dengan pekerjaan menuliskan, mengedit, meklasifikasi, mereduksi dan menyajikan (Noeng Muhajir, 1996: 30). Hal ini dimaksudkan untuk menghindari situasi atau konteks yang tidak terekam ataupun lupa akan penghayatan situasinya. Sebab bila ini terjadi maka hasil penelitian berubah menjadi fragmen-fragmen yang tak berarti. Sekalipun subyek peneliti dan subyek responden harus tetap dijaga.

Yang dimaksud dengan menyajikan dalam penelitian ini adalah persentase data hasil penelitian lapangan yang dilakukan oleh penulis pada tanggal 26 February 1997 bertempat di Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia Ujung Pandang, yang dihadiri sekitar 20 dosen.

Dalam kaitannya dengan penelitian kepustakaan, maka asas-asas, konsepsi-konsepsi, pandangan-pandangan, doktrin-doktrin hukum serta isi kaedah-kaedah hukum (termasuk hukum yang tadak tertulis) diperoleh dari dua macam referensi utama, yaitu yang bersifat umum, seper-

ti buku-buku teks, ensiklopedia atau kamus dan review. Sementara yang bersifat khusus seperti laporan penelitian, periodikal seperti majalah-majalah, surat kabar dan lain-lain.

Dalam penelitian lapangan (*field research*) apakah itu menyangkut langkah-langkah preventif budaya *siri'* untuk menghindari terjadinya suatu tindak pidana, upaya-upaya yang dilakukan dalam rangka sosialisasi nilai-nilai budaya *siri'*, atau pandangan-pandangan di sekitar penerapan pidana (*nestapa*) terhadap delik pembunuhan serta pencemaran nama baik orang lain (khusus terhadap delik yang berlatar belakang *siri'*), maka untuk mendapatkan deskripsi yang lebih baik dan memadai dari obyek yang diteliti, dipergunakan alat-alat pengumpul data berupa studi dokumen, pengamatan dan wawancara.

Studi dokumen terutama ditujukan kepada dokumen *lontara*, dokumen putusan pengadilan. *Lontara* adalah sumber utama petuah-petuah budaya *siri'* dengan segenap permasalahannya yang ditulis dalam buku LA TOA. Buku *La Toa* yang berarti Yang Tua. Arti sebenarnya adalah "Petua-petua yang berisi lebih dari seribu jenis yang erat hubungannya dengan *siri'* dalam pola hidup untuk adat-istiadat Bugis-Makassar (Moeing, 1977: 16). Adapun dokumen-dokumen putusan pengadilan hanya putusan kasus pidana yang berlatar belakang *siri'*.

Mengenai pengamatan, maka sasaran dalam hal ini

difokuskan kepada hal-hal yang berada di dalam ruang lingkup kerangka teoretis yang digunakan dalam penelitian ini. Yaitu sejauh manakah budaya *siri* dapat menjadi sarana preventif terhadap tindak pidana pembunuhan dan pencemaran nama baik orang lain.

Kemudian daripada itu, wawancara sebagai alat pengkumpul data dilakukan dengan berpedoman kepada daftar pertanyaan-pertanyaan yang telah disusun terlebih dahulu.

Tabel dibawah ini menunjukkan metode-metode yang dipergunakan dalam hubungannya dengan setiap jenis data yang dibutuhkan di dalam penelitian ini (bandingkan dengan Muladi, 1992 : 76)

Tabel Metode					
No.	Jenis Data	Metode			
				Fr.	
		Lr.	Sd.	O.	W.
1.	Pengambilan keputusan terhadap kasus pidana berlatar siri.	X	X	X	X
2.	Keterkaitan antara budaya siri dengan langka-langka preventif terhadap terpidana.	X	X	X	X
3.	Kepekaan budaya siri dalam kaitannya dengan terpidana pembunuhan.	X	X	X	X
4.	Bahan-bahan guna menyusun kemungkinan adanya langkah-langkah preventif terhadap terpidana.	X	X	X	X

Keterangan : Lr. = Library research
Fr. = Field research
Sd. = Studi dokumen
O. = Observasi
W. = Wawancara

Catatan : Perbandingan antara Lr. dan Fr. sebagai berikut :
 Pada data no. 1 80 : 20
 no. 2 50 : 50
 no. 3 10 : 90
 no. 4 50 : 50

C. POPULASI DAN SAMPEL

Populasi

Populasi penelitian ini adalah keseluruhan masyarakat Bugis-Makassar yang potensial dapat memberikan data atau fakta tentang budaya *siri'* di Sulawesi Selatan. Paling kurang dianggap dapat mengetahui tentang budaya *siri'*. Namun demikian sasaran utama populasi penelitian ini sebagai subyek pendukung adalah:

1. Pemuka-pemuka adat,
2. Budayawan/antropolog,
3. Hakim Pengadilan Negeri,
4. Aparat Kepolisian RI,
5. Praktisi Hukum (pengacara),
6. Eks narapidana yang sudah kembali ke masyarakat.

(rinciannya dapat dilihat pada Bab tentang Data).

Yang dimaksud dengan pemuka-pemuka adat di sini adalah para pemangku adat daerah-daerah yang telah ditentukan, baik yang masih duduk pada jabatan itu maupun yang sudah tidak aktif lagi sebagaimana lazimnya tetapi masih tetap berpengaruh di masyarakat. Sedangkan yang dimaksud dengan budayawan/antropolog adalah masyarakat ilmiah yang selama ini menekuni perkembangan nilai-nilai budaya daerah setempat, baik secara spesifikasi maupun secara kontemporer.

Aparat-aparat hukum sebagai subyek pendukung populasi adalah polisi RI, pengacara, dan hakim pengadilan

negeri. Sedangkan eks narapidana adalah hanya dikhususkan kepada yang kembali dan diterima oleh masyarakat.

Sampel Penelitian

Telah ditentukan bahwa penarikan sampel penelitian ini ditentukan secara *purposive*. Dan dari keseluruhan sampel tersebut ditarik lagi secara *purposif* sebanyak dua orang dengan berdasarkan kepada kategori-kategori variabel yang telah diidentifikasi. Kedua sampel ini sengaja ditentukan secara berlawanan. Secara berlawanan artinya, sampel pertama bertitik tolak dari perwujudan nilai-nilai budaya *siri'* dalam arti negatif. Artinya sampel ini adalah seorang bekas narapidana dan selesai menjalani hukuman minimal 5 tahun sejak dibebaskan. Dan kembali ke masyarakat di mana masyarakat menerimanya kembali dengan baik karena terjadi perubahan *siri'* negatif menjadi *siri'* positif. Batas tenggang waktu 5 tahun itu penulis dasarkan kepada pertumbuhan seorang anak berumur 7 tahun. Ketika berumur tujuh tahun hingga 10 tahun, pertumbuhan si anak mengenai pemahaman tentang baik dan buruk belum begitu jelas. Tetapi anak yang berumur 12 atau tiga belas tahun secara psikologis ia sudah mulai mengerti tentang baik dan buruk, indah dan jelek, atau bahkan menyenangkan atau menyusahkan. Itulah sebabnya penulis memperkirakan bahwa narapidana yang sudah dibebaskan sejak lima tahun ke atas yang si-lam pasti terdapat perubahan yang positif.

Indikator variabelnya dapat diidentifikasi antara lain:

- (1) Kesadaran pribadi setelah keluar dari LP;
- (2) Tatacara bermasyarakat;
- (3) Persepsi masyarakat atas dirinya;
- (4) Pekerjaan yang ditekuni selama is keluar dari LP;
- (5) Keadaan rumah tangganya (dalam hal ini kerukunan rumah tangganya).

Sampel yang kedua adalah sampel yang didasarkan kepada penilaian masyarakat, perwujudan nilai-nilai siri' positifnya tak dapat diragukan. Seperti "*matanre siri'*", "*maraja siri'*". Dalam arti bahwa sepanjang hayatnya tidak pernah diketahui melakukan perbuatan melanggar siri'. Oleh sebab itu, indikator-indikator sebagai ukuran variabel di sini adalah:

- (1) Prestasi dan prestisenya;
- (2) Pengakuan msyarakat secara umum di daerahnya;
- (3) Sikapnya terhadap orang lain;
- (4) Prinsip-prinsip yang dipegang dan dianutnya;
- (5) Perwujudan prinsip-prinsip yang dianutnya.

D. METODE SAMPLING

Metode sampling yang digunakan adalah purposive (penarikan sampel yang bertujuan). Metode penarikan sampel yang bertujuan ini adalah salah satu alternatif, karena metode ini memiliki ciri tersendiri, di mana

sampel yang dipergunakan harus mempunyai karakteristik yang dibutuhkan sebagai indikator variabel. Sehingga penelitian dapat lebih terarah dengan tingkat validitas yang baik, serta biaya dan waktu relatif efisien dan efektif.

Alasan peneliti menggunakan metode sampling semacam ini adalah karena populasi penelitian ini adalah tidak homogen. Sebab sekalipun disebut Bugis tetapi pada tiap daerah di Sulawesi Selatan sedikit agak berbeda-beda. Dan di samping itu terdapat suku Makassar. Itulah sebabnya penulis nyatakan bahwa populasinya tidak homogen (Noeng, 1006: 25).

Sungguhpun populasinya heterogen, tetapi pada sisi lain strata perilaku sosialnya adalah homogen. Artinya, sekalipun suku Bugis-Makassar sedikit agak berbeda budaya maupun dealegnya, namun perilaku mereka tentang *siri'* adalah sama. Dengan demikian metode sampling yang paling tepat adalah *purposive sampling*.

E. METODE ANALISIS DATA

Pada garis besarnya, metode analisis data umumnya dapat diklasifikasikan menjadi dua, yaitu metode analisis data yang bersifat kualitatif (biasanya terfokus pada fakta-fakta), dan metode analisis yang bersifat kuantitatif. Dalam penelitian ini kedua metode itu dapat digunakan.

Data yang mengarah kepada kajian-kajian yang bersifat teoretis dalam bentuk asas-asas, konsepsi-konsepsi, pandangan-pandangan, doktrin hukum, serta isi kaedah-kaedah hukum dianalisis secara kualitatif. Sedangkan data yang bersifat kuantitatif dianalisis secara kuantitatif pula. (dapat dibandingkan dengan Prof Muladi, 1992: 76).

Selanjutnya, sepanjang menyangkut penelitian kepustakaan dilakukan pula analisis perbandingan antara dua atau lebih sistem hukum, khususnya dalam hal penerapan hukum pidana tertulis dan penerapan hukum pidana pelanggaran adat (pelanggaran nilai-nilai budaya *siri'*). Hal ini terbatas pada tindak pidana pembunuhan dan pencemaran nama baik orang lain. Analisis perbandingan ini disebut juga analisis komparatif (Noeng, 1996: 88, dan Muladi, 1992: 80).

Analisis perbandingan digunakan dalam penelitian ini mengingat bahwa permasalahan yang menyangkut hal-hal di atas tidak terlepas dari pengaruh perkembangan hukum pidana formil terhadap nilai-nilai budaya daerah. Melalui analisis perbandingan inilah, maka dapat diketahui perbedaan dan persamaan keduanya. Dan selanjutnya dapat dinilai, bahwa apakah nilai-nilai budaya daerah (budaya *siri'*) perlu dipertimbangkan dalam hukum pidana nasional, ataukah perlu penyesuaian tanpa mengesampingkan nilai-nilai budaya daerah dalam arti

prevensi. Artinya, *the two go hand in hand*. Keduanya jalan secara bergandengan dan bersama-sama dalam penja-tuhan sanksi pidana, apabila tindak pidana itu berlatar belakang budaya daerah. Dengan demikian dapat dikonkritkan bahwa metode analisis data yang diterapkan adalah metode analisis yuridis empiris, deskriptif, historis dan komparatif.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DATA DAN ANALISIS DATA

A. D A T A

Yang dimaksudkan data di sini adalah data sekunder dan data primer. Data sekunder, termasuk di antaranya adalah kerangka teoretis. Sedangkan data primer adalah data yang bersifat empirik yang diamati di lapangan, baik yang bersumber dari responden maupun yang diterima dari sampel-sampel penelitian.

Dalam penelitian ini, populasinya meliputi etnis Bugis - Makassar. Jumlah responden sebanyak \pm 50 orang, termasuk dua orang sampel yang ditarik secara purposif. Subyek pembantu dari populasi itu antara lain:

1. Hakim Pengadilan Negeri dari empat Kabupaten. Yaitu, Pengadilan Negeri Palopo Kabupaten Luwu 2 orang, P.N Bone 2 orang, P.N. Sungguminasa Gowa 2 orang, dan 4 orang dari P.N Ujung Pandang.
2. Budayawan/antropolog dan tokoh masyarakat sebanyak 15 orang. Budayawan di sini termasuk yang berprofesi ganda. Yaitu di samping sebagai budayawan, juga sebagai ahli hukum. Dan selain daripada itu, satu di antaranya sebagai sampel. Yakni budayawan dari Kabupaten Bone.
3. Anggota Polisi sebanyak 12 dari empat kabupaten, meliputi:

- 3 orang dari Polres Palopo,
 - 7 orang dari Polres Gowa,
 - 2 orang dari Poltabes Ujung Pandang.
4. Eks narapidana 1 orang, sekaligus sebagai sampel yang berdomisili di desa Salo Kecamatan Watang Sawitto Kabupaten Pinrang.
 5. Praktisi hukum (Pengacara) sebanyak 15 orang, yang meliputi: 6 orang dari Ujung Pandang, 4 orang dari Bone, 3 orang dari Kabupaten Gowa, dan 2 orang dari Kabupaten Luwu.
 6. Partisipan seminar hasil data lapangan pada tanggal 26 Februari 1997 di Kampus Universitas Muslim Indonesia sebanyak 20 orang. Dengan demikian, jumlah sampel secara keseluruhan termasuk partisipan, adalah 70 orang.

Di antara empat daerah sebagai daerah lokasi penelitian tersebut, tiga daerah di antaranya disebut sebagai daerah sampel. Kriteriaanya sehingga disebut sebagai daerah sampel, yaitu karena perilaku-perilaku masyarakatnya dalam kaitannya dengan budaya *siri'* di daerah-daerah ini belum begitu banyak dipengaruhi oleh nilai-nilai budaya asing. Di samping itu, bangunan-bangunan kerajaan seperti, Istana Raja Luwu di Palopo, Ballalompowa di Sungguminasa Gowa, dan Salassae di Bone masih tertata apik. Ini membuktikan bahwa di daerah-daerah ini masih tetap memelihara nilai-nilai, budaya

daerah, termasuk nilai-nilai budaya *siri'*. Selain daripada itu, daerah-daerah ini merupakan daerah bekas swapraja.

Sementara itu, peneliti memilih subyek populasi seperti hakim, anggota polisi, budayawan, eks narapidana, dan pengacara, juga mempunyai alasan tersendiri. Bagi hakim, ia merupakan lembaga peradilan/pemutus suatu perkara. Dalam hal ini perkara pembunuhan yang berlatar *siri'*. Oleh sebab itu merupakan subyek pendukung penelitian yang sangat penting artinya.

Kemudian daripada itu, anggota polisi merupakan tangan pertama di lokasi setiap tempat kejadian tindak pidana dan menanganinya secara langsung. Dengan demikian datanya adalah yang dia saksikan secara langsung. atau mendengarkan kesaksian-kesaksian dari saksi-saksi, melihat, menyaksikan, atau mengalaminya sendiri.

Berbeda dengan budayawan. Kaum budayawan, ada di antaranya bukan hanya teoritis (*building theory*), tentang penerapan nilai-nilai budaya *siri'*, tetapi ada di antaranya sebagai *praksis* secara langsung yang implementasinya dapat disaksikan oleh masyarakat luas. Praksisnya bersifat mutawathir. Mutawathir, artinya tidak dapat diingkari oleh masyarakat luas.

Adapun eks narapidana satu orang, dalam penelitian ini merupakan sampel yang ditentukan secara purposif.

Hal ini dimaksudkan bahwa apakah secara empiris *siri'* negatif dapat berubah menjadi *siri'* positif. Karena perubahan *siri'* negatif menjadi *siri'* positif adalah salah satu langkah tindakan prevensi untuk menghindari terjadinya tindak pidana. Dengan demikian, dua subyek pendukung penelitian hukum ini ialah satu sampel dari budayawan (tokoh masyarakat), dan satu lagi sampel dari eks narapidana diharapkan dalam analisis nantinya, terbukti bahwa budaya *siri'* Bugis, Makassar dapat menjadi salah satu langkah preventif suatu delik.

Dipilihnya praktisi hukum (pengacara) menjadi salah satu subyek pembantu dalam penelitian masalah *siri'* ini, karena para praktisi hukum inilah yang sering membela kepentingan seorang klien, seperti pelaku pembunuhan dan lain-lain. Oleh karena itu, sekalipun kecenderungan datanya bersifat subyektif, tetapi tidak berarti unsur kebenarannya tidak ada sama sekali. Karena sikap subyektivitas tidak selamanya bertentangan dengan keadilan. Dari sisi inilah para pengacara itu dibutuhkan.

a. Pernyataan responden tentang *siri'* (dalam hal ini hakim-hakim pengadilan negeri di empat kabupaten, yaitu Pengadilan Negeri Ujung Pandang, Pengadilan Negeri Sungguminasa Gowa, Pengadilan Negeri Watampone, dan Pengadilan Negeri Palopo Luwu. Pengetahuan responden tentang *siri'* di sini dikaitkan dengan hukum pidana tertulis.

Tentang keterkaitan antara budaya *hukum siri'* dengan penerapan hukum pidana tertulis pada saat proses peradilan sampai dengan pengambilan keputusan dari majelis hakim, yang ingin diketahui dan diteliti adalah; apakah nilai-nilai budaya hukum *siri'* turut dipertimbangkan atau tidak dalam setiap kasus tindak pidana yang berlatar belakang *siri'*. Untuk hal ini dapat dilihat pada tabel 1:

Tarap Pernyataan	Frekuensi	%
Yang menyatakan harus	7 orang	70 %
Yang netral	1 orang	10 %
Yang menyatakan tidak perlu	2 orang	20 %
Jumlah	10 orang	100 %

Tabel 1 di atas memberikan gambaran kepada kita bahwa 70 % hakim di pengadilan negeri dari empat daerah di Sulawesi Selatan berpendapat, bahwa semestinya budaya *siri'* perlu dipertimbangkan dalam setiap pengambilan keputusan atas kasus pembunuhan/pencemaran nama baik seseorang yang berlatar belakang *siri'*. Pada umumnya hakim-hakim itu beralasan bahwa nilai-nilai budaya *siri'* sejak dahulu kala, hidup dan dipelihara oleh masyarakat Bugis, Makassar. Dengan demikian, sudah menjadi bagian dari hukum pidana materiil. Selain daripada itu, ada yang berpenda-

pat bahwa budaya *siri'* merupakan bagian dari budaya nasional. Oleh karenanya, perlu dipelihara dan diperjelas eksistensinya. Bahkan Andi Zainal Abidin, Hakim senior Pengadilan Negeri Sungguminasa berpendapat, bahwa di pengadilan negeri Sungguminasa, dalam perkara-perkara yang berkaitan dengan *siri'*, masih menganut hukum tidak tertulis. Yang dalam hukum internasional disebut *convention*. Kaedahnya budaya hukum *siri'* bukan merupakan pelengkap dalam menetapkan sanksi pidana atau hukuman, tetapi merupakan alasan yang merinmgankan. Hal ini dilihat dari sudut hukum dan bukan dari sudut optik sosiologik.

Sebagai contoh, menurut Zainal; "adalah suatu perbuatan tercelah apabila seorang laki-laki memasuki kamar seorang wanita tanpa wanita lain dalam kamar tersebut" (ini kacamata sosiologinya). Hal-hal seperti itulah yang mendasari penerapan hukum tidak tertulis di P.N. Sungguminasa, yaitu atas dasar *convention*. Menjadilah ia kaidah, namun bukan merupakan norma hukum, karena tidak tertuang dalam suatu undang-undang.

Bagi hakim yang berpendapat netral, ia menilai bahwa sekalipun masyarakat Bugis, Makassar mengenal budaya hukum *siri'* atau bahkan mungkin dipelihara, tetapi kenyataannya sering tergeser oleh unsur-unsur hukum pidana tertulis dalam setiap peradilan. Hakim

yang berpandangan seperti ini tidak menyertakan penjelasan mengapa unsur-unsur budaya hukum *siri'* dapat tergeser oleh unsur-unsur hukum pidana tertulis.

Adapun yang berpendapat tidak perlu, sekitar 20 persen. Menurut mereka, budaya *siri'* tidak mesti harus dipertimbangkan. Karena dalam setiap putusan pengadilan, khususnya kasus-kasus tindak pidana pembunuhan yang berlatar belakang *siri'* sudah ada aturannya dalam KUHP. Selain daripada itu *siri'* bukan merupakan hukum, dan hanya merupakan kebudayaan saja. Tetapi hakim ini kembali menegaskan, bahwa bukan berarti budaya *siri'* tidak dapat dihubungkan dengan masalah hukum. Kemudian hakim yang lain berpendapat, bahwa "budaya *siri'* tidak perlu dipertibangkan lagi dalam setiap kasus yang berkaitan dengan masalah *siri'*", karena pada umumnya orang-orang yang terlibat dalam dunia peradilan adalah tidak jujur.

b. Budayawan/Antropolog

Pada bagian ini disajikan data dari kalangan budayawan/antropolog sebanyak 13 orang. Tiga orang di antaranya adalah antropolog, serta tiga orang lagi yang rangkap profesi. Artinya, di samping sebagai pengamat masalah kebudayaan Bugis Makassar, juga pakar di bidang hukum.

Data penting yang ditelorkan oleh para pakar dan budayawan itu, adalah selain keterkaitan antara nilai-nilai budaya *siri'* dengan hukum pidana tertulis, juga seberapa jauh budaya *siri'* dapat menjadi sarana preventif terhadap peristiwa pidana. Dari dua sisi tersebut dapat dilihat persentasenya pada tabel 2 di bawah ini:

Tarap Pendapat	Frekuensi	%
a. Punya keterkait-	10 orang	77
b. dapat menjadi sarana prevensi	10 orang	77
c. lain-lain	3 orang	23

Tabel di atas menunjukkan bahwa budaya hukum *siri'* di kalangan Bugis, Makassar mutlak terkait dengan hukum pidana tertulis. Pada sisi lain, budaya *siri'* besar kemungkinannya bisa menjadi sarana preventif untuk mencegah terjadinya delik; dalam hal ini delik pembunuhan dan pencemaran nama baik orang lain.

Sumber-sumber di atas pada umumnya berpendapat bahwa ada dua cara yang dapat ditempuh untuk menjadikan *siri'* sebagai langkah-langkah prevensi. Pertama *siri'* negatif dirubah menjadi *siri'* positif. Sebagai contoh, pada kasus kawin lari (*silariang*, Bugis), membawa lari anak gadis orang lain, atau memperkosa anak gadis orang lain. Di Sulawesi Sela-

tan, berakibat peristiwa berdarah atau pembunuhan. Untuk mencegah terjadinya delik, maka pihak laki-laki perlu mengadakan pemulihan nama baik orang yang terganggu (*mappabbaji*, Makassar), *mappedeceng* (Bugis). Caranya, pihak laki-laki mendatangi orang tua pihak perempuan untuk melakukan pertanggungjawaban atas perbuatannya. Hal seperti itu biasanya dilakukan sebagaimana layaknya jika orang melakukan pinangan. Bedanya dengan pinangan, pihak perempuan yang terganggu jika ia menerima sang laki-laki, konsekwensinya tidak lagi dibicarakan tentang mahar maupun maskawin sebagaimana yang dilakukan pada pinangan murni. dan pihak perempuan menerima sebagaimana adanya. Tetapi jika ia menolak, maka hal ini masih tetap menjadi ancaman bagi sang laki-laki.

Menurut Andi Makmun, Kepala Musium *Ballalompoe* Sungguminasa Kabupaten Gowa, budaya *mappabaji* (Makassar) atau memulihkan nama baik pihak perempuan yang terganggu biasanya dilakukan melalui pihak ketiga. Pihak ketiga sebagai perantara ini, sebaiknya dilakukan oleh kalangan orang-orang yang dapat diterima baik oleh pihak keluarga wanita. Artinya, pihak ketiga yang akan melakukan proses *pabbaji* ini, sebaiknya melalui tokoh-tokoh masyarakat atau pemuka adat.

Dalam kaitannya dengan apa yang diutarakan di

atas, masyarakat awam Bugis-Makassar, ada pemahaman yang tertanam, bahwa sekalipun pihak laki-laki sudah dinyatakan akan melakukan adat istiadat *mappabbaji*, namun bagi pihak laki-laki masih sangat tegang. Laki laki yang melakukan perbuatan melawan hukum itu dianggap aman dari ancaman pembunuhan atau pemukulan dari pihak perempuan yang terganggu kehormatannya setelah prosesi *mappabaji* selesai.

Pernah suatu ketika, dalam suatu proses *mappabaji*, lelaki yang melakukan perbuatan melawan hukum itu sudah berada dihalaman rumah pihak perempuan. Para penjemput pun sudah siap menjemput dan menghormati sang tamu. Tiba-tiba dari arah belakang, lelaki tersebut dipukul oleh salah seorang keluarga perempuan. Menurut pandangan sebagian orang-orang Makassar, tindakan seperti itu disebut *napallebba'i* atau *mappalleppe* (Bugis), artinya; membayar utang.

Menurut Andi Anton, salah seorang antropolog dari Palopo, Luwu, perbuatan melawah hukum yang dilakukan oleh lelaki seperti dalam kasus yang diceritakan di atas, adalah merupakan delik etika sosial. Menurut Anthon, keluarga adalah bagian dari harkat, martabat keluarga. Harkat dan martabat adalah makna hakiki dari *siri'*. *Siri'* sendiri bila direfleksikan ke lingkungan luar, maka ia disebut "etika sosial". Dengan demikian pelanggaran terhadap etika sosial

disebut delik etika sosial. Orang yang melakukan pelanggaran terhadap etika sosial disebut amoral sosial (garis bawah dari penulis).

Jika suatu perbuatan adalah perbuatan amoral sosial, maka sanksinya adalah juga sanksi sosial. Keharusan untuk melakukan *mappabbaji* (Makassar), *mappedeceng* (Bugis) atau melakukan pemulihan nama baik keluarga yang terganggu, adalah salah satu bentuk sanksi sosial. Sanksi sosial seperti inilah sangat potensial untuk mencegah terjadinya delik.

Dalam penelitian ini terdapat suatu bukti empirik di mana *siri'* sebagai upaya-upaya preventif terjadinya suatu delik, sehubungan dengan sanksi sosial seperti disebutkan di atas. Bukti empirik dari budaya *siri'* itu, dapat dilihat pada pengalaman seorang camat di Kecamatan Wara, Kabupaten Luwu.

Berikut ini penuturan seorang camat, yaitu Andi Raja, saat beliau menangani satu kasus penghamilan seorang gadis desa yang dilakukan oleh seorang oknum polisi. Duduk perkaranya sebagai berikut:

Seorang gadis A di satu desa dalam wilayah Kecamatan Wara Utara, Kabupaten Luwu, berkenalan dengan seorang oknum polisi. Dalam perkenalan tersebut lama-kelamaan semakin akrab. Dalam keakraban yang sudah mengental itu, ternyata tidak terasa keduanya

pun menjalin cinta yang lebih rapat lagi. Dan akhirnya sang gadis desa tadi hamil. Perbuatan itu dilakukan oleh oknum polisi tadi yang *notabene*-nya tidak tahu-menahu tentang adat istiadat di Tanah Bugis. Singkat cerita, kecelakaan itu diketahui oleh orang tua si gadis, maka iapun mengusut siapa pelaku perusak nama baiknya itu. Al-hasil, diketahuilah bahwa yang melakukan perbuatan itu adalah sang oknum polisi yang sering bertamu di rumahnya selama ini.

Ketika orang tua sang gadis mengetahui pelaku perbuatan itu, terpaksa ia melaporkan kepada Pak Camat (Andi Raja). Sebagai seorang camat ia merasa wajib memperhatikan warganya, termasuk keberatan yang disampaikan oleh orang tua gadis yang mendapat kecelakaan itu. Lalu dicarikanlah jalan keluar yang terbaik. Jalan yang ditempuh oleh Pak Camat adalah menghubungi oknum pelaku tadi dan meminta agar ia bertanggung jawab atas perbuatannya.

Akan tetapi, karena penyampaian itu masih dalam tarap-tarap lemah-lembut, rupanya si oknum polisi itu menolak untuk bertanggung jawab. Pak Camat kembali memberi tahu kepada orang tua si gadis yang ditimpa musibah itu, bahwa oknum polisi itu tidak bersedia bertanggung jawab.

Mendengar sikap oknum tadi, maka orang tua itu

sangat marah dan mengeluarkan pernyataan, bahwa "jika oknum polisi itu tidak mau bertanggung jawab atas pebuatannya, maka saya akan membunuhnya. Tidak perduli apakah saya yang dibunuh atau dia yang melayang nyawanya". Sekalipun demikian, ia masih meminta Pak Camat untuk mencari jalan yang terbaik untuk menghindari pertumpahan darah. Mendengar permintaan itu Pak Camat lalu mencari upaya-upaya. Di saat itu ia berinisiatif untuk memperhadapkan kasus tersebut pada Polisi Militer. Melalui polisi militer inilah oknum polisi tadi berhasil ditundukkan dan diharuskan mempertanggung-jawabkan perbuatannya. Lalu keduanya dikawinkanlah. Terhindarlah sang orang tua dan oknum polisi tadi dari peristiwa berdarah.

Kedua, *siri'* positif dipelihara dan dilestari-kan. Cara melakukannya menurut Petta Nabba, harus dimulai dari diri sendiri, kemudian ke dalam lingkungan keluarga sendiri, dan setelah itu barulah ke lingkungan sekitar.

Menurut tokoh masyarakat sekaligus budayawan dari Bone ini, mensosialisasikan budaya *siri'* bukanlah sesuatu yang mudah bagai membalik telapak tangan. Sebab paling tidak, harus dimulai dari sejak kanak-kanak hingga menginjak umur dewasa. Pernyataan ini dapat dibandingkan dengan sebuah hasil pengamatan seorang anggota *Associete Professor* dari Jepang, Mr.

Koji Tanaka (Kiyoto University), di mana peneliti bertemu secara tidak sengaja di Ujung Pandang. Peneliti bertanya kepada professor itu, bahwa "apakah yang menyebabkan senjangnya antara pembangunan di Jepang dengan di Indonesia"? Beliau menjawab "terletak pada sumber daya manusia. Sumber daya manusia harus dimulai dari kanak-kanak. Tetapi di Indonesia susah. Karena anak-anak di Indonesia, jika ia disuruh ke barat, malah ia ke timur". Demikian ungkapan canda Mr. Koji Tanaka.

Mensosialisasikan budaya *siri'* menurut Andi Palloge Petta Nabba, gampang-gampang susah. Karena harus dimulai dari diri sendiri. Diri sendiri ibarat cermin. Cermin tempat mengaca anak-anak dan keluarga kita sekaligus orang lain. Misalnya, "jangan berkata putih jika memang itu hitam. Sebab, perbedaannya terlalu mencolok" (tanda petik dari penulis).

Tokoh yang dikenal kharismatik di Bone itu juga menjelaskan, bahwa pada dasarnya *siri'* sama dengan keimanan jika dalam agama. *Siri'* negatif harus dihilangkan, karena *siri'* negatif inilah yang seringkali memicu terjadinya kejahatan. Sedangkan perbuatan jahat atau kejahatan adalah sumber perusak *kemanusiaan* (garis miring dari penulis).

Dalam kaitannya dengan sosialisasi budaya *siri'*

dapat disamakan dengan sebatang pohon. Sebatang pohon elemen-elemennya terdiri dari batang, dahan, daun, dan buah. Kesemuanya itu bertumpu pada akar. akar itulah yang menumbuhkan pohon tadi. Keempat unsur pohon itu tadi, subur tidaknya sangat ditentukan oleh akar. Contoh lain sebagai perbandingan, jika kita membuat kue dalam satu citaan, hasilnya pasti sama semua. Bila ada hasil citaan yang berbeda, maka tentu ada kerusakan. Demikianlah halnya dengan sosialisasi budaya *siri'*. *Naiya tau de'e siri'na de'nasiwajo-wajo* (Bugis), terjemahan bebas dari penulis, yaitu bagi orang yang tidak memiliki *siri'* tidak sama perbuatannya dengan ungkapannya. Oleh sebab itu langkah prevensi *siri'* dibutuhkan kehati-kehatian. Sebab jika tidak, maka dalam masyarakat itu akan sama perilakunya dengan dua ekor induk ayam yang saling menerjang. *Indo'na mau'e mabbitte, tellona mareppa-reppa* (Bugis); artinya, induknya ayam yang saling menerjang, telurnya yang habis pecah.

Naiya to engkae siri'na (Bugis); artinya, orang yang memiliki *siri'* biasanya lebih memperkokoh keimanannya. Keimanan itu lebih suci. Sebab *siri'e* itu adalah kesucian. Ini adalah alat pembersih yang ampuh. Demikian penjelasan Petta Nabba di Bone.

c. Pengetahuan anggota polisi terhadap persepsi pelaku tindak pidana orang Bugis, Makassar mengenai budaya

siri'.

Unsur-unsur yang diteliti di sini yaitu:

- 1) Apakah budaya *siri'* sangat peka bagi mereka, dan apakah *siri'* terlalu mudah mengundang peristiwa berdarah,
- 2) Adakah tingkat perbedaan pemahaman mereka mengenai *siri'*,
- 3) Apakah budaya *siri'* memang sudah mengakar di kalangan mereka,
- 4) Apakah pada umumnya mereka tidak dapat membedakan antara *siri'* positif dan *siri'* negatif.

Melalui unsur-unsur itulah akan diukur pengalaman-pengalaman anggota polisi pada saat mereka menangani perkara-perkara pembunuhan yang berlatar belakang *siri'*. Tabel 3 sebagai berikut:

Tatap Pengetahuan Masyarakat	Frekuensi				%
	a	b	c	d	
1. Tidak tahu	1	0	0	1	16,66
2. Kurang tahu	1	1	2	0	33,33
3. Tahu persis	10	11	10	11	350,00
Jumlah	12	12	12	12	400

Data di atas membuktikan bahwa berdasarkan pengalaman anggota polisi dalam menangani kasus pembunuhan/pencemaran nama baik orang lain, data lapang

an membuktikan bahwa para pelaku tahu tentang *siri'*. Dari 12 orang anggota polisi yang diwawancarai langsung oleh peneliti, 10 di antaranya menyebutkan bahwa pada pokoknya pelaku-pelaku kejahatan tersebut peka terhadap *siri'*. Pada item b juga membuktikan, bahwa tidak ada yang tidak tahu kalau *siri'* itu mudah mengundang peristiwa berdarah. Berikutnya, item c, d atau 175 persen mengetahui, bahwa diantara mereka tidak dapat membedakan mana *siri'* positif dan mana *siri'* negatif.

d. Praktisi Hukum (Pengacara)

Dalam pengumpulan data pada bagian ini, peneliti tidak menggunakan suatu instrumen seperti kuisio-
ner misalnya. Tetapi hanya melalui pembicaraan secara personifikasi. Hal ini dimaksudkan untuk menghindari pembicaraan yang berbelit. Artinya, cukup to the point. Inti pembicaraan adalah bagaimana hubungan antara *siri'* dan keadilan dalam praktik di pengadilan. Ternyata, sembilan puluh persen dari jumlah yang ditemui oleh peneliti (15 orang dari empat kabupaten dan kota madya) menjawab, bahwa "di sini tidak ada keadilan sejati. Yang ada hanya keadilan semu". Ibaratkan suatu patamorgana.

e. Data dari Sampel

1. Sampel I, La Sappe

La Sappe adalah seorang bekas narapidana pembunuhan yang berkaitan dengan masalah *siri'*, yaitu istrinya diganggu oleh orang lain. Ia berdomisili di Desa Salo, Kecamatan Watang Sawitto, Kabupaten Pinrang. Pekerjaannya sehari-hari sebagai petani, dan usianya kini 37 tahun. Ketika ia dijatuhi pidana penjara, umurnya sekitar 23 tahun. Dan dikenakan pidana penjara selama 2,5 tahun.

Variabel-variabel yang diteliti pada diri Sappe, berkaitan dengan perubahan *siri'* negatif menjadi *siri'* positif. Indikator-indikatornya antara lain:

1. Kesadaran pribadi setelah keluar dari L.P.,
2. Tata cara bermasyarakat,
3. Persepsi masyarakat di desanya atas dirinya,
4. Pekerjaan yang ditekuni selama ia keluar dari LP.
5. Keadaan rumah tangganya (dalam hal ini kerukunan rumah tangganya) sejak keluar dari L.P.

Indikator-indikator tersebut akan diamati bagaimana seorang eks narapidana seperti La Sappe merubah nasibnya dengan mengembangkan *siri'* positif dan menghindari *siri'* negatif. Satuan-satuan terkecil obyek penelitian pada sampel pertama itu sebagai wujud berfikir spesifik dan empirik sesudah ia meninggal-

kan Lembaga Pemasyarakatan Pinrang, dan kembali ke masyarakat serta diterima oleh masyarakat dengan baik. Sampel ini termasuk subyek pendukung tentang budaya *siri* sebagai langkah-langkah prevensi suatu delik.

a) Data ketika La Sappe menjadi terdakwa di Pengadilan Negeri Pinrang pada tahun 1983.

Pada pokoknya, fakta yang terungkap dalam persidangan di P.N. Pinrang di mana dia diadili; ... Hakim Ketua bertanya, "apakah saudara mengerti tentang apa yang didakwakan"? Ia Pak. "Apakah saudara tidak takut dihukum selama 25 tahun"? Dengan tegas ia menjawab, "tidak pak". Tetapi sebelum Pak Hakim menghukum saya selama itu, perkenankan saya berbicara sedikit". Demikian permintaan La Sappe kepada Majelis Hakim. Dan majelis pun memberi kesempatan, yang pada waktu itu dipimpin oleh Alimuddin Rais, S.H.

"Menurut pemikiran saya, bila saya dihukum selama 25 tahun, dan kini saya berumur \pm 24 tahun, berarti saat keluar nanti (maksudnya bebas dari penjara) saya baru berumur \pm 49 tahun. Dengan demikian saya masih tergolong muda. Dan bilamana saya keluar dari penjara (dibebaskan), maka saya pun akan mengganggu isteri orang lain. Hukuman yang bagaimana dan pasal berapa yang diancamkan perbuatan seperti itu Tuan?" Tanya La

Sappe kembali kepada majelis hakim. "Saudara akan dihukum dan mungkin akan dibunuh oleh suami perempuan yang kau ganggu itu".

"Biarlah" !!! kata La Sappe spontan. Menurut pendapat saya, kata La Sappe di depan sidang pengadilan, bahwa dalam kehidupan kita sehari-hari, *engka tellu tau wedding' riakkasiriseng, iana ritu Indo' Ambo sibawa bawineta. Dua rekku-aero waji'i riakkasiriseng'*" (Bugis) artinya, 'dalam kehidupan kita sehari-hari, ada tiga orang yang perlu dibela kehormatan dan martabatnya, yaitu ibu, bapak, dan isteri. Dua di antaranya wajib hukumnya, yaitu Ibu dan Isteri. Keduanya ini, diminta atau tidak diminta wajib kita membela kehormatannya.

Apa alasan saudara? Tanya hakim kembali. "Ibu wajib hukumnya dibela kehormatan dan martabatnya karena dialah dengan susah payah yang mengandung kita dalam rahimnya. Kemudian setelah itu, dialah yang membesarkan kita tanpa pamrih. Sedangkan isteri, wajib hukumnya dibela kehormatannya karena dia itu isteri kita, sekalipun yang dihadapi adalah maut. Dan adapun bapak kita jika ia tidak ingin dibela kehormatannya, maka kita tidak wajib membelanya. Tetapi jika memintanya, maka barulah menjadi wajib".

Tiba-tiba Hakim Ketua menyatakan sidang ditutup dan sidang ditunda, seketika setelah La Sappe menjawab biarlah saya dihukum, karena kini saya sendiri alami peristiwa seperti itu. Maksudnya, kasus seperti itulah yang menimpa La Sappe sehingga ia diseret ke pengadilan.

b) Data Sampel I setelah 13 tahun keluar dari L.P.

Tiga belas tahun setelah La Sappe dibebaskan dari penjara, ia kembali mengalami suatu peristiwa. Peristiwa seperti yang dialami La Sappe ini pada umumnya di Sulawesi Selatan, dapat menyulut seseorang yang mengalaminya, melakukan peristiwa berdarah. Peristiwa itu dialami oleh La Sappe pada saat menjelang melakukan shalat jum'at di desanya. Kasus posisinya sebagai berikut: Pada suatu ketika, bertepatan dengan hari jum'at di mana ia hendak menunaikan shalat jum'at. di Desa Salo. Ketika ia sedang berwudu (menggambil air sembahyang), tiba-tiba datang seorang pemuda dalam keadaan setengah mabuk. Dengan tanpa diduga oleh La Sappe, pemuda yang setengah mabuk itu menendangnya ketika ia masih sedang mengambil air sembahyang untuk shalat jum'at. Pemuda tersebut menendang sambil berkata "*magai tailaco, meloko sigajang*" (Bugis) artinya, 'kenapa, tai-peler, mau bakutikam'? La Sappe dengan tenang men-

jawab, "jangan saudara, tidak baik kita berkela-
hi apalagi bakutikam". Lalu pemuda itu kembali
mengajak lagi dengan berkata "*waseng biasako
pawuno, makkekkuae sigajakki`si paimeng*" (Bugis)
artinya, "saya kira kamu pernah membunuh orang,
sekarang mari kita bakutikam lagi !!!". La Sap-
pe dengan tenang kembali menjawab "itu adalah
peristiwa dahulu. Mari kita lupakan saja". Kemu-
dian ia melanjutkan tuturnya, bahwa "Seandainya
boleh tidak ada orang yang tahu tentang apa yang
pernah saya alami, maka itu yang saya inginkan.
Saya sangat malu ditahu orang bahwa saya ini
pernah membunuh. Oleh sebab itu jangan kita baku
bunuh lagi.

Ungkapan La Sappe yang bernada menasihati
ternyata tetap tidak diterima oleh sang pemuda
tadi. Bahkan setelah ia selesai berucap seperti
itu, si pemuda tadi menghunjamkan badiknya yang
sudah terhunus ke arah tubuh La Sappe. Kendati-
pun demikian, Sappe tetap mengelak dan tetap
tidak ingin melayani tantangan tersebut.

Menurut penuturan La Sappe, bahwa sepanjang hi-
dupnya setelah peristiwa berdarah yang menyebab-
kan ia dipenjara sekitar 14 tahun yang lalu, ia
merasa perbuatan itu sungguh tidak ingin terjadi
lagi. Ia ingin hidup bahagia dan aman bersama

keluarganya, dan menghidupi anak-anaknya. Bahkan katanya, ia juga ingin hidup damai dan tenteram sebagaimana orang lain dan bersama orang lain pula. Itulah sebabnya ajakan baku tikam tadi tidak ingin dilayani sama sekali.

Pekerjaan sehari - harinya adalah petani di sawah. Hubungan semua tetangga adalah baik. Tetap melaksanakan perintah-perintah Allah, katanya. Selain daripada itu menurut pengakuannya, rasa malu itu (*masiri'*) justru tertanam pada orang yang paling dekat dengannya, yaitu isterinya sekarang, dan anak-anaknya. Ia merasa malu jika ia tidak dapat menghidupi isteri dan anak-anaknya itu kelak, sebagaimana orang lain menghidupi isteri dan anak-anaknya pula. Oleh sebab itu, "saya bekerja dengan sungguh-sungguh sekalipun itu hanya bertani", begitu tuturnya dengan penuh yakin. Menurut dia, hal itu sudah menjadi prinsip dalam hidupnya sebagai kepala rumah tangga.

Kemudian, dia selalu berfikir bahwa kalau pekerjaan seperti itu selalu dilakukan (maksudnya, membunuh orang lain) maka kehidupan selalu suram dan kita tahu bahwa kalau melakukan kejahatan, maka pastilah dihukum. Sewaktu di dalam penjara ia berfikir, bahwa bagaimana agar kita tidak di-

benci oleh orang lain, oleh masyarakat, termasuk pemerintah. Sejak keluar dari rumah, pemikiran itu yang selalu muncul dalam benaknya. Ia merasa bahwa kejelekan itu bukan hanya diketahui oleh orang sedikit, tetapi masyarakat luas. Singkatnya, janganlah kita menjadi orang yang jahat.

2. Data dari Sampel II

Sampel yang kedua ini berbanding terbalik dengan sampel yang pertama tadi. Artinya, jika sampel yang pertama berupa bagaimana *siri* negatif menjadi positif, maka pada sampel yang kedua, *siri* positif menghindarka *siri* negatif.

Sampel kedua ini, ialah seorang tokoh kharismatik masyarakat Bone, sekaligus sebagai budayawan. Beliau adalah Andi Palloge Petta Nabba, umur 83 tahun, beragama islam, pekerjaan pensiunan, dan berdomisili di Watampone.

Sepanjang hayatnya beliau, pernah menjadi ketua Residen di Bone, Kepala Keuangan Daerah Tk.II Bone, Ketua DPRD Kabupaten Bone, dan setelah pensiun kini masih diberi kepercayaan sebagai Ketua Dewan Penasihat DPRD Kabupaten Bone. Jadi sepanjang hidupnya ia selalu memegang peranan penting di daerahnya, hingga kini. Prinsipnya, "Jangan terlalu mudah menyatakan hitam jika itu memang putih, sebab terlalu jauh per-

bedaannya". Semua orang tahu. Ini adalah prinsip hukum dari *siri'*. Kemudian prinsip sosialnya, adalah "ukurlah baju di badan sendiri".

Indikator-indikator yang diteliti pada sampel kedua ini ialah:

- Prestasi dan prestisenya,
- Pengakuan masyarakat secara umum di daerahnya,
- Sikapnya terhadap orang lain,
- Prinsip-prinsip yang dipegang dan dianutnya,
- Perwujudan prinsip-prinsip yang dianutnya.

Data yang diberikan langsung oleh beliau kepada peneliti saat ditemui pada bulan Nopember 1996, di rumahnya di Watampone. Menurutnya, pada masa yang lalu *siri'* itu diberlakukan sebabagaimana layaknya dengan hukum tertulis. Seperti dikatakan di muka, bahwa *siri'* itu sama dengan shalat jika dalam agama. Tetapi tidak semua orang dapat melakukannya seperti itu. Bagi orang yang tinggi kadar *siri'*-nya ia dapat tercegah dari perbuatan pidana dan ia dapat mencegah perbuatan pidana. Kadar *siri'* yang dimaksud adalah *kadar siri' positif*. Ia dapat melakukan langkah-langkah prevensi tanpa bantuan orang lain sekalipun. Ciri-ciri orang seperti ini antara lain, mula-mula ia berbicara dengan penuh kehati-hatian/ waspada, selalu menjaga tutur kata, dan ia merasa tidak benar sendiri.

Menurut Petta Nabba, kita sebagai manusia, dalam melakukan suatu tindakan tidak di tengah-tengah hutan belantara. Tetapi ditengah-tengah masyarakat. Masyarakat itu adalah kumpulan manusia yang masing-masing mempunyai hak asasi individual dan hak asasi sosial. Hak-hak inilah yang perlu diingat dan dihormati.

Bilamana kewaspadaan kita sudah seperti itu, maka itu disebut *maraja siri'* (bahasa Bugis), yang artinya, 'orang yang memiliki perasaan siri' yang tinggi'. Jadi selalu mengarahkan ucapan-ucapannya atau tutur-katanya kepada langkah-langkah yang baik.

Dalam pada itulah *siri'* biasanya hanya terdapat pada orang-orang yang taat atau yang menghayati ajaran-ajaran agama, atau kepada orang-orang yang berpendidikan. Hanya orang-orang seperti inilah yang dapat mengamalkan *siri'* dalam arti yang positif.

Menurut Petta Nabba, *siri'* sama dengan atau searah dengan *iman* dan *tagwa* (garis miring dari penulis). Karena dapat membedakan dua hal yaitu: hal yang positif, dan hal yang negatif. Orang yang kurang dapat membedakan kedua hal ini, berarti penghayatan dan perasaan *siri'*-nya lemah. Lagi pula titik-titik potensiil *siri'* negatifnya lebih banyak, termasuk budaya intres dan politiknya (garis bawah dari peneliti).

Dahulu kala, sosialisasi budaya *siri'* ke kalangan masyarakat sangat baik dibandingkan dengan sekarang. Zaman sekarang nilai-nilai budaya *siri'* itu sudah mulai memudar. Salah satu yang mempengaruhi pemudaran nilai-nilai budaya *siri'* itu adalah modernisasi, infiltrasi budaya barat dan lain-lain. Pada hal menurutnya, kehidupan masyarakat modern itu sangat terbuka, sedangkan masyarakat tradisional itu tertutup. Tertutup dalam arti positif.

Sekalipun masyarakat tradisional itu tertutup, namun tidak semua aspek tertutup. Hanya pada aspek-aspek tertentu saja. Aspek yang tertutup itu justru tidaklah lebih jelek. Misalnya, beliau memberi contoh, "zaman dahulu para gadis-gadis perawan sangat tertutup bagi pemuda laki-laki. Sehingga pada zaman itu jarang sekali didengar atau ditemukan kejahatan perkosaan". Itu pulalah sebabnya sehingga pada zaman dahulu, bila terjadi perkosaan, jarang sekali luput dari berbuntut pembunuhan. Budaya inilah yang merembes hingga sekarang di kalangan masyarakat Bugis, Makassar.

Pada saat encernya beliau mengisahkan bagaimana kedudukan *siri'* pada zaman dahulu, tiba-tiba peneliti memotong pembicaraan dengan mengajukan pertanyaan "Menurut Bapak, apakah *siri'* di Sulawesi Selatan ini termasuk bagian dari hukum materiil dalam memutuskan perkara?" Beliau kembali menjawab, "dengan hati ikh-

las percaya diri memberi pandangan berupa keterangan yang kami ketahui berkaitan dengan masalah *siri'*. Semoga sedikit atau kurangnya ada jua manfaat dan gunanya.

Siri' pada hakekatnya dapat dibedakan atas:

- a. *Siri'* yang positif, yang sebaiknya tetap ditanamkan kedalam dada setiap orang, tetapi bukan berarti bahwa orang yang mengalami *siri'* harus bertindak sendiri di luar hukum.
- b. *Siri'* yang negatif yang tidak wajar, yang dibuat-buat. Ini yang harus dikikis dari tengah-tengah masyarakat.

Siri' sukar sekali oleh orang yang tidak bersangkutan. Banyak hal-hal yang tidak dapat dituturkan dan banyak di antaranya tidak dapat diterima rasio. Akan tetapi tidak dapat dikesampingkan karena benar-benar besar pengaruhnya untuk menimbulkan peristiwa pidana berdarah.

Kejahatan yang dapat terjadi karena dilanggarnya *siri'*, ini disebut "*SIRI' RIPA KASIRI'*" (bahasa Bugis), "*SIRI' NIPA KASIRI'*" (bahasa Makassar), yang mengakibatkan orang merasa dirinya *mate siri'* (bahasa Bugis), ialah delik. Ini dapat dikatakan, bahwa *siri'* adalah tidak akan menimbulkan kejahatan, kecuali jikalau ia dilanggar. Bila dilanngar, maka "*to masiri'*" (bahasa Bugis) artinya, orang yang dilanggar

siri'-nya, dapat melakukan kejahatan menurut Kitab Undang Undang Hukum Pidana (*notabene*-nya itu berasal dari Belanda). *Siri'* pada haketnya adalah hak asasi manusia bagi Bugis, Makassar, Mandar, Toraja, yang dijamin oleh "*Ade*" atau "*Ada'*".

Jikalau *siri'* dikaitkan dengan masalah preventif dalam mengantisipasi suatu permasalahan perbuatan melanggar hukum, termasuk perbuatan pidana (pembunuhan, pencemaran nama baik orang lain), aparat hukum sering melakukan langkah-langkah. Apakah itu langkah preventif atau langkah represif. Untuk langkah preventif, *siri'* positif adalah sesuatu yang dapat berperan. Agar dapat menjadi sarana preventif maka *siri'* positif ini harus dipelihara dan dipertahankan. Langkah yang paling efektif adalah upaya yang bijaksana, salah satu adalah pemulihan penanggung beban *siri'* kembali normal (putih) dengan dasar kesadaran dan keikhlasan.

Fenomena sosial Bugis - Makassar dewasa ini yang berkembang adalah, bahwa sekalipun dinyatakan etnis Bunis, Makassar itu memiliki simbol kemanusiaan, yaitu *SIRI'*, tetapi pada kenyataannya masih saja sering terjadi pertumpahan darah atas dasar *siri'*. "Hemat saya", kata Petta Nabba, saya sependapat dengan pendapat yang menyatakan, bahwa hal itu dikarenakan oleh kesalahfahaman atau terdapat persepsi yang berbeda mengenai *siri'*.

Faktor-faktor yang menyebabkan sehingga timbul perbedaan persepsi itu antara lain:

- karena masyarakat kurang berpendidikan,
- karena masyarakat tidak mensosialisasikan budaya *siri'*,
- karena pengaruh perkembangan masyarakat modern dari yang konvensional.

Atas dasar itulah maka sungguh keliru jika selama ini ada orang senantiasa mengidentikkan *siri'* dengan pertumpahan darah. Karena tidak semua *siri'* harus dibalas dengan pertumpahan darah. Akan tetapi pada saat tidak ada alternatif lain untuk menutupi *siri'*, maka satu-satunya jalan adalah pertarungan nyawa, yaitu usaha bijaksana pemulihan penanggung beban *siri'* menjadi normal (adil). Hal ini didasarkan kepada petuah (Bugis: *Pappaseng-torjolota: Nawawapi, nagau, tinulu, temmangingngi nalureng-toto*). Artinya: bercita-citalah, berusaha dan bekerja, rajin dan tekun, tidak bosan dan tahan uji, dan pasrah pada Tuhan Yang Maha Kuasa.

Suatu pemikiran dan cita-cita haruslah dapat berhasil manakala didukung oleh kepercayaan yang kuat terhadapnya. Cukup keihklasan dalam mencapainya. Betul-betul berani dalam melaksanakannya. Ditambahkan lagi, adanya kesediaan untuk memberikan pengorbanan dan pengamalan kerja untuk merealisasikannya. Untuk itu harus dibutuhkan empat unsur:

1. Iman atau kepercayaan, berdasarkan jiwa yang cerdas;
2. Keikhlasan, berdasarkan hati yang bersih;
3. Keberanian, berdasarkan perasaan yang kuat dan teguh;
4. Kerja tekun berdasarkan tekad yang bulat.

Dan pada akhirnya, beliau memberikan semacam wejangan, bahwa "kalau pada usaha dan pekerjaan dibarengi adanya pengorbanan, maka imbalannya tidak ada pengorbanan ikhlas yang sia-sia".

f. Anatomi Siri'

Andi Anton, seorang antropolog yang berdomisili di Palopo, Luwu, berpendapat bahwa bagi suku Bugis, Makassar, pelanggaran terhadap nilai-nilai budaya *siri'* adalah merupakan pelanggaran etika sosial. Pelanggaran terhadap etika sosial inilah disebut "delik etika sosial". Oleh sebab itu, pelanggaran atau delik etika sosial pada umumnya berakhir dengan pertumpahan darah.

Istilah *siri'* sendiri secara *focabulary* tidak ditemukan dan bahkan memang tidak ada dalam kamus hukum. Akan tetapi secara grammar, semua suku bangsa Indonesia bahkan bangsa lain pun memiliki apa yang dinamakan *siri'*. Hanya istilahnyalah yang berbeda. Istilah *siri'* hanya merupakan istilah sosial, dan bukan istilah hukum. Tetapi aplikasinya tetap terkait dengan masalah hukum.

Bagi kita suku Bugis - Makassar *siri'* punya nilai tersendiri yang disebut nilai "intrinsik". Nilai intrinsik *siri'* tersebut tersirat di dalam anatomi *siri'*. Anatomi *siri'* sendiri terdiri dari:


1. Hubungan kekerabatan bilateral (*Bilatheral Kinship*);
2. Pola kemasyarakatan yang hirarkhis '*Tomanurung*' (*Chierarchical Society*);
3. *Regalia* [*Arajang* (Bugis)], *Kalompoang* (Makassar);
4. Pola Perkawinan.

Hubungan *siri'* dengan anatomi-anatomi tersebut merupakan simbol yang biasa juga disebut dengan *the key of symbol*, 'simbol kunci'.

ad. 1 Hubungan kekerabatan bilateral (*Bilateral Kinship*)

Hubungan *siri'* dengan anatomi yang pertama ini, yaitu *siri'* sebagai simbol bagi hubungan bilateral antar kerajaan di wilayah Sulawesi Selatan (lihat diagram I) pada zamannya memakai sistem kekerabatan bilateral.

Struktur *bilateral kinship* mempunyai ikatan *siri'*, Ikatan *siri'* itu disebut *mas-seddi siri'*. Ikatan *siri'* ini terdapat dua bagian, yaitu: Pertama, ikatan *siri'* karena adanya hubungan darah. Kedua, ikatan *siri'* karena hubungan sosiologis antar kerajaan.

Ikatan *siri'* karena hubungan bilateral kinship yang pertama, disebut bilateral kinship matrilineal dan/atau bilateral kinship patrilineal. Sedangkan yang kedua, ikatan *siri'* atau *masseddi siri'*-nya disebut bilateral kinship yang sosiologis. Ikatan yang sosiologis ini disebut juga *sitelli* (bahasa Bugis). Dalam ejaan Bugis, *sitelli* itu terdiri dari dua suku kata, yaitu: *si* artinya *satu* dan *telli*, artinya tempat penampungan makanan dalam tubuh manusia yang terletak di dalam perut. Dalam istilah kedokteran, adalah "*Usus*" (*Colon/nektun*) Simbol dari *sitelli* dalam ejaan Bugis Maupun Makassar yaitu . Yang artinya *seuwa* (bahasa Bugis) atau dalam bahasa Indonesia sama dengan satu.

Jika dalam konteks sosiologisnya, *sitelli* itu maknanya menyatu atau persatuan. Kemudian dalam filsafat Bugis disebut *sulapa' eppaE*, simbol yang menunjukkan empat penjuru menjadi satu.

ad. 2 Pola hubungan kemasyarakatan hirarkhis '*Tomanurung*' (*Hierarchical Society*)

Hierarchical Society atau 'hubungan kemasyarakatan yang hirarkhis' yang berpusat pada satu puncak, yaitu *tomanurungge-maddara*

takku (bahasa Bugis), artinya, orang yang berdarah putih. *Tomanurungnge* disebut juga "raja yang tertinggi tingkat derajatnya.

R.A.Kern, seorang peneliti dari negeri Belanda yang pernah meneliti secara mendalam tentang kepahlawanan *I Lagaligo* di Palopo, dan bukunya berupa hasil penelitian Kern itu diberi judul *I Lagaligo*. Dalam bukunya itulah di temukan, bahwa *Tomanurungnge* tidak lain adalah *Batara Guru*. *Batara Guru* menurut Kern, adalah orang yang pertama diturunkan oleh Tuhan ke *alam tengah* (bumi), (garis miring dari penulis) (*I Lagaligo*, terjemahan La Side dan Sagimun M.D., 1993).

Menurut Anton, bagi *Tomanurungnge*, *siri'* sama dengan kebersihan atau kesucian. Kebersihan atau kesucian di sini dimaksudkan dalam arti luas atau dalam segala aspek dan segi kehidupan manusia. Oleh sebab itu, pola hierarkhinya berpusat pada satu orang, yaitu *Tomanurungnge*. Struktur diagramnya berbentuk piramida, dapat dilihat halaman lain. Ikatan *siri'* di sini disebut *siri' hierarchis*.

ad. 3 Regali (*A r a j a n g*, *Kalompang*)

Arajang (istilah Bugis) artinya, bentuk kerajaan. Tiap-tiap kerajaan memiliki koneksi

sendiri-sendiri. Oleh sebab itu, ikatan *siri'* yang ada pada pola kerajaan ini, disebut *siri'* koneksi.

ad. 4 Pola Perkawina

Ikatan *siri'* pada anatomi *siri'* yang satu ini adalah *siri'* yang berstratifikasi. Apa yang dimaksud dengan *siri'* stratifikasi, Anthon tidak menjelaskan. Namun ia menyebutkan bahwa dalam stratifikasi ada yang disebut *cera' lebbi* dari Sawerigading. Diagramnya dapat dilihat pada halaman lain.

Delik Adat

Pada zaman dahulu, terdapat tiga macam delik yang ditetapkan oleh pihak kerajaan (pemerintah) sebagai tindak pidana:

1. *lejja sung tappere* (bahasa Bugis). Artinya menginjak sudut tikar. Ini disebut delik zina.
2. *mangempe jawi-jawi*. Artinya, perkawina antara laki-laki dengan wanita yang tidak pantas.
3. *popo sameru*. Artinya delik makar atau subversif.

Berkenaan dengan penyelesaian tiap-tiap delik adat yang terjadi didasarkan kepada prinsip sebagai berikut:

- *tudangngi bicarae, nalalo akkapolongnge, nalalo assiturusengnge.*

Ketiga prinsip hukum di atas mengarah kepada

dua model kebijakan untuk menyelesaikan perkara pidana. Pertama, kebijakan hukum *siri'* harus diarahkan kepada nilai intrinsik, yaitu bersih dan supernatural. Kedua, Kebijakan hukum *siri'* dapat pula mempertimbangkan kepentingan-kepentingan sepanjang berkaitan dengan kepentingan umum. Artinya, hukum tetap berlaku sekalipun terkadang tidak sebagaimana mestinya. Tetapi kode etik dari penegakan hukum adalah apa yang dinamakan dalam hukum modern "*principle of legality*". Legal dalam arti peraturan-peraturan Hukum Adat.

B. ANALISIS DATA

1. DASAR BERLAKUNYA HUKUM ADAT PIDANA (SECARA EKSPLISIT BUDAYA HUKUM SIRI')

- a. Dasar hukum yang bersifat umum, yaitu Pasal 32 UUD 1945 dan GBHN.

Pasal 32 UUD 1945 ditegaskan bahwa "Pemerintah memajukan kebudayaan nasional Indonesia".

- b. Dasar hukum yang bersifat khusus:

(1) Pasal 5 ayat (3) sub b Undang-undang No. 1

Darurat tahun 1951 disebutkan sebagai berikut:

"... suatu perbuatan yang menurut hukum yang hidup harus dianggap perbuatan pidana, akan tetapi tiada bandingannya dalam Kitab Hukum Pidana Sipil, maka dianggap diancam dengan hukuman yang tidak lebih dari tiga bulan penjara dan atau denda lima ratus rupiah, yaitu sebagai hukuman pengganti bilamana hukuman adat yang di- jatuhkan tidak diikuti oleh pihak terhukum dan penggantian yang dimaksud dianggap sepadan oleh hakim dengan besarnya kesalahan terhukum.

"... bahwa suatu perbuatan yang menurut hukum yang hidup harus dianggap perbuatan pidana dan yang ada bandingannya dalam Kitab Hukum Pidana Sipil, maka dianggap diancam dengan hukuman yang sama dengan hukuman bandingannya yang paling mirip kepada perbuatan pidana itu".

(2) Undang-undang No. 14 tahun 1970 tentang Kekuasaan Kehakiman:

- (a) Pasal 14 ayat (1) berbunyi sebagai berikut:
"Pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa dan mengadili suatu perkara yang diajukan dengan alasan bahwa hukum tidak/kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya".

- (b) Pasal 23 ayat (1) berbunyi sebagai berikut:
"Segala putusan pengadilan selain harus membuat alasan-alasan dan dasar-dasar putusan itu, juga harus memuat pasal-pasal tertentu dan peraturan-peraturan yang bersangkutan

atau sumber hukum tidak tertulis".

- (c) Pasal 27 ayat (1) berbunyi sebagai berikut:
"Hakim sebagai penegak hukum dari keadilan wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup".

- c. Dasar yang berorientasi ke Pembaharuan Hukum Pidana Nasional: Pasal 1 ayat (3) Konsep KUHP yang disusun Panitia Penyusus RUU KUHP Baru 1991/1992 berbunyi sebagai berikut:

"Ketentuan dalam ayat (1) tidak mengurangi berlakunya hukum yang hidup yang menentukan bahwa menurut hukum adat setempat seseorang patut dipidana walaupun dalam itu tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan".

Patut diketahui bahwa ketentuan Pasa; 1 ayat (3) di atas merupakan hal baru dalam KUHP bila telah disahkan menjadi undang-undang sebagai dasar belakunya hukum adat pidana di Indonesia. Sekalipun konsep itu sudah lama terfikirkan oleh Bangsa Indonesia. Karena telah sejak lama dituangkan di dalam Undang-undang No. 1 Drt. Tahun 1951.

- d. Resolusi Bidang Hukum Pidana Seminar Hukum Nasional ke-1 Tahun 1963:

- Resolusi butir IV:

"Yang dipandang sebagai perbuatan-perbuatan jahat tadi adalah perbuatan-perbuatan yang dirumuskan unsur-unsurnya dalam KUHP ini maupun dalam perundang-undangan lain. Hal ini *tidak menutup pintu bagi larangan perbuatan-perbuatan menurut Hukum Adat yang hidup dan tidak menghambat pembentukan masyarakat yang dicita-citakan tadi, dengan sanksi adat yang masih dapat sesuai dengan martabat bangsa*"

- Resolusi butir VII:

*"Unsur-unsur dalam Hukum Agama dan Hukum Adat
dijalinkan dalam KUHP"* (Barda Nawawi, 1995:89)

e. Dasar hukum yang bersifat subsidiaritas

Menurut Prof. Andi Zainal Abidin (1987: 99, 1995:77-78), menyatakan bahwa ada tiga hal penting (dasar yang penting, pen.) untuk mengetahui Hukum Adat pidana di Sulawesi Selatan yaitu:

- (a) *Lontara'* yang melukiskan secara tidak sistematis dan tidak lengkap peraturan-peraturan Hukum Adat Pidana abad ke-XV, jadi sebelum kedatangan islam. Sumber ini sangat perlu juga untuk memahami hukum yang asli dahulu kala,
- (b) *latoa*, yang disusun setelah orang-orang Sulawesi Selatan memeluk agama islam dan sebelum berkenalan dengan bangsa-bangsa Eropa,
- (c) Beberapa putusan Pengadilan Negeri ...

Demikian itulah beberapa dasar hukum berlakunya hukum adat pidana. Ada yang bersifat formal (dalam bentuk undang-undang) dan ada yang bersifat materiel, dan bahkan ada yang bersifat pernyataan-pernyataan, seperti resolusi-resolusi atau rumusan-rumusan.

2. KAJIAN DARI SISI ASPEK-ASPEK BUDAYA SIRI'

A. PENDAHULUAN

Bertitik tolak dari sekumpulan data dan fakta tentang *siri'* maka hemat penulis, bahwa "*siri'* merupakan kedalaman sikap budi yang dilandasi akal sehat dan perilaku positif yang bersifat interioritas. Kedalaman budi seperti itu tidak berberada di luar akal sehat perilaku positif". Betulkah ini mengandung unsur prevensi untuk mencegah terjadinya delik? Benar-tidaknya dapat dikaji melalui fakta-fakta yang ada.

Untuk sampai kepada maksud-maksud yang hendak dituju dalam penelitian ini, penulis gunakan tiga bentuk gerakan nilai-nilai budaya *siri'*, yaitu:

- (1) *Siri'* negatif dirubah menjadi *siri'* positif. Artinya kecenderungan melakukan perbuatan pidana atas dasar *siri'* berbalik menjadi kecenderungan perilaku untuk tidak melakukan tindak pidana;
- (2) Keseimbangan harga diri yang terganggu (*siri'* positif yang terkontaminasi dengan *siri'* negatif atas perbuatan orang lain) diupayakan untuk tidak menimbulkan peristiwa berdarah melalui suatu model resiprokasi (*reciproca-tion model*);

(3) Interaksi perilaku *siri'* positif ke dalam masyarakat yang ditampilkan oleh sosok figur sentral sebagai pemilik *siri'* positif yang tak dapat disangkal.

Dalam membicarakan hal-hal tersebut di atas maka perlu dilihat adanya keterkaitan antara hukum pidana dengan budaya hukum *siri'*. Untuk mengukur adanya keterkaitan keduanya, dapat dilihat pada aspek-aspek budaya *siri'*.

B. ASPEK-ASPEK BUDAYA SIRI' DAN IMPLIKASINYA

Pada analisis data penelitian ini, pembicaraan akan diarahkan kepada aspek-aspek budaya *siri'* yang bersifat negatif maupun yang bersifat positif. Hal ini dimaksudkan agar nampak jelas pembatasan-pembatasan, apabila aspek-aspek budaya *siri'* dikaitkan dengan tindak pidana. Tindak pidana tindak pidana itupun tidak dimaksudkan oleh penulis untuk melihat secara umum, tetapi hanya terbatas kepada tindak pidana pembunuhan dan tindak pidana pencemaran nama baik orang lain.

Jika norma-norma yang dilindungi dengan ancaman hukum pidana mengenai pelbagai kepentingan, seperti perbuatan-perbuatan yang membahayakan jiwa orang lain, perbuatan-perbuatan yang membahayakan kesusilaan, perbuatan-perbuatan yang mencemari

kerukunan di dalam kerukunan rumah tangga orang lain (mengambil istri orang lain, membawa lari anak orang lain tanpa hak) dan lain-lain, maka yang memberi corak yang khusus kepada hukum pidana dan budaya *siri* bukanlah muatan norma-norma di dalamnya semata tetapi penyebutan sanksi untuk memelihara norma-norma itu. Karena norma menjadi permasalahan bilamana ada suatu pencemaran terhadap norma-norma tersebut.

Menurut Tresna dalam bukunya *Azas-azas Hukum Pidana* (1959: 11-12), antara lain disebutkan bahwa terdapat tiga macam norma-norma hukum yang dapat memaksa (dapat diancam dengan pidana, pen), yaitu:

- a. "...norma agama. ...merupakan satu-satunya pedoman hidup bagi penganut-penganutnya, pedoman yang menentukan bagaimana mereka harus memelihara hidup kebathinannya. ...norma-norma agama merupakan dorongan yang besar bagi setiap orang untuk berbuat baik, dan menjadi hambatan yang kuat terhadap ajakan nafsu untuk berbuat sesuatu yang bertentangan dengan pelajaran agamanya.
- b. ... norma yang berdasarkan *rasa kesusilaan*, yaitu norma-norma yang berpangkal pada hati nurani. ...Norma-norma kesusilaan merupakan pedoman hidup yang tidak mudah diabaikan.
- c. Norma yang berdasar pada *rasa sopan santun*. Tidak jarang orang yang tak menganut agama atau yang tidak begitu mengindahkan kelaziman-kelaziman di dalam hidup kesusilaan, mengutamakan norma-norma sopan santun di dalam pergaulan hidupnya".

Telah berkali-kali penulis kemukakan bahwa

budaya *siri* bagi Bugis-Makassar adalah sesuatu yang sangat peka dan berharga tinggi (katakanlah seperti halnya dengan norma-norma yang disebutkan oleh Mr. Tresna di muka). Oleh sebab itu di samping nilai-nilai positifnya juga terdapat nilai-nilai negatif dalam arti, sering melahirkan problem-problem sosial yang melatari kasus-kasus pertumpahan darah di Sulawesi Selatan.

Dalam uraian Moein (1977 hal. 20) antara lain disebutkan bahwa "terhadap permasalahan *siri*", orang-orang Makassar dan Bugis tidak akan pernah mengenal kompromi". Seperti kata orang-orang Makassar, "bawakuji akkaraeng, mingka badi'ku tena nakkaraeng". Terjemahan bebas penulis, bahwa orang-orang Makassar sangat menaruh hormat kepada siapa saja sepanjang ia tidak merasa dicemari kehormatannya. Tetapi bila ia dipermalukan maka ia tidak mengenal siapa.

Bilamana ungkapan itu dijadikan sebagai tolok ukur, maka masalah esensialnya adalah tentang *kehormatan*. Yang dikehendaki adalah pemurnian kehormatan, terutama yang terganggu. Hal mana menurut hemat penulis, prinsip seperti itu terdapat di semua golongan suku/adat istiadat di Indonesia. Mungkin yang berbeda adalah ukuran pemurnian kembali kehormatan yang terganggu itu.

Bagi suku Bugis-Makassar, ukurannya adalah terletak pada hak-hak pribadi. Hak-hak pribadi itu meliputi kehormatan diri pribadi, kehormatan keluarga, kehormatan orang tua kandung, dan bahkan kehormatan agama dan bangsa.

Biasanya apabila keseimbangan itu terganggu di sekitar hak-hak pribadi tersebut, maka pada umumnya penyelesaian berakhir dengan peristiwa berdarah. Bilamana akal sehat mereka terganggu, seketika itu pula prinsip *siri'* itu muncul dengan sendirinya. Dan implikasinya pun sangat fatal. Sebagai contoh dapat dikemukakan, betapa kehormatan yang terganggu itu dapat berakibat fatal seperti yang dimuat dalam harian *Pedoman Rakyat* (sebuah surat kabar harian lokal di Sulawesi Selatan) pada tanggal 15 Maret 1997, yang menurunkan berita tentang kasus membawa lari istri orang dengan judul *Duel dengan Pembawa Lari Istri*. Dalam kasus itu dikemukakan bahwa pada tanggal 8 Januari 1989, Samir membawa lari istri Sewang. Dan selama ini tidak diketahui rimbanya. Tiba-tiba pada pertengahan Desember 1996, Sewang dengan tanpa diduga melihat Samir di Pasar Daya Ujung Pandang. Seketika itu pula Sewang meluap dendam kesumatnya yang terpendam selama kurang lebih 7 tahun ia derita. Singkat cerita, Sewang pun mengadakan perhitungan, akibatnya Samir tewas

di ujung badik Sewang.

Dalam acara review proposal penelitian tesis ini, I.S. Soesanto menitipkan sebuah permasalahan yang agak kritis dengan menyatakan bahwa "kelihatannya perkara pidana yang berlatar belakang *siri*", seolah-olah mempersempit hak wanita dan sebaliknya terlalu memprioritaskan hak-hak laki-laki. Sepertinya hanya laki-laki yang ingin menang sendiri atas diri wanita". Kurang lebih demikian titipan I.S. Soesanto. Sedikit tetapi kritis dan tetap menjadi perhatian penulis.

Dalam penelitian lapangan yang dilakukan penulis di Kabupaten Bone, Pengadilan Negeri Watampone pernah menangani sebuah perkara "Seorang wanita yang memotong kemaluan suaminya, karena si suami suka menghamburkan nafsu birahinya kepada wanita lain yang bukan istrinya. Kasus ini terjadi sekitar tahun 1969-1970 (Sumber informasi Pengadilan Negeri Watampone diperoleh saat penulis mengadakan penelitian lapangan di daerah ini pada bulan Nopember 1996).

Kasus di atas mungkin dapat menepis suatu asumsi bahwa budaya *siri* terlalu mendahulukan hak-hak kaum lelaki. Karena dalam kenyataannya, kaum wanita (seorang) pun dapat melakukan tindakan kepada kaum lelaki (suaminya), sebagaimana

kasus di atas sekalipun kasus itu terjadi sekitar tahun 1970-an.

Sekali lagi dikemukakan bahwa *siri'* negatif dapat muncul apabila aspek *siri'* positif bersentuhan dengan masalah kehormatan atau harkat dan martabat seseorang. Manusia siapapun, menurut penulis. Karena masalah harkat dan martabat atau harga diri banyak yang tidak dapat dijangkau oleh akal. Selain daripada itu *siri'* adalah milik semua manusia yang beradab di mana dan kapan saja.

Berkaitan dengan proposisi-proposisi di atas, maka penulis menilai bahwa letak permasalahan terjadinya delik atas dasar *siri'* negatif bukanlah semata-mata terletak pada sikap *siri'* negatif itu sendiri, tetapi juga terletak pada kausalitas terbentuknya sikap atau perilaku *siri'* yang negatif. Letak kausalitas terbentuknya sikap dan perilaku *siri'* tidaklah semata-mata dari pribadi selaku individu, tetapi justru yang paling berpengaruh adalah sikap masyarakat sebagai faktor eksternal, Terdapat kecenderungan faktor eksternal masyarakat sebagai faktor dominan yang mempengaruhi faktor internal individu untuk berperilaku *siri'* yang negatif. Dengan demikian terjadi ketidakseimbangan antara moral individu dan moral masyarakat. Ketidak seimbangan moral

individu dan moral masyarakat inilah yang sangat potensial untuk menimbulkan peristiwa pidana.

Agaknya apa yang dikemukakan di atas dapat dibandingkan dengan teori yang dikemukakan oleh *Smith* dan *Hogan* dalam bukunya *Criminal Law* (edisi 1988: 18-19), yang menyebutkan dua karakteristik terjadinya kejahatan, yaitu *public wrong* (ketidakadilan publik) dan *moral wrong* (ketidakadilan moral). Untuk jelasnya, pandangan tersebut selengkapnyanya dikutip sebagai berikut:

Characteristics of crime

1. A public wrong. It is, of course, possible to point certain characteristics which are generally found in acts which are crimes. They are generally acts which have a particularly harmful affect on the public and do more than interfere with merely private rights. Sir Carleton Allen writes: "Crime is crime because it consists in wrongdoing which directly and serious degree threatens the security or well-being of society and because it is not safe to leave it redressable only by compensation of the party injured".

(Ketidak-adilan publik (*public wrong*) merupakan kemungkinan yang mengacu kepada karakteristik yang pada umumnya terdapat dalam setiap bentuk kejahatan. Karakteristik - karakteristik mana pada umumnya mempunyai dampak yang sangat berbahaya (*harmful*) bagi masyarakat dan menginterferensi, mencampuri (*interfere*), secara berlebihan hak hak pribadi orang lain. Menurut *Sir*

Carlenton Allen yang dikutip Smith dan Hogan. "Kejahatan-kejahatan tetaplah kejahatan. Karena kejahatan meliputi juga perbuatan-perbuatan salah (*wrongdoing*) secara langsung dan serius (*seriouse*) menjamin atau mengancam terhadap ke-kemampuan masyarakat (*well-being*), dan karena meninggalkan kejahatan bukanlah jaminan (*is not safe to leave*), tetapi hanya sebagai kedok bagi kompensasi terhadap kelompok yang dirugikan).

"The second characteristic of crime which is usually emphasized is that they are acts which are morally wrong. As seen above the traditional attitude of the common law has been that crime are essentially immoral acts deserving of punishment. In the early days of the law when the number of crimes was relatively few and only the most outrageous acts were prohibited - murder, robbery, rape atc, this was no doubt, true. But now many acts are prohibited on the grounds of social expediency and not because of their immoral nature (1986: 19).

(Karasteristik kejahatan yang kedua ini kadangkala ditekankan (*emphasized*) bahwa tindakan-tindakan *kejahaatan* yang dilakukan yang secara moral adalah salah (*morally wrong*). Sebagaimana yang telah disebutkan, bahwa sikap tradisional terhadap kebiasaan-kebiasaan seperti itu, sejak awal dikatakan bahwa esensi utama kejahatan, adalah ketidak sopanan moral patut dipidana (*deserving of punishment*). Awal mulahukum (*In the early days of the law*) ketika urutan-urutan

kejahatan masih relatif kecil, hanya perbuatan-perbuatan yang sangat menyakitkan hati (*only the most outrageous acts*), adalah dilarang. Seperti membunuh (*murder*), perampokan (*robbery*) perkosaan (*rape*) dan lain-lain yang tidak dapat dipungkir kebenarannya. Akan tetapi sekarang banyak tindakan yang dilarang atas dasar keadaan sosial yang layak (*on the grounds of social expediency*) dan tidak karena kebiasaan kebobrokan moral yang dimilikinya).

Singkatnya bahwa karakter atau sifat kejahatan itu pada dasarnya meliputi kesalahan menurut penilaian masyarakat dan kesalahan menurut moral. Artinya, baik secara moral maupun ukuran masyarakat, perbuatan mana dinilai sebagai perbuatan jahat.

Menurut Prof. Barda Nawawi, keduanya itu disebut *Recht delict* atau *intrinsically wrong*. Selain itu dikenal pula istilah *Wets delict* atau yang disebut *legally wrong* = pelanggaran menurut hukum tertulis.

Baik ketidak adilan publik (a public wrong) maupun ketidak adilan moral (a moral wrong) sebagai karakteristik kejahatan (tindak pidana) nampak bahwa begitu luas sekali peluang-peluang yang terbuka untuk terjadinya suatu delik. Smith dan Hogan memperkirakan karakteristik kejahatan dapat mencakup semua aspek kehidupan masyarakat. Adakah ini dapat terdeteksi (teratasi) baik hukum pidana maupun buda-

ya *siri*'. Sulit sekali bagi penulis untuk menarik suatu kesimpulan tanpa melalui suatu penelitian yang lebih intensif.

Berkaitan dengan luasnya cakupan karakteristik kejahatan seperti itu, sebagai umpan balik, Barda Nawawi mengemukakan batas-batas kemampuan hukum pidana yang dirangkumnya dari beberapa pendapat para ahli hukum pidana sebagai berikut: ..."dapat diidentifikasi sebab-sebab keterbatasan kemampuan hukum pidana dalam menanggulangi kejahatan, yaitu:

- a. Sebab-sebab kejahatan yang demikian kompleks berada di luar jangkauan kemampuan hukum pidana;
- b. Hukum pidana hanya merupakan bagian kecil (sub-sistem) dari sarana kontrol sosial yang tidak mungkin mengatasi masalah kejahatan sebagai masalah kemanusiaan dan kemasyarakatan yang sangat kompleks (sebagai masalah sosiopsikologis sosio-politik, sosio-ekonomi, dan sosio-kultur dan lain-lain);
- c. Penggunaan hukum pidana dalam menanggulangi kejahatan hanya merupakan "*kureren am symptom*", oleh karena itu hukum pidana hanya merupakan "pengobatan simtomatik" dan bukan pengobatan "kausatif".
- d. Sanksi pidana merupakan "*remedium*" yang mengandung sifat kontradiktif/paradoksial dan mengan-

- dung unsur-unsur serta efek samping yang negatif;
- e. Sistem pemidanaan bersifat fragmenteir dan individual/personal, tidak bersifat struktural/fungsional;
 - f. Keterbatasan jenis sanksi pidana dan jenis perumusan pidana yang bersifat kaku dan imferatif;
 - g. Bekerja/berfungsinya hukum pidana memerlukan sarana pendukung yang lebih bervariasi dan lebih menuntut biaya tinggi (Barda Nawawi dalam majalah Masalah-Masalah Hukum, Fakultas Hukum UNDIP, edisi khusus, 1997, dengan judul *Batas-Batar Kemampuan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*).

Terlepas batas-batas kemampuan hukum pidana, terhadap identifikasi yang pertama, pada dasarnya sama dengan apa yang dikemukakan oleh G. Peter Hoefnagels dalam bukunya *"The Orther Side of Criminologi"* antara lain disebutkan: *The big problem of crime and punishment are therefore outside criminal law. They are extrajudicial, are found in the reality of men and society. ... The big problem of crime and punishment exist in actual fact before criminal law takes action*". (dilihat Barda Nawai, pidato pengu-kuhan sebagai Guru Besar Fakultas Hukum Undip, dengan judul *"Beberapa Aspek Pengembangan Ilmu Hukum Pidana"*, Juni 1994).

Selain daripada itu, Barda dalam pidato pengukuhannya (hal.16) juga mengemukakan, bahwa ... "dilihat dari sudut kebijakan hukum pidana, dalam arti kebijakan mengoperasionalisasikan/memfungsionalisasikan hukum pidana, masalah sentral atau masalah pokok sebenarnya terletak pada masalah seberapa jauh kewenangan/kekuasaan mengatur dan membatasi tingkah laku manusia (warga masyarakat/pejabat) dengan hukum pidana ini. Ini berarti masalah dasarnya terletak di luar bidang hukum pidana itu sendiri, yaitu pada masalah hubungan kekuasaan/hak negara dan masyarakat. Di sini, Prof. Barda melihatnya dari sisi normatif.

Jadi baik prof. Barda, Hoefnagels, Smith, dan para ahli hukum pidana lainnya sependapat bahwa permasalahan hukum pidana adalah sangat luas. Sehingga langkah-langkah dengan sarana hukum pidana sebagai instrumen preventif wajar jika dinyatakan terbatas. Dengan keterbatasan sarana hukum pidana sedemikian rupa, maka sangat tepat apa yang dikemukakan oleh Prof. Satjipto Raharjo dalam *Harian Cempaka*, 4 Juni 1997 dengan judul *Bukan Cuma Tugas Pemerintah*, menyatakan, bahwa "*Penanganan* (termasuk pemberian sanksi hukum) kepada pelaku kasus perkosaan (termasuk tindak pidana pembunuhan dan pencmaran nama baik orang lain, pen.) selama ini hanya bertumpu pada pemerintah saja. Padahal sebenarnya, itu merupakan tugas bersama, baik pemerintah maupun

masyarakat.

Masih dalam kaitan dengan penggunaan sarana hukum pidana sebagai tindakan prevensi delik. Bentham menyatakan, bahwa "*punishment ought not be inflicted if it is groundless, needless, unprofitable, or inefficacious*" (pidanaan seharusnya tidak digunakan (dibaca: jangan digunakan, pen) apabila tidak berdasar, tidak dibutuhkan, tidak menguntungkan, atau tidak efektif). Dapat dilihat kembali pada Muladi dan Barda (1992: 132).

Selain dari pada itu, Muladi dan Barda juga mengutip pandangan dari *Herbert L. Packer* dalam bukunya *The Limits of The Criminal Sanction* (1968: 384-388) yang juga dijadikan daftar pustaka dalam penelitian ini antara lain disebutkan dalam suatu kesimpulan sebagai berikut:

1. Sanksi pidana sangatlah diperlukan; kita tidak dapat hidup, sekarang maupun di masa yang akan datang tanpa pidana. (*The criminal sanction is indispensable; we could not, now or in the foreseeable future, get along without it*).
2. Sanksi pidana merupakan alat atau sarana terbaik yang tersedia, yang kita miliki untuk menghadapi kejahatan-kejahatan atau bahaya besar dan segera serta untuk menghadapi ancaman-ancaman dari bahaya. (*The criminal sanction is the best available we have for dealing with gross and immediate harms and threats of harm*).
3. Sanksi pidana suatu ketika merupakan "penjamin yang utama/terbaik" dan suatu ketika merupakan "pengancam yang utama" dari

kebebasan manusia. Ia merupakan penjamin apabila digunakan secara hemat, cermat, dan secara manusiawi; ia merupakan pengancam apabila digunakan secara sembarangan dan secara paksa. (*The criminal sanction is at once prime guarantor and prime treatener of human freedom. Used providently and humanely it is guarantor; used indiscriminately and coercively, it is threatener*).

Terlepas dari bagaimana cara menggunakan hukum pidana itu sebagai sarana preventif, Kent menyatakan, bahwa "Setiap pelanggaran (apakah itu pelanggaran terhadap norma susila atau norma hukum sebagai yang tertera di dalam undang-undang) selayaknya dihukum. Karena menurut Kent, bila hukuman tiada, maka tiada artinya lagi bagi manusia untuk tetap tinggal di dunia ini. Demikian tulisan Frenz Exner dalam tulisannya yang berjudul "*Punishment*" (artikel diperoleh dari Prof. Ruslan Saleh, 1997, Pascasarjana UNDIP Semarang).

Mengingat betapa sarana hukum pidana hanya punya kemampuan tetapi kemampuan itu sungguh sangat terbatas bila dikaitkan dengan problematika hukum pidana sedemikian luas; seluas dengan permasalahan di dalam masyarakat itu sendiri. Terlebih lagi adanya opini masyarakat (*public opinion*) yang seolah-olah menyatakan, bahwa sesungguhnya masalah kejahatan atau masalah hukum pidana hanya tugas dari aparat hukum semata (polisi, jaksa, dan hakim), maka bertambahlah beban yang harus dipikul oleh hukum pidana.

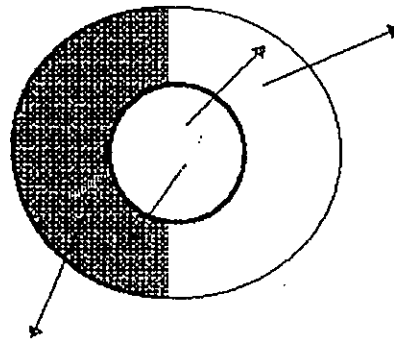
dan pemidanaan sebagai satu-satunya instrumen pelindung keresahan masyarakat dari gangguan kejahatan. Adakah budaya *hukum siri* dapat menjadi pelengkap atas kekurangan-kekurangan dan keterbatasan-keterbatasan di dalam tubuh hukum pidana yang hanya mampu menjadi sarana "pengobatan simptomatik"? Adakah budaya hukum *siri* mampu menjadi sarana pengobatan yang bersifat kausatif? Sangat sulit bagi penulis untuk menarik suatu prediksi apalagi menarik suatu kesimpulan.

Akan tetapi, untuk menganalisa apa yang menjadi titik berat permasalahan di atas, penulis mencoba menyingkap apa yang terdapat di balik kenyataan-kenyataan yang ditemukan di lapangan. Sekaligus menjadi pisau analisis terhadap permasalahan di atas.

Penulis memulainya dari data sampel pertama dengan tetap mengacu kepada kategori-kategori variabel yang telah ditetapkan semula. Demikian pula halnya dengan sampel kedua, juga tetap berpatokan kepada kategori-kategori variabel yang ditetapkan semula. perlu diingat bahwa metode penarikan sampel dilakukan dengan cara purposif.

bel yang telah ditetapkan semula. Demikian pula halnya dengan sampel yang kedua juga tetap berpatokan kepada katagori-katagori variabel yang telah ditetapkan semula. Perlu diingat kembali bahwa metode penarikan sampel dilakukan dengan cara purposif

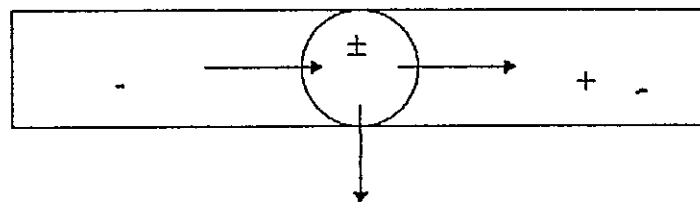
Gambar A.:



Setelah melakukan tindak pidana dan sesudah menjalani hukuman penjara.

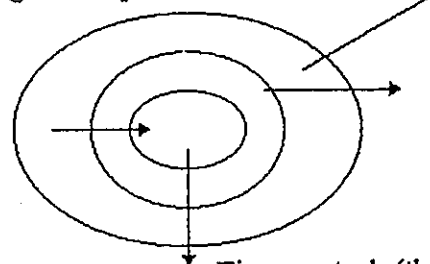
Sebelum melakukan tindak pidana atas dasar siri'

Gambar B:



Gambar ini menunjukkan proses perubahan sikap siri' negatif menjadi sikap siri' positif, yang diantarai oleh sikap plus minus.

Gambar C figur siri' positif



masyarakat luas

masyarakat elit (the rulling class).

Figur sentral (the social actor).

Penjelasan Gambar A

Awal mula kehidupan manusia tidak ada satu pun teori yang menjelaskan bahwa si A atau si B kelak akan menjadi seorang penjahat atau menjadi orang baik. Sekalipun Lamberosso pernah mengeluarkan teori mengenai ciri-ciri seorang penjahat. Teori Lamberosso agaknya berbeda dengan teori sosiologi. karena teori sosiologi menyatakan bahwa perilaku seseorang sangat ditentukan oleh milieu di mana ia berada.

Pada gambar A, penulis bermaksud menerangkan bahwa pada mulanya perilaku manusia belum dipengaruhi oleh perilaku yang baik atau buruk menurut kehendaknya. Tetapi setelah ia mengenal masyarakat maka pada waktu itulah sikapnya mulai terbentuk. Lingkungan di mana si A atau B hidup sangat menentukan pembentukan wataknya. Konstruksi sosial yang dapat juga disebut sebagai watak masyarakat itu pada dasarnya hanya ada dua, yaitu baik dan buruk. Baik tidaknya perilaku A atau B sangat ditentukan oleh masyarakat di mana ia berkecimpun.

Watak masyarakat di sini dapat juga diartikan sebagai kebiasaan-kebiasaan atau budaya. Watak atau budaya suatu masyarakat adalah simbol dari kehidupan masyarakat itu sendiri. Misalnya, *siri* bagi Bugis-Makassar. Teori seperti ini juga dijelaskan oleh Donald Black dalam bukunya *The Behavior of Law* (1976 hal. 61), antara lain disebutkan bahwa:

Culture is the symbolic aspect of social life, including expressions of what is true, good, and beautiful ... It thus includes ideas about the nature of reality, whether theoretical or practical, and whether supernatural, metaphysical, or empirical.

Jadi pada dasarnya Black pun mengakui, bahwa kultur itu merupakan aspek yang simbolik dalam kehidupan masyarakat. Aspek yang simbolik ini biasanya dijadikan ukuran untuk mengetahui apakah yang disebut kebenaran, kebaikan, serta keindahan. Bagi etnis Bugis-Makassar, kunci simbolnya adalah *budaya siri'*.

Penjelasan gambar B

- (-) Pada gambar di atas terlihat tiga macam simbol yang digunakan yaitu simbol negati (-), simbol pelus-minus (+), dan simbol positif (+).

Simbol negatif (-) menunjukkan suatu perilaku yang menyimpang yang pada setiap saat dapat menginterfensi dan mendominasi akal-akal sehat seseorang, membuat ia cenderung melakukan tindak pidana pembunuhan atau pencemaran nama baik orang lain. Seseorang yang berada pada posisi seperti itu, tidak terlalu mempersoalkan apa yang akan terjadi kemudian hari pada dirinya bila ia melakukan tindak pidana seperti di atas. Ia selalu menilai bahwa harga diri harus dibela. Dan akan halnya dengan berbuat karena hanya

sekedar unjuk kekuatan, berbeda sama sekali dengan pembuat yang melakukan perbuatan karena *siri'*. Pelaku yang berbuat bukan karena atas dasar *siri'* lebih dapat disebut sebagai katagori menurut teori Lambrosso. Pembuat delik atas dasar *siri'* hampir dapat disebut bahwa "*tidak ada hubungannya dengan teori Lambrosso*".

Demikian juga, jika yang pertama ingin disebut sebagai pembuat delik menurut teori tradisional, hemat penulis, juga bukan. Karena ia sama sekali pada mulanya tidak ada keinginan untuk melakukan perbuatan pidana. tetapi oleh karena dia dicemari nama baiknya, maka dia melakukan tindak pidana. Jadi ada kausa sebelum kausa suatu akibat yang lain. Sedangkan pembuat yang melakukan tindak pidana bukan karena *siri'*, sepertinya lebih mendekati kepada teori kejahatan warungan. Karena apa yang dilakukannya tidak berlatar belakang apapun (termasuk budaya *siri'*), kecuali memang sudah menjadi kebiasaannya. Jenis perilaku seperti ini sulit untuk ditangkal kecuali dengan sarana penal yang khusus bilamana tindakannya sangat berat.

- (+) Proses ini terjadi pada saat seseorang keluar dari Lembaga Pemasyarakatan. Artinya yang bersangkutan sudah bebas dari menjalani hukuman

dengan menghabiskan masa tahanan sesuai dengan yang dijatuhkan kepadanya. Proses keluarnya sesuai dengan prosedur. Karena ada juga narapidana keluar dari L.P. tidak secara prosedural. Misalnya melarikan diri dan lain-lain.

Sosok seorang eksnarapidana yang berlatar belakang *siri'*, kembali ke masyarakat dengan penuh tanggung jawab. Bahwa apa yang dilakukannya yang membuat dia harus dipidana dengan pidana penjara, menurut anggapannya adalah sesuatu yang benar dan tak perlu disesali. Persoalan, ia dinilai oleh masyarakat bahwa dia pernah melakukan tindak pidana (pembunuhan) misalnya, bukan sesuatu yang berat baginya. Yang berat baginya adalah menampilkan kembali kepercayaan dirinya, sekaligus berusaha meyakinkan kepada masyarakat bahwa apa yang diperbuatnya adalah benar menurut kausa sekalipun salah menurut hukum tertulis. Jadi bukan hanya benar menurut keyakinan pribadinya tetapi ia juga berusaha untuk membangkitkan keyakinan, benar menurut masyarakat. Ia tidak terfokus kepada akibat perbuatannya, tetapi terfokus kepada masalah yang dihadapinya. Karena menurut keyakinannya, perbuatan pidana yang harus dilakukan atas dasar *siri'*, lalu menjalani pidana penjara, itu

adalah imbalan yang harus diterima.

Nampaknya, mengakomodasikan sikap/perilaku seperti cara pengembalian atau pemulihan keseimbangan harkat dan martabat yang terganggu seperti itu lewat suatu tindak pidana, seolah-olah ia juga berhak melakukan suatu penghukuman sebagaimana layaknya seorang hakim memutuskan perkara. Seolah-olah mendapat kekuasaan yang legitim sebagaimana layaknya suatu institusi yang mempunyai legitimasi untuk menghukum. Dengan demikian, hemat penulis, bahwa sekalipun pendistribusian pemulihan keseimbangan harga diri lewat suatu tindak pidana, di sini ada benarnya. Tetapi keputusan pembuat delik seperti itu tidak memiliki ruh secara legitim menurut undang-undang.

Dalam suatu opini, mungkin tindakan/sikap seperti itu sama dengan asas "*error iuris*" atau "*mistake of law*" (Barda Nawawi, 1990: 102-107), yakni suatu perbuatan dapat tidak dipidana apabila kesesatannya didasarkan kepada alasan-alasan yang masuk akal (*reasonable grounds*). Untuk melihat apakah pendistribusian perilaku *siri* negatif sesuai dengan unsur-unsur *error iuris* atau *mistake of law*, maka kita harus memeriksa unsur-unsur *error iuris* itu.

Untuk jelasnya pasal 15 (KUHP Korea), *Mistek of Fact* sebagai berikut:

- (1) Criminal conduct in ignorance of facts which aggravate a crime is not punishable is the aggravated crime.

Pasal 16 (*Mistake of Law*):

Where a person commits a crime in the belief that his conduct does not constitute a crime under existing law, *he shall not be punishable only when his mistake is based on reasonable grounds.*

Jika dikaji secara logis terjadinya tindak pidana yang berlatar belakang *siri'*, itu karena ada kausa yang mendahului yang sangat tidak diterima oleh akal sehat bagi si pelaku. Faktor ini disebut faktor eksteren yang membuat cemar pada keseimbangan harga diri (*siri'*). Kausa ini seandainya tidak ada, maka tidak akan pernah terjadi tindak pidana yang dilakukan pembuat. Kausa mana tidak dapat diterima oleh akal sehat seseorang yang memiliki *siri'*. Lalu jika dan hanya jika dengan hubungan sebab-akibat yang tak dapat diterima secara akal sehat itulah membuat si pelaku (dibaca: korban *siri'*) melakukan tindak pidana.

Error iuris menghendaki adanya suatu alasan-alasan yang masuk akal (*reasonable ground*). Selain daripada itu dikenal pula asas "*error facti*" perbuatan mana tidak dipandang sebagai

perbuatan yang dilakukan dengan kesengajaan. Jadi si pembuat tidak dapat dipertanggung jawabkan dan oleh karenanya tidak dapat dipidana. Demikian prinsip yang dianut oleh konsep KUHP Baru, Pasal 41. Dapat juga dilihat dalam, Barda Nawawi (1990: 93), sebagai perbandingan dari KUHP Thailand Pasal 59, pragraf 3.

Pasal 41 ayat (1) Konsep KUHP Baru (rumusan 1991/1992) antara lain berbunyi sebagai berikut

"Dalam hal pembuat tidak mengetahui atau sesat mengenai keadaan yang merupakan unsur tindak pidana atau dalam hal pembuat berkeyakinan bahwa perbuatannya tidak merupakan tindak pidana, maka tidak dipidana, kecuali ketidaktahuannya, kesesatannya, atau keyakinannya patut dicelakan kepadanya".

Nampaknya ketentuan di atas bersiafat *ekseptional* (pengecualian). Jadi mengandung unsur pengecualian tetapi menguntungkan bagi si pembuat.

Terlepas dari itu, baik pula dikemukakan suatu ilustrasi dari *Frenz Exner*, dalam tulisannya yang berjudul "*Punishment*", hal 167 (artikel diterima dari Prof Ruslan Saleh, 1997, sebagai bahan Kapita Selekta Hukum Pidana Pasca sarjana Program Ilmu Hukum UNDIP Semarang). Dalam artikel itu disebutkan sebagai berikut:

"... 'A punishes B' if, and only if, the

following conditions are fulfilled:

- 1. A inflicts harm on B*
- 2. as an expression of his disapproval of something B has done*
- 3. intending that B shall perceive it as harm, and*
- 4. without the act having the character of personal equital".*

(A dapat memidana B, jika dan hanya jika terdapat kondisi yaang mendukung dan memenuhi persyaratan sebagai berikut:

1. apabila A .menyebabkan kerugian bagi B
2. sebagai suatu bentuk pernyataan pencelaan yang dilakukan B,
3. dengan maksud bahwa akan merasakan hal itu sebagai suatu kejahatan (kerugian)
4. tanpa mempunyai (memperlihatkan) tindakan (karakter) yang wajar secara personal).

Pengertian tersebut membedakan antara bentuk pembedaan dengan bentuk balas dendam, kompetisi dan restitusi (ganti rugi). Namun terdapat beberapa pembatasan kasus yang memiliki kesamaan, seperti bentuk transferya dapat dilakukan dengan bentuk pembedaan maupun dengan bentuk lainnya. Kombinasi antara pembedaan dan ganti kerugian, serta pembedaan dan balas dendam dalam praktik sering terjadi.

Akan halnya dengan pembuat yang melakukan

tindakan karena *siri* pada kondisi *plus-minus*, ia pun berusaha untuk menghindari pengulangan perbuatan pidana sebagaimana yang dilakukannya pada masa yang lalu. Proses perubahan seperti ini sudah mencakup perubahan *siri* negatif menjadi *siri* positif (akan dijelaskan secara tersendiri).

Akan tetapi pada sisi lain rupanya masih tersimpan rasa was-was dan rasa curiga atas kemampuannya untuk menghindari pengulangan perbuatan pidana. Sebab ia selalu khawatir jika masih ada rasa dendam dari pihak korban. Tindakan balasan inilah yang selalu menghantui perasaannya, tetapi bukan sesuatu yang membuat ia untuk bertindak secara agresif.

Kembali kepada masalah bagaimana budaya *siri* negatif mempunyai implikasi-implikasi baik sifatnya individual maupun sifatnya yang lebih luas daripada sekedar orientasi individual (*individual oriented*), katakanlah sekedar perlindungan dan harkat martabat diri pribadi atau keluarga, ternyata dampaknya bisa lebih meluas. Misalnya, ke masalah politik.

Berdasarkan fakta-fakta pada masa yang lalu ternyata budaya hukum *siri'* tidak hanya berorientasi kepada perlindungan harkat dan martabat diri pribadi, tetapi juga dapat mencakup lebih luasa daripada itu, yaitu dapat berdampak ke masalah politik. Pencemaran atas harkat dan martabat terhadap *nilai-nilai siri'* dapat melahirkan konflik pada aspek politik, seperti peperangan dan sebagainya.

K.H. Abdul Muin Yusuf, seorang ulama besar dan budayawan Sulawesi Selatan, yang berdomisili di Ujung Pandang, saat ditemui penulis pada tanggal 15 Desember 1996, ia berkata: peperangan yang terjadi antara Kerajaan Bone dan Kerajaan Gowa dimasa pemerintahan Sultan Hasanuddin, itu karena *siri'*. Pasalnya, Sultan Hasanuddin, Raja Gowa pada abad ke-17, mengawini adik kandung raja Bone tanpa persetujuan dari Raja Bone. Akhirnya terjadilah perang saudara antara kerajaan Bone dan kerajaan Gowa pada waktu itu.

Apa yang dikemukakan oleh KH. Abdul Muin Yusuf yang menyatakan, bahwa budaya *siri'* dapat menjurus kepada konflik politik, diperkuat oleh data yang dikemukakan oleh Rahman Rahim (1992: 2-3), antara lain disebutkan bahwa: "Sekitar tahun 1543, Anthonio de Payvo, seorang pedagang kaya raya dari Portugis yang mendarat di Pare-Pare berhasil mengr Kristenkan Raja Bugis di Suppa, *La Makkerawie* sekeluarga. Setelah memeluk agama kris-

ten Raja Suppa diberinama *Don Luis*. Kemudian de Payvo mengkristenkan pula Raja Siang di Pangkajene. ... Tak lama kemudian usaha pengkristenan ini patah di jalan karena seorang perwira Portugis, Juan de Eredia membawa lari anak gadi Raja Suppa naik ke kapal. Lalu Tuan Pendeta, Peter Viegov cepat-cepat mengembangkan layar kapal menuju Malaka, karena orang Bugis mengejar dengan hunusan senjata untuk membunuh orang-orang Portugis. Afiliasi atau penerimaan *siri'* seperti ini mirip sekali dengan *siri' koneksi* dari visi antropolog sebagaimana yang dikemukakan oleh A. Anthon, seorang antropolog dan budayawan dari Palopo Luwu.

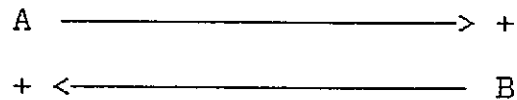
(+) Simbol ini memberikan pemahaman kepada kita, bahwa aks terpidana yang sudah kembali ke masyarakat benar-benar diterima oleh masyarakat sekitarnya. Segala luka yang telah lama berlalu sudah dilupakan oleh orang-orang sekampungnya. Ia tidak lagi dianggap sebagai orang yang pernah melakukan pembunuhan dan lain-lain. Tetapi benar-benar sudah menyatu dengan warganya. Ini berarti terjadi suatu resiprokasi antara masyarakat dengan eks napi dalam arti yang positif. Mengapa dikatakan terjadi suatu reciprokasi? Karena kondisi menunjukkan adanya hubungan timbal balik antara satu dengan yang lain (dalam hal ini eks narapidana dengan masyarakat sekitarnya). Resiprokasi menurut E. Durkheim ada-

lah "*a situation of give and take between two parties*" (atrikel diterima dari Prof. Ruslan Saleh dengan judul *Reciprocation and Alokation*, 1997:3, Program S2 Ilmu Hukum UNDIP Semarang). Jadi menurut Durkheim, resiprokasi adalah suatu situasi yang menunjukkan adanya hubungan timbal balik antara dua orang atau lebih (satu kelompok dengan kelompok yang lain).

Terbentuknya *siri'* positif bagi eks narapidana yang dijalani melalui hubungan timbal balik seperti itu merupakan keberuntungan hukum pidana. Karena gambaran perilaku sosial seperti itu menunjukkan tercapainya tujuan hukum pidana. Karena perilaku *siri'* positifnya menjadi stereotip sekaligus semangat baginya yang bermata pedang dua. Mata pedang yang satu menjadi kontrol bagi sikap dan perilaku untuk dirinya, sedangkan mata pedang yang lain menjadi kontrol bagi masyarakat lainnya. Setidaknya, pengaruh *siri'* positi dan hukuman yang pernah dijalani mempengaruhi orang yang tidak jahat yaitu warga masyarakat untuk mentaati norma-norma kemasyarakatan sebagaimana yang dikemukakan oleh Tresna pada uraian terdahulu.

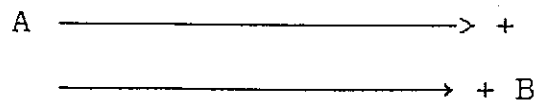
Nilai positif atau niat baik untuk merubah *siri'* negatif menjadi *siri'* positif disebut "*motivasi*", dan penerimaan masyarakat atas niat baik

dari perubahan itu disebut "*bantuan*". Seolah-olah ada hak dan kewajiban dalam jalinan hubungan timbal balik itu. Ekspresi dapat dilihat gambar (1):



Gambar di atas menunjukkan terjadinya suatu *take and give* sebagaimana yang dikemukakan oleh Durkheim, namun tetap ada titik perbedaannya. Titik perbedaan itu terletak pada proses terjadinya penerimaan hubungan timbal balik tersebut. Seorang eks terpidana yang keluar ke masyarakat ternyata tidak secara otomatis diterima oleh masyarakat. namun melalui ukuran tersendiri. Ukuran ini dimiliki oleh masyarakat, tetapi si eks terpidana itu yang melakukan. Dalam bab tentang metode penelitian disebut ukuran variabel.

Perilaku *siri'* positifnya selalu dikondisikan dengan lingkungan sekitar, tak pelak lagi dia pun harus menjadi distributor pada sikapnya sekaligus menjadi *recipient*. Artinya, di satu sisi ia selalu berusaha untuk mendistribusikan keinginan *siri'* positifnya, tetapi pada sisi lain justru harus rela menjadi *recipient* atas tata tertib sosial di mana ia ingin mentransper perilaku positifnya (ekspresinya dapat dilihat gambar 2):



Doktrin kebiasaan tidak mengikat A sebagai pemilik distribusi sikap *siri'* positif, tetapi ia yang sengaja mengikatkan diri ke dalam doktrin kebiasaan itu. Di sini pula perbedaan antara penulis dengan konsep Durkheim pada ekspresi yang sama, tetapi A secara otomatis terikat pada doktrin yang ada pada masyarakat B. Durkheim melihatnya bahwa A mempunyai ikatan yang bersifat "*harus*" kepada B. Jadi sangat dogmatis. Padahal dalam perubahan *siri'* negatif ke *siri'* positif sifatnya adalah kesadaran. Jadi tidak dogmatis.

Keadaan seperti di atas menjelaskan kepada kita bahwa sistemnya tidak dimulai dari prinsip-prinsip hukum tetapi langsung kepada kaedah-kaedah konkrit. Kaedah konkritnya adalah, bahwa "tidak mungkin terjadi suatu transfer suatu perilaku positif *siri'* (lihat gambat 1) bilamana distributor *siri'* positif dan karakteristik yang diinginkan oleh masyarakat berbeda". Contohnya, A sebagai eks napi. Setelah beberapa tahun keluar dari L.P. (menjalani hukum secara penuh), suatu ketika ia dicaci maki oleh orang lain dan bahkan diajak berduel untuk bakutikam tetapi ternyata A dengan penuh bijaksana menolak ajakan itu seraya berkata "perbuatan itu

tidak baik". Artinya, A tetap memperlihatkan komitmen sikap dewasa *siri'* positifnya. Contoh kejadian seperti ini dapat dilihat pada data sampel pertama atau gambar 2 di atas.

Dalam kondisi seperti itu (data sampel pertama) adalah sungguh luar biasa kemampuannya untuk menahan *siri'* negatifnya. Sesuatu yang tak mudah diterima oleh akal sehat yang masih ambivalen, kecuali dengan mental yang matang. Dapat dibayangkan betapa *siri'* positif yang demikian itu menjadi kontrol pada diri' seseorang eksnarapidana pembunuhan seperti La Sappe misalnya, mampu menangkak terjadinya pengulangan peristiwa berdarah yang sudah pernah dialaminya. Singkatnya, adalah "budaya *siri'* positif bekerja dan berproses secara bersama-sama dengan aturan-aturan hukum pidana". Bekerja dan berproses secara bersama-sama berarti keduanya (dibaca: budaya *siri'* dan hukum pidana) berada pada posisi yang saling melengkapi dan menguntungkan. Mungkin hal ini belum pernah terfikirkan para hakim dalam pengambilan putusan suatu kasus pidana. Sehingga dalam putusan terkadang memberatkan pihak terdakwa. Padahal tujuan utama pembedaan adalah pembinaan dan bukan penjeraan. Itulah sebabnya di Pengadilan Negeri Sungguminasa, menurut pengakuan dari, seorang

hakim seniornya, Andi Zainal Abidin, menyatakan bahwa "di Pengadilan Negeri Sungguminasa, nilai-nilai *siri*" dijadikan dasar pertimbangan dalam setiap perkara pembunuhan atau pencemaran nama baik orang lain, atas dasar konvensi, dan menjadi kaidah namun bukan merupakan norma hukum, karena tidak tertuang dalam suatu undang-undang". Menurutnyalagi, tidak jarang suatu putusan pengadilan terhadap perkara pembunuhan yang berbuntut dengan tindak pidana berikutnya, karena ketidakpuasan pihak terdakwa atau terpidana.

Dalam konteks yang lebih luas, Prof. Satjipto Rahardjo (1977: 112), antara lain mengemukakan:

"Apabila kita termasuk dalam aliran yang menganut pendapat, bahwa membicarakan persoalan hukum itu senantiasa harus dikaitkan pada basis sosial di mana hukum itu bekerja, maka tidak pelak lagi sebagaimana dialami oleh masyarakat Indonesia dewasa ini memang menimbulkan persoalan-persoalan yang menarik untuk dikaji bersama. Masa transisi itu menimbulkan perubahan dalam masyarakat serta nilai-nilai yang dihayati oleh masyarakat yang pada gilirannya mempengaruhi pula sikap-sikap serta tingkah laku mereka".

Penulis akui bahwa apa yang dibicarakan oleh Prof. Satjipto di atas adalah dalam konteks "transisi" yang lebih luas. Dan di samping itu, Satjipto membicarakannya dalam konteks "*pergerakan hukum dalam mengaitkan diri dengan keadaan yang berubah itu*". Sementara penulis menyoroatnya dari

sisi "perkaitan nilai-nilai budaya *siri'* positif yang dibawakan oleh seorang bekas narapidana ke dalam hukum pidana". Tetapi baik Prof. Satjipto maupun penulis sendiri, keduanya tetap berpijak kepada satu landasan, yaitu penghayatan nilai-nilai oleh warga masyarakat yang pada akhirnya mempengaruhi pola sikap serta tingkah laku masyarakat.

C. ASPEK BUDAYA *SIRI'* POSITIF

Penjelasan gambar C

Aspek budaya *siri'* yang positif dapat juga dikatakan sebagai *mitigasi* atau filter yang membatasi perilaku *siri'* negatif untuk tidak terjadinya suatu delik. Visi *siri'* positif ini yang tidak banyak diduga orang selama ini. Banyak persepsi (baik orang-orang Bugis-Makassar maupun orang di luar orang-orang Bugis Makassar) yang menilai bahwa *siri'* bagi etnis Bugis-Makassar adalah pertumpahan darah. Padahal justru tidak demikian. Aspek *siri'* positif inilah yang akan meluruskan persepsi yang keliru itu. Bahkan aspek *siri'* positif inilah yang dimaksudkan oleh penulis sebagai *langkah-langkah prevensi terhadap delik*. Dan langkah-langkah prevensi delik ini akan dibiarkan setelah pembicaraan kita mengenai aspek *siri'* positif ini.

Syeh Yusuf. seorang sufi terkenal bukan hanya di Indonesia, tetapi juga di luar negeri hingga ke Madagaskar, ketika hendak mengawini anak gadis Raja Gowa, lalu ia berkata "*Siri`ka ampurusu naiki punna tena ku-sufi*" [bahasa Makassar yang artinya, "saya malu menaiki tangga (melamar anak gadis sang Raja) jika saya tidak atau belum sufi]. Demikian hasil wawancara penulis dengan Andi Makmun, Kepala Musium *Balla Lompowa Gowa* di Sungguminasa pada 1 Nopember 1996.

Sikap (*attitude*) seperti yang dimiliki oleh Syekh Yusuf disebut *matanre siri namaraja siri`* (Bugis), artinya orang yang mempunyai perasaan harga diri yang teramat mulia di kalangannya. Bagi orang yang tinggi kadar *siri`*-nya seperti Syekh Yusuf itu, bias pribadinya terhadap masyarakat sangat berbeda bias pribadi orang-orang yang memiliki kadar *siri`* simbol belaka. Pembiasaan sikap (*attitude*) yang dimiliki seorang aktor sosial (*soscial actor*) seperti Syekh Yusuf mengalokasikan tindakannya dengan penuh nalar dan logika. Sasaran tindakannya bukan hanya ditujukan kepada *strategi* tetapi juga kepada norma-norma (norma agama, norma susila, dan norma etika sosial).

Berfikir secara starategis berarti tidak hanya sekedar mengalokasikan tindakannya sesuai apa yang

diinginkan. Artinya ia selalu memadukan antara dua kemungkinan, yaitu untung dan rugi, baik dan buruk atau bahkan mungkin celaka dan selamat. Kesemuanya masuk dalam konsep nalar - strateginya sebelum mengalokasikan keinginannya. Konsep seperti ini bersesuaian dengan apa yang dikemukakan oleh E. Durkheim dalam artikelnya yang berjudul *Reciprocity and Allocation*, hal 10, antara lain menyatakan

"Strategik refers to behaviour which has a purpose and is to some extent to planned. The strategist tries to obtain an overall picture of the alternative moves open to action, to weigh the advantages and disadvantages, and to choose the means which seem best suited to promote his goal".

(Strategi yang berkenaan dengan perilaku yang satu dan cukup terencana. Para ahli strategi berusaha memperoleh gambaran secara keseluruhan dari suatu alternatif untuk menuju kepada suatu tindakan, dengan mempertimbangkan untung-rugi, serta memilih sarana-sarana yang paling sesuai untuk mempromosikan tujuannya).

Mencermati apa yang dikemukakan Syekh Yusuf, bahwa *siri'ka ampusu naiki punna tena ku-sufi*, adalah suatu gambaran sikap yang sarat dengan logika. Baik logika strategi, maupun logika norma norma susila sosial. Ketika ia berfikir untuk melamar anak gadis sang raja, maka ia lalu berfikir secara strategik dan logik sebelum mengalokasikan

keinginannya. Mungkin salah satu yang difikirkan adalah bila keliru melamar anak seorang raja, maka konsekuensinya adalah hukuman mati.

Menurut Petta Nabba, saat wawancara dengan penulis pada bulan Nopember 1996, beliau mengemukakan bahwa "siri" orang-orang yang empunya nilai *siri* yang tinggi, wujud langkahnya biasanya berbicara dengan penuh waspada dan hati-hati. Karena ia selalu beranggapan bahwa "lida jauh lebih berbisa daripada racun". Seperti pepata mengatakan "badan binasa karena lida". Sebenarnya, penulis ingin berkata bahwa bila *siri* positif diwujudkan seperti ungkapan-ungkapan di atas, maka disinilah *siri* positif merupakan "*restitutive*" atau hukum pengganti tindak pidana, dan bukan *siri* negatif yang agresif (*repressive*).

"Bilamana penghayatan dan perasaan *siri* seseorang lemah maka yang mendominasi dirinya hanya ada dua, yaitu budaya "*intres* dan *ambisi politik*". Demikian kata Petta Nabba saat wawancara dengan penulis. Oleh sebab itu, *siri* pada hakekatnya searah dengan iman dan taqwa. Bahkan *siri* sama dengan shalat. Tetapi prinsip ini tidak semua orang dapat melakukannya.

Bertitik tolak dari sampel yang kedua (sebagai-

mana yang terlihat pada gambar c), maka dapat dijelaskan bahwa hubungan antara masyarakat luas dengan seseorang yang disebut sebagai figur sentral (*the first social actor*) yang dioptik dari visi *siri'* positif, ternyata di situ ditemukan adanya nilai intrinsik yang jauh berbeda sekali dengan apa yang dimiliki oleh orang lain. Nilai intrinsik inilah di mana masyarakat luas menaruh harapan.

Budaya *siri'* positif yang bernilai intrinsik (hakiki) inilah yang dimiliki oleh seorang aktor sosial yang kita sebut "figur sentral" yang menggunakan instrumen *siri'* positif sebagai modal dasar dalam falsafah hidup, baik sebagai pemimpin maupun sebagai warga masyarakat dan individu. *Siri'* positif ditempatkan sebagai gugus depan untuk menjamin ketertiban dan kepastian hukum dalam keadilan. Dan masyarakat sepenuhnya sudah percaya, bahwa apa yang ditampilkan oleh figur sentral tadi adalah sesuatu yang tidak perlu ditarwar apalagi meragukannya. Konstruksi sosial seperti ini mirip sekali dengan konsep solidaritas sosial yang mekanik dari Durkheim (Satjipto Rahardjo, 1991: 289) (penulis uraikan di bagian lain). Hemat penulis, yang berbeda mungkin terletak pada proses konstruksinya budaya *siri'* positif sebagai

kontrol sosial dengan teori yang dikemukakan oleh Durkheim di atas.

Perlu penulis kemukakan bahwa budaya *siri'* positif yang sangat khas bagi etnis Bugis-Makassar itu tidak biasanya bertindak tanpa strategi. Perilaku yang ditampilkan mempunyai model distribusi yang berstrata. Berstarata artinya tidak sekedar memberi dan menerima. Baik aktor sosial maupun recipient sama-sama tidak sekedar menerima. Kedua belah pihak menggunakan ukuran tersendiri, apakah suatu perilaku patut diterima, demikian pula apakah suatu perilaku patut diperlihatkan atau tidak. Seorang figur sentral yang baik ia selalu berprinsip, bahwa memberikan sesuatu yang baik kepada orang lain, maka terlebih dahulu kita sendiri yang harus memiliki sesuatu yang baik itu. Mana mungkin dapat memberikan sesuatu yang baik kepada orang lain jika kita sendiri tidak memiliki sesuatu yang baik itu.

Untuk meniru pola perilaku yang baik, apakah itu perbuatan, ucapan, ataukah sikap dan tindakan, maka terdapat tiga lapisan masyarakat yang harus dinilai (lihat kembali gambar c, hal aspek *siri'* positif). Ketiga lapisan masyarakat itu pertama yaitu diri pribadi atau keluarganya, kedua *the rulling class*/masyarakat elit, dan ketiga masyarakat pada umumnya. Ketiga

lapisan masyarakat ini menjadi saksi hidup betapa siri positif (si A misalnya), menggantikan posisi kedudukan tindak pidana. Untuk jelasnya penulis uraikan satu persatu sebagai berikut:

a). Ekspresi *siri* positif pada diri pribadi

"Seseorang yang ingin merubah diri sendiri harus memiliki beberapa persyaratan, antara lain:

1. Kemauan/Hasrat;
2. Kepercayaan Diri;
3. Berani mengambil keputusan;
4. Berani menanggung risiko;
5. Termotivasi untuk terus menerus merubah diri

(Harsono, 1995: 52). Catatan penulis, *merubah diri ada dua versi. Pertama, merubah diri dari perilaku yang jelek menjadi perilaku yang baik, dan versi kedua, perilaku yang baik menjadi perilaku yang lebih baik. Versi yang kedua inilah yang dimaksudkan dalam uraian ini.*

Seorang aktor sosial (*social actor*) yang memiliki watak (potensi *siri* positif) memiliki lima karakteristik yang khas. Kelima karakter itu antara lain:

1. Mempunyai tingkat disiplin yang sangat tinggi;
2. Tidak mudah berucap selain apa yang dilihatnya; dan diketahuinya;

3. Sangat menghormati sesamanya sekalipun derajat (tingkat pendidikannya) jauh lebih rendah;
4. Secara mutawatir, dipercaya dan dihormati oleh lapisan masyarakatnya;
5. Berwibawa dan berkharisma tinggi.

Kelima barometer potensi *siri'* positif yang melekat pada diri seorang figur sosial di atas akan terekspresi dan ter-refleksi secara tidak dengan sengaja menjadi "*energi psikologik*" di tengah-tengah masyarakat dan sangat berpengaruh.

Untuk menentukan dan memilih figur sentral seperti itu adalah tidak mudah (maksud penulis, mencari sampel yang berkapasitas *siri'* positif) dan memang tidak mudah. Di dunia ini banyak aktor-aktor sosial tetapi bukan figur sentral. Aktor sosial dan figur sentral sedikit ada berbeda. Aktor sosial untuk menjadi seorang figur sentral pada umumnya karbitan, paling kurang, "*sengaja dikarbit*". Aktor seperti ini, intres pribadi dan politiknya jauh lebih tinggi dibandingkan dengan intres kepentingan bangsanya. Bangsa dijadikan sumber komoditas, katakanlah seperti *Ramos Horta*. Sikap spekulatif dinyatakan sebagai "*hukum*", kehendak rakyat dinyatakan sebagai subversif, maka terjadilah delik pembunuhan dan pencemaran nama baik. Ironisnya, delik pembunuhan dan pencemaran nama baik orang

lain, hampir bisa dipastikan bahwa tidak ada satu pun negara di dunia ini yang tidak menyatakan jika pembunuhan itu adalah perbuatan melanggar hukum yang telah dirumuskan di dalam undang-undang. Oleh sebab itu sangat legalistik, tetapi mengapa masih bisa terjadi.

Pada saat penulis melakukan penelitian di daerah-daerah, seperti Kabupaten Bone, Kabupaten Luwu, Kabupaten Gowa, Ujung Pandang, seseorang yang sudah jadi figur sentral sekaligus aktor sosial, kharisma dan sikapnya selalu menjadi tolok ukur. Umpamanya, sampel kedua, tidak satu pun orang (khususnya rulling klas) yang tak mengenal tokoh yang satu ini. Bahkan sampai lapisan bawah. Penulis tidak bermaksud menyebut secara berlebihan mengenai hal ini, tetapi sekedar keinginan untuk membuktikan

Seorang masyarakat biasa menyatakan pada penulis, menyebutnya sebagai "*orang yang terpercaya dan terpanutan di daerah ini*"). Ini adalah bukti empirik yang sosio-penomenologik yang sangat menarik.

Oleh sebab itu, penulis dapat menarik suatu kesimpulan sementara bahwa figur sentral untuk menjadi seorang aktor sosial sebagaimana karakteristik yang disebutkan di muka, bukan saja perilaku siri positifnya yang dapat menjadi dasar langkah preventif terhadap pelbagai kejahatan,

tetapi juga namanya sebagai pribadi sekalipun. Sebagai contoh, seorang pegawai kantor Pengadilan Negeri Watampone (namanya tidak dicatat penulis), menceritakan kepada penulis, bahwa pernah suatu ketika terjadi kasus perselisihan, tidak sampai menelan korban jiwa karena figur sosial yang penulis sebut sebagai sampel kedua, meminta kepada mereka yang berselisih agar berdamai. Ini adalah sesuatu yang sungguh luar biasa dibandingkan dengan suatu kasus perselisihan yang diproses melalui pengadilan. Jauh lebih efektif daripada asas peradilan "*cepat, dan biaya ringan*" sebagaimana yang tercantum dalam hukum acara pidana.

Masih berkaitan dengan prototipe figur sentral, pemegang *siri* positif, seorang antropolog dari Kabupaten Gowa yang berdomisili di Sungguminasa, Drs, Kaharuddin, dosen antropologi di UNISMA Ujung Pandang, menyatakan bahwa "salah satu upaya preventif sebagai repleksi *siri* positif adalah melalui seruan *tomasiri'na buttaya*" (Makassar), yang artinya 'melalui orang yang dituakan di kampung itu'. *Tomasiri'na buttaya* artinya 'orang yang paling dihargai' oleh lapisan masyarakatnya. Nama pribadi seorang *tomasiri'na buttaya* ini ternyata dapat menyurutkan niat jahat seseorang menjadi tercegah untuk melakukan tindak pidana.

Dalam penelitian ini, penulis temukan bahwa ternyata antara sikap sikap figur sentral sebagai aktor sosial dengan *siri* positif yang menjadi prinsip hidupnya, dengan seseorang pelaku *siri* negatif, ternyata berbanding terbalik tetapi agak relatif. Seseorang yang berkapasitas *hanya siri* negatif kenyataannya potensial untuk melakukan tindak pidana. Ciri-ciri orang yang berkapasitas *siri* negatif antara lain:

1. Kurang hati-hati;
2. Mudah mengucapkan kata-kata yang dapat menyinggung orang lain, tetapi ini relatif;
3. Pada umumnya memandang remeh sesamanya;
4. Unsur percaya diri relatif sekali;
5. Pada umumnya hanya ditakuti orang/tidak segan.

Selain daripada itu, terdapat juga tipe yang tidak memiliki kedua bentuk prinsip *siri* tadi, yaitu *siri* negatif dan *siri* positif. Prototipe wataknya manusia seperti ini sangat potensial melakukan tindak pidana. Prototipe yang berwatak *siri* negatif melakukan tindak pidana, itu karena latar belakang pencemaran harkat dan harga dirinya. jadi ia melakukan tindak pidana karena faktor eksternal yang mempengaruhi faktor internalnya, sehingga timbul *siri* negatif. Tetapi yang disebutkan tera-khir, perbuatan melanggar hukum adalah tujuan.

Prinsip perilaku *siri'* negatif dapat digambarkan seperti "besi magnet". Reaksi ada bilaman ada aksi. Artinya, dia melakukan perbuatan melanggar hukum bilamana diperlakukan diluar akal sehatnya. Sehingga dengan demikian, faktor eksternal yang berupa perbuatan diluar akal sehat itu mempengaruhi *siri'* negatifnya, lalu membalasnya dengan perbuatan melawan hukum pula.

Kembali kepada masalah *siri'* positif, bahwa bila demikian halnya, maka dapat dipastikan aspek *siri'* positif tertuju kepada pola perilaku yang positif. Perilaku positif terletak pada tingkat kesadaran. Jadi selalu mengarah kepada langkah yang berguna dan bermanfaat. Tingkat kesadaran itu sendiri sangat ditentukan oleh akal budi yang sehat. Kesadaran yang dipandu oleh akal budi yang sehat, maka inilah yang disebut PREVENTIVE.

Kiranya demikian itulah sistem perilaku yang dikehendaki oleh aspek *siri'* positif. Yaitu suatu teknik yang memperbandingkan dan memadukan antara strategi perilaku yang dikehendaki oleh hukum dan perilaku yang dikehendaki oleh nilai-nilai intrinsik budaya *siri'*.

b) Penilaian Eksternal

Yang maksud dengan penilaian eksternal di sini adalah penilaian masyarakat pada umumnya kepada seorang aktor sosial yang kita sebut sebagai figur sentral; pemegang prinsip *siri'* positif (lihat gambar c hal. 139).

Di muka, penulis telah menjelaskan, bahwa untuk pengakuan secara *de jure* terhadap seorang yang dianggap sebagai figur sentral dari kalangan masyarakat, di mana prinsip *siri'* positif dapat dipertanggung jawabkan, maka batu ujinya adalah penilaian orang per orang atau masyarakat pada umumnya.

Akan tetapi sebelum penulis kemukakan lebih jauh tentang penilaian-penilaian tersebut, ada baiknya penulis kemukakan bagaimana sebenarnya bentuk dan model *siri'* positif yang menjadi prinsip hidup seorang figur sentral yang sangat dibanggakan itu.

Andi Zainal Abidin (1983: xiii) antara lain mengemukakan sebagai berikut:

Asiri'i Dewata Seuwae, asiri'i alemu, asiri' padammu rupa tau, asiri'i bali wanuammu, Akkai padammu rupa tau natanre-reko (Bugis) = (Hormatilah harkat dan martabat Tuhan Yang Maha Esa, harkat dan martabatmu, hormatilah harkat dan martabat sesamamu manusia, hormatilah harkat dan

martabat negara-negara tetanggamu. Angkatlah (hormatilah) sesamamu manusia agar anda lebih dihormati oleh mereka).

Prinsip hidup *siri'* positif di atas mengandung tiga dimensi hubungan yang harus dimiliki oleh seorang figur sentral sebagai *social actor*, yaitu, harus mampu menjalin hubungan vertikal, harus mampu menjalin hubungan horisontal, dan introspeksi diri (*asiri'i alemu*). Satu per satu model hubungan tersebut dijelaskan penulis pada berikut ini.

Pertama, hubungan vertikal;

Hubungan vertikal yang dimaksudkan adalah *asiri'i Dewata Seuwae*. Arti dasarnya kalimat ini adalah "*malulah sama Tuhan Yang Maha Esa*", Mengapa harus malu kepada Tuhan Yang Maha Esa? Malu di sini bermakna "*Junjung tinggilah Tuhan Yang Maha Esa*" karena dialah yang menciptakanmu. Menjunjung tinggi, berarti "*Sembahlah Tuhanmu*".

Pada uraian terdahulu, Petta Nabba mengemukakan bahwa *siri'* itu sama dengan iman dan taqwa, bahkan sama dengan "*Shalat*". Di sinilah rupanya dasarnya sehingga Petta Nabba mengemukakan statement seperti itu.

Malu kepada Tuhan Yang Maha Esa hemat penulis identik dengan *seruan melaksanakan perintah* se-

bagai hamba. Kelas yang tertinggi seorang manusia di sisi Tuhannya adalah meraka yang memperoleh gelar "*hamba-Ku*".

Ada beberapa ayat dalam Al-quran ditemukan penulis kalimat perintah, tetapi bermakna malu menurut analisis penulis terhadap ayat-ayat tersebut. Diantaranya, surat Al-kautsar ayat 1 sampai dengan ayat tiga. Ayat 1 yang artinya: "*Sungguh banyak nikmat telah kuberikan padamu*". Arti ayat 1 di atas mengandung makna '*manusia diminta tahu diri*'. Tahu diri artinya, malalulah sedikit. Karena nikmatKu sudah terlalu banyak yang Aku berikan. Seolah-olah Tuhan berkata, "Apa pula yang engkau lakukan setelah Kuberikan nikmat"?. Tuhan kembali berfirman pada ayat 2 yang artinya: "Maka shalatlah dengan atas nama Tuhanmu dan berkorbanlah !!!". Shalatlah !, berarti hormatilah atau junjung tinggilah Tuhan Yang Maha Esa. Kalimat ini sama dengan kalimat pendek dalam bahasa Bugis di atas, yaitu *Asiri'i Dewata Seuwae*".

Menunjukkan rasa hormat kepada Tuhan Yang Maha Esa atau menyembah kepada Tuhan Yang Maha Esa, ada kriterianya yaitu harus dengan "*atas nama-Nya*". Artinya, tidak mengandung unsur intres terkecuali setelah selesai. Dan berkorbanlah !.

(Penulis tidak bermaksud menjelaskan ayat berikut).

Arisi'i Dewata Seuwa dalam konsep ketatanegaraan kita, maka prinsip itu terletak pada sila pertama Pancasila yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa. Pancasila dalam berbangsa dan bernegara memiliki tiga fungsi pokok, antara lain:

1. Pancasila sebagai pandangan hidup; suatu konsepsi yang tidak dapat dipisahkan dengan filsafat,
2. Pancasila sebagai ideologi negara; hal mana diperlukan suatu pemikiran yang disusun dan dirumuskan oleh bangsa secara sistematis dengan tujuan untuk menjawab segenap problem nasional. Selain daripada itu Pancasila sebagai ideologi nasional mencakup hubungan tiga hal pokok. Pertama, idealita, artinya dapat diterima oleh akal sehat. Kedua, realita artinya, sesuai dengan kenyataan yang ada dan telah terjadi. Ketiga, fleksibilita, artinya dapat disesuaikan dengan segala bentuk keadaan dan kondisi,
3. Pancasila sebagai Dasar Negara; artinya, bahwa Pancasila sejak dirumuskannya hingga kini dianggap telah diketahui oleh semua lapisan masyarakat, dan berlaku mutlak. Jadi

menyangkut tentang hak dan kewajiban dalam kehidupan bernegara.

Hubungan integral antara Pancasila dengan budaya *siri'* pun rupanya sangat jelas. Suatu hubungan yang bersifat vertikal yang tak bisa dipisah-pisahkan sebagaimana hubungan vertikal antara prinsip *siri'* positif seorang aktor sosial dengan "Dewata Sewwae" (Tuhan Yang Maha Esa).

Kedua, hubungan horisontal;

Prinsip budaya *siri'* positif juga mengenal hubungan horisontal. Hubungan horisontal yang dimaksud adalah *asiri'i padammu rupatau* (hargailah sesamamu manusia). Dalam Al-quran disebut *hablun minannas*. Memperbaiki hubungan baik antar sesama manusia adalah salah satu bentuk pencegahan tindak pidana yang paling efektif. Menjalin hubungan baik berarti tidak saling mencurigai, mengancam bahkan mencelakakan. Menjalin hubungan baik bermakna membangun kebersamaan untuk membentengi suatu kejahatan. Secara bersama-sama menghindari kejahatan karena adanya hubungan saling menghargai dan menghormati.

Hubungan horisontal berikutnya dari *siri'* positif adalah *asiri'i bali wanuamu*. Artinya, hargailah atau hormatilah negara tetanggamu.

Bentuk *siri'* positif yang satu ini ternyata menghendaki, bahwa seorang figur sentral (orang yang menjadi panutan) penting sekali menjalin hubungan saling menghormati dengan bangsa lain. Hubungan yang saling menguntungkan dan saling membantu satu sama lain. Di samping itu, *asiri'i* (hormatilah harkat dan martabat) dapat juga bermakna jangan saling menyerang atau saling mence-lakkan di antara bangsa yang satu dengan yang lain. Tetapi dalam konsep *menghormati* ini, prinsip *siri'* positif menghendaki agar kitalah terlebih dahulu menghormati orang lain.

Dalam PEMBUKAAN UUD 1945, sangat jelas dinyat-
takan "*Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu adalah
hak segala bangsa dan oleh sebab itu, maka
penjajahan di atas dunia ini harus dihapuskan
karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan
perikeadilan*".

Kiranya semangat Pembukaan UUD 1945 di atas, menjiwai seluruh peradaban adat istiadat bangsa Indonesia, sehingga prinsip *asiri'i bali wanuamu* juga tersirat di dalamnya. Jadi konsep ini bukan hanya mencegah terjadinya kejahatan antar indi-
vidu, tetapi bahkan pencegahan kejahatan inter-
nasional seperti peperangan, intervensi, ter-
rorisme dan lain-lain.

Masih dalam hubungan horisontal dari *siri'* positif. *Akkai padammu rupa tau natanrereko*. Artinya, hargailah harkat dan martabat sesamamu agar anda lebih dihormati. Menghargai harkat dan martabat orang lain adalah salah satu bentuk hubungan sosial (*social relation*) yang dapat membentuk solidaritas antara sesama manusia. Bentuk-bentuk solidaritas di sini dapat berupa hubungan individu dengan individu, individu dengan masyarakat, atau bahkan masyarakat dengan masyarakat (bandingkan kembali dengan upaya seorang eks narapidana yang berprinsip *siri'* negatif lalu ingin mengadakan perubahan dalam hidupnya dengan prinsip *siri'* positif, seperti pembahasan di muka).

Bentuk-bentuk prinsip *siri'* positif di atas nampak jelas kesahihannya, betapa nilai-nilai budaya *siri'* bukan hanya berasaskan prinsip-prinsip nilai-nilai lokal tetapi juga prinsip-prinsip nilai nasional, seperti Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, bahkan sampai kepada prinsip-prinsip hukum Internasional. Hubungan integral (*integrated relations*) antara budaya *siri'* positif dengan prinsip-prinsip hukum secara menyeluruh (jika kita tidak ingin menggunakan istilah global), adalah sangat jelas.

Secara eksplisit, termasuk di dalamnya tindakan preventif terhadap tindak pidana.

Berbekal dengan *prinsip siri' positif* inilah sehingga pemimpin-pemimpin (raja-raja) Bugis-Makassar di masa lalu sangat dicintai oleh rakyatnya maupun orang-orang asing (Eropa) yang bermukim di Sulawesi Selatan terutama di Makassar. Sebagai contoh, Karaeng Pattingalloang yang berkuasa pada abad XVII di bandar Makassar. Dr. Anthony Reid, Sejarawan Australia dalam papernya berjudul "*A Great Seventeenth Century Indonesia Family: Matuaya and Pattingalloang of Makassar*" (Andi Zainal Abidin, 1983: xii). Dalam paper ini Reid memaparkan betapa Karaeng Patingalloang sangat menghormati dan dihormati oleh orang lain bukan hanya rakyatnya tetapi juga bangsa lain.

Menurut pandangan dan persepsi orang-orang Sulawesi Selatan dahulu kala, bahwa orang yang suka melanggar hukum dianggap *mate siri'* (mati harkat dan martabatnya), pejabat yang sewenang-wenang dipandang tidak mempunyai SIRI', demikian pula halnya orang serakah yang tidak memperdulikan kepentingan orang lain. Dan orang yang *mati siri'*-nya dianggap sama dengan binatang. SIRI' orang demikian barulah dianggap pulih kembali setelah berhasil memperbaiki diri dan sikapnya

serta memberikan prestasi yang bernilai tinggi untuk kebaikan bersama. ataupun jikalau ia dihina oleh orang lain, melakukan pembalasan yang setimpal dengan penghinaan yang dideritanya (Andi Zainal, 1983: xv).

Gambaran seperti di atas itu *siri'* dapat diartikan sebagai upaya prevensi dan upaya represif. Konsep represif dan preventif menurut hukum sendiri menurut Soedarto (1986: 111), antara lain dikemukakan bahwa:

Penegakan hukum dapat bersifat preventif, represif, dan kuratif dan juga dapat diterapkan pada bidang hukum pidana, hukum perdata, dan hukum administrasi. Kesemua sistem penegakan hukum tersebut masing-masing didukung dan dilaksanakan oleh alat perlengkapan negara atau aparatur penegak hukum yang mempunyai aturannya masing-masing pula.

Apa yang dikemukakan Prof Soedarto di atas tentang upaya-upaya penanganan masalah hukum, upaya represif tidaklah cukup. Artinya upaya lain pun harus turut memberi kontribusi, termasuk upaya-upaya preventif menurut hukum adat dalam hal ini budaya *siri'*.

3. LANGKAH PREVENTIF BUDAYA SIRI TERHADAP DELIK

Telah dijelaskan pada uraian di muka bahwa langkah-langkah preventif itu meliputi *general prevention* dan *special prevention* (prevensi umum dan prevensi khusus). Prevensi umum adalah "mencegah agar orang lain, calon pembuat potensiil atau masyarakat pada umumnya tidak melakukan tindak pidana", sedangkan prevensi khusus adalah "mencegah agar si pembuat tidak lagi melakukan tindak pidana". Oleh karenanya, penulis tidak lagi terlalu membicarakan hal tersebut lebih jauh.

Perlu penulis kemukakan bahwa kedua bentuk prevensi di atas adalah prevensi menurut undang-undang hukum pidana. Artinya, si terpidana dijatuhi hukuman sesuai dengan yang diancamkan kepadanya lalu dijalaninya. Kemudian dalam penerapan pidana itu tertitip tujuan diterapkannya hukuman tersebut kepada terpidana, di antaranya agar orang itu menjadikannya pelajaran agar tidak melakukan kembali, atau bahkan pelajaran bagi siapa yang melihatnya agar ia tidak pula berniat melakukan tindak pidana karena akan dikenakan hukum sebagaimana halnya dengan si terpidana.

Tujuan pemidanaan seperti itu pada dasarnya bukan hanya dikehendaki di Indonesia, tetapi juga pada negara-negara lain. Di Swedia misalnya, tujuan

pencegahan umum seperti itu malah menjadi latar belakang rancangan reformasi undang-undang pidana. Konsep seperti ini ditemukan dalam tulisan *Bo Svenssen* yang berjudul *Punishment in Moderation* yang dalam bahasa Indonesia disebut *pelunakan hukum*, tetapi penulis sendiri menterjemahkannya sebagai "*pemidanaan yang tak berlebihan*". Ternyata dasar pemikiran pembaharuan undang-undang pidana baru Swedia itu dilatar belakangi oleh suatu pemikiran bahwa "perlu ditetapkan suatu kriteria perilaku yang merugikan atas suatu kenyataan. ... ancaman keputusan atas perbuatan yang merugikan itu perlu ditetapkan (artikel diterima dari Prof. Ruslan Saleh, 1997). Undang-undang hukum pidana Di Swedia menerapkan konsep *Punishment in Moderation* ini, dengan maksud bahwa pidana yang diterapkan secara melunak, kiranya si terpidana dapat dengan mudah memahami diri untuk tidak kembali melakukan tindak pidana.

Adapun langkah-langkah prevensi delik yang penulis maksudkan di sini adalah prevensi delik bukan dengan menggunakan sarana penal atau hukum pidana, tetapi prevensi yang menggunakan instrumen budaya *siri'*. Mendengar namanya saja sudah pasti agak berbeda dengan prevensi delik melalui sarana hukum pidana.

Berdasarkan data di lapangan, di mana penulis

temukan prevensi delik menurut budaya *siri'* ada dua model. Model pertama, prevensi delik sesudah terjadinya tindak pidana, kedua, prevensi delik sebelum terjadinya tindak pidana (perhatikan kembali gambar A, B pada hal. 141).

Prevensi delik sesudah terjadinya delik, pun masih harus diklarifikasi lagi. Apakah tindak pidana yang berlatar *siri'* itu sudah diproses dan diputus oleh pengadilan, ataukah masih ditangani oleh pemuka masyarakat (belum ditangani aparat penegak hukum). Jika proses kasusnya sudah sampai ditangani dan diputus pengadilan, maka budaya *siri'* sebagai sarana prevensi tidak berdiri sendiri lagi.

Akan tetapi bilamana tindak pidana *siri'* itu belum ditangani oleh aparat penegak hukum, seperti polisi, jaksa dan hakim, maka budaya *siri'* sebagai sarana prevensi, murni berdiri sendiri. Konkritnya, bahwa yang pertama menggunakan dua dimensi konsep yaitu dimensi normatif dan dimensi sosiologis, sedangkan yang kedua menggunakan hanya dimensi sosiologis tetapi didorong oleh solid normatif kultur yang kita sebut *siri'*.

Sebelum dibicarakan bagaimana solid normatif kultur ini berperan dalam langkah prevensi, maka penulis terlebih dahulu membicarakan yang pertama. Yang penulis maksud langkah prevensi delik pada

versi yang pertama adalah *siri'* negatif dirubah menjadi *siri'* positif. Hanya saja di sini ada dua jalan yang dapat digunakan. Yaitu jalur normatif dan jalur sosilogis. Jalur normatif ialah si terpidana dipidana berdasarkan tindak pidana yang dilakukan. Setelah kembali ke masyarakat, ia lalu menggabungkan diri dengan lingkungan masyarakat sekitar dan atas dasar *siri'* ia diterima kembali oleh segenap masyarakat di mana dia berdomisili (dapat dilihat kembali penjelasan perubahan *siri'* negatif ke *siri'* positif pada hal. 143 dan seterusnya).

Jalur yang kedua adalah jalur sosiologis. Seorang yang melakukan tindak pidana, katakanlah pemerkosaan, maka akibat atau konsekuensi berikutnya adalah ada dua kemungkinan. Kemungkinan pertama adalah terjadi pertumpahan darah (pembunuhan), kedua pencegahan konsekuensi tindak pidana berikutnya. Perlu diketahui bahwa kedua konsekuensi ini semuanya atas dasar *siri'*, karena awal peristiwanya juga berlatar belakang *siri'*.

Jika yang terjadi adalah konsekuensi yang pertama, yaitu terjadi pertumpahan darah, maka dapat dipastikan bahwa si pembuat delik yang pertama (pelaku pemerkosaan) tidak ingin bertanggung jawab atas pelanggaranannya. Dengan demikian terjadi pencemaran nama baik. Yaitu korban pemerkosaan. Bila ini terjadi, maka bagi suku Bugis-Makassar adalah per-

tarungan antara hidup dan mati. Pemulihan nama baik dilakukan dengan pembalasan. Karena *siri'*: Mereka berani dan tidak gentar menghadapi musuh, karena berpedoman kepada ungkapan adat:

*Narekko siri'na naranreng, agapi riattangngari.
de' nalabu matanna essoe ri tengngana bittarae;
le'bini mate massola-solae; massola-sola mateto
tau warani mateto, massola-sola mateto, le'bini
mate massola-solae, mate risantangi, mate
rigollai.*

Artinya:

Jika *siri'* sudah dilanggar, apalagi yang hendak dipertimbangkan: Matahari itu tidak tenggelam di tengah langit: Lebih baik mati nekad: Orang yang nekad mati juga dan orang yang tidak nekad pun mati: Pengecut mati juga, pemberani mati juga, maka lebih baik mati nekad: mati diberi santan, dan mati diberi gula (Andi Zainal: 1987 hal. 7).

Bila ini terjadi maka tidak ada preventif. Yang ada adalah repressif yang agresif. Agresif artinya pihak korban pencemaran nama baik tidak berfikir panjang serta tidak banyak pertimbangan. Yang ada adalah bagaimana memulihkan *siri'*nya sekalipun harus jiwa taruhannya.

Akan tetapi jika si pembuat delik pencemaran nama baik ingin dan atau bertanggung maka pihak korban akan mengalihkan *siri'* negatif itu menjadi *siri'* positif. Artinya, pihak korban bersedia menerima niat baik itu. Tetapi pemulihan nama baik dengan cara seperti ini biasanya dikomunikasikan oleh pihak ketiga yang dapat diterima oleh kedua' belah

pihak. Orang ketiga yang menengahi pemulihan *siri* umumnya dilakukan dengan cara negosiasi antara para pihak. Niat baik pembuat delik untuk melakukan pertanggung jawaban atas perbuatannya dan niat baik pihak korban untuk menerima pertanggung jawaban dari pembuat delik, berarti telah terjadi langkah preventif delik. Terjadi hubungan timbal balik yang saling memberi dan menerima (*take and give*), yang disebut oleh *Durkheim*, (artikel Ruslan Saleh, 1997) sebagai *reciprocation*. Dalam budaya *siri* disebut "*siaddampengen*" (saling menerima dalam arti positif atau perubahan *siri* negatif menjadi *siri* positif). Contoh kasus seperti ini dapat dilihat pada halaman 96-97 yang berupa data lapangan. Di mana seorang gadis desa yang dihamili oleh seorang oknum polisi yang pada mulanya sang oknum tidak ingin bertanggung jawab, Namun pada akhirnya berhasil dinegosiasikan oleh pihak ketiga. Kedua belah pihak pun saling menerima tanpa terjadi pertumpahan darah. Penerimaan seperti ini dapat juga disebut dengan *sanksi sosial*.

4. PEMBUKTIAN LOGIKA DALAM TINDAK PIDANA YANG BERLATAR BELAKANG SIRI'

Proses penanganan perkara pidana yang berlatar belakang *siri'*, seharusnya para penegak hukum (polisi, jaksa, dan hakim) tidak hanya berfikir dogmatis normatif. Karena proses terjadinya tindak pidana yang berlatar belakang *siri'* sangat empirik. Fenomena seperti itu terletak di luar sistem peradilan pidana (bandingkan dengan Barda, yang mengidentifikasi sebab-sebab keterbatasan kemampuan hukum pidana), sebagaimana unraian di kuma. Ada suatu logika di mana undang-undang hukum pidana sebagai stereotip tidak dapat menangkapnya. Artinya perlu penerimaan pencernaan agar putusan yang dijatuhakn oleh pengadilan tidak ada pihak yang dirugikan.

Maksud penulis adalah, bahwa dalam diri setiap manusia hanya ada dua paru akal, yaitu satu paru akal sehat (*common sense*) dan satu paru lagi adalah akal tidak sehat. Kedua paru akal ini bagi orang yang sehat rohani dan jasmani adalah "ADA". Tetapi sepanjang hidup manusia, akal sehat dan akal tidak sehat tidak pernah muncul secara bersamaan. Konfigurasinya selalu bergantian sepanjang manusia itu sehat rohani dan jasmani.

Bilamana suatu perilaku yang dapat mengganggu akal sehatnya (*common sense*) seseorang yang membuat

seseorang yang lainnya itu berubah akal sehatnya (dibaca: perbuatan yang tidak dapat diterima dengan akal sehat), maka ini disebut logika kausalitas yang empirik (*empirical causality in logic*). Logika berfikir seperti ini jarang sekali ditemukan di dalam proses peradilan. Padahal harus diketahui bahwa *logika* adalah salah satu alat bukti yang bersifat *eksplisit* dengan alat-alat bukti lain seperti yang diatur di dalam KUHP maupun hukum acara perdata.

Dalam kaitan seperti itu, orang-orang pintar berkata bahwa untuk dapat menyusun suatu teori tentang perbuatan, maka orang harus berbicara pada suatu tingkat generalisasi yang melampaui tingkat normalnya suatu perbuatan. Sebagai contoh, seorang dokter yang akan menyembuhkan suatu penyakit, maka sang dokter tidak akan pernah maju selangkah pun jika dan hanya jika yang difikirkan "obat apa yang menyembuhkan si pasien dari penyakit". Dan tidak pernah berfikir "bagaimana cara mengentas sumber penyakit yang melanda pasiennya".

Penulis tidak bermaksud untuk mendogmatiskan loncatan berfikir seperti itu ke dalam fenomena tindak pidana pembunuhan atau tindak pidana pencemaran nama baik orang lain yang berlatar belakang *siri* tetapi paling tidak dapat menjadi dasar generalisasi yang melampaui tingkat normalnya rumusan

perbuatan agar tidak berat sebelah. Penulis hanya ingin berkata, bahwa seorang hakim seyogyanya tidak hanya melihat unsur-unsur perbuatan yang dirumuskan di dalam undang-undang pidana sebagai stereotip yang tidak dapat melihat kamar-kamar hukum yang begitu banyak yang ada di sekitarnya. Ingin mengakui atau tidak, secara empirik, masih banyak lembaran-lembaran hukum kita yang masih kosong dan perlu diisi.

Memang pada dasarnya, membunuh dan mencemarkan nama baik orang lain, adalah sesuatu yang samasekali tidak dibernakan oleh undang-undang hukum pidana tertulis maupun hukum tidak tertulis (hukum adat). Tetapi untuk mengurangi dan menghindari bertambahnya korban perinterfensian hak-hak pribadi orang lain secara berlebihan (*interfere private rights*), seperti menggauli istri orang lain dan lain-lain, adalah sesuatu yang perlu difikirkan secara ekual oleh undang-undang pidana materiil maupun formail. Artinya, perbuatan melakukan pembunuhan atas dasar *siri'* seyogyanya masuk dalam rumusan alternatif.

Pertimbangan ekualiti dalam kasus pidana yang berlatar *siri'* nampaknya merupakan sesuatu yang tidak dapat diabaikan oleh setiap hakim yang memutuskan perkara. Sebab bagi si korban karena *siri'* dihadapkan kepada dua masalah yang sangat berat, yaitu memilih mempertahankan harkat dan martabat, atau

membiarkan orang lain mencemari hak-hak pribadinya yang begitu mutlak.

Menurut petunjuk sosiologi hukum, apabila dua kebinasaan berhimpunan dalam satu ketika, maka dianjurkan untuk memilih alternatif yang lebih enteng, serta sedapat mungkin dilakukan dengan penuh hati-hati. Dalam hal memilih, maka alternatif yang baik dipilih adalah penyelesaian yang berdasarkan hukum. Memilih alternatif berdasarkan hukum bukan berarti harus mengabaikan harkat dan martabat yang tertindas.

Jika kita memilih hak-hak pribadi yang dalam dibiarkan begitu saja dicemari orang lain, maka sudah tentu kita tidak berbeda dengan hukum rimba.

Dalam kaitan seperti itu, Hulsman memberikan pandangan bahwa banyak bentuk perilaku yang sebenarnya tidak diinginkan, akan lebih tepat memberantasnya dengan sanksi-sanksi yang tidak bersifat pidana. Tegasnya sanksi-sanksi yang tak mengancam pidana yang dapat membantu perilaku seperti itu dengan baik baik pula (Ruslan Sale, 1991: 6). Demikian pula yang menganut aliran "*sociale defence*" dalam tulisannya yang berjudul "*La lotta contra la pena*" (*The fight against punishment*, Muladi dan Barda, 1992: 152).

Baik prinsip Hulsman maupun aliran *sociale*

defence dari Gramatica, keduanya agak sulit untuk diintegrasikan ke dalam delik yang berlatar belakang budaya *siri'*. Menurut hemat penulis, kesulitannya karena terletak pada masalah prinsip yang berbeda.

Bagi prinsip budaya *siri'* titik berat masalahnya bukan terletak pada apa yang dimaksudkan oleh Hulsman itu, yaitu "membantu si pelaku untuk memperbaiki kelakuannya". Tetapi terletak pada nilai intrinsik budaya *siri'* yaitu harkat dan martabat. Hal mana sangat sulit untuk dijangkau dengan teori *sociale defence*.

Demikian pula halnya dengan teori kausalitas. Karena teori kausalitas cenderung berpihak kepada hukum pidana tertulis. Sementara tindak pidana atas dasar *siri'* terkadang teori kausalitas tidak dapat diterapkan karena direntangi oleh hukum pidana tertulis (dapat dibandingkan kembali dengan uraian awal bagian ini, yaitu tertang dua paru akal). Kendatipun demikian, ten densi individu dalam kasus pidana pembunuhan yang berlatar belakang *siri'* harus mempunyai artin tersendiri di samping arti ekualitas keputusan yang ditetapkan pengadilan itu sendiri, dan legitimasi dari arti itu harus ditemukan di dalam penalaran dari hukuman. Oleh sebab itu, adalah sesuatu yang bijak atau bahkan sebagai pembenar bilamana terdapat kebebasan

pengadilan untuk mengadaptasikan budaya hukum *siri'* kedalam setiap penjatuhan hukum- an terhadap kasus adat pidana di Sulawesi Selatan. Mengadaptasikan, tidak mesti harus menjadi alasan pembenar atau alasan yang meringankan. Mungkin sebaliknya, yaitu alasan yang memberatkan pidana. Dengan demikian, keputusan pengadilan tidak perlu "terisolir", tetapi lebih merupakan suatu putusan yang membentuk bagian dari kebijakan penerapan pidana yang masuk akal.

Budaya *siri'* hanya merupakan bagian terkecil dari nilai-nilai yang wajib digali oleh hakim, sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 27 ayat (1) UU. No.14 Tahun 1970. Disamping itu, budaya *siri'* secara eksplisit meng andung prinsip *imparsialitas* (kenetralan) tentang penetapan hukuman sebagaimana ruh dari Pasal 1 Undang-undang Pokok Kekuasaan Kehakiman di atas.

5. KARAKTERISTIK BUDAYA SIRI'

Hukum yang ada pada suatu waktu tertentu hendaknya dilihat sebagai hasil dan kekuatan-kekuatan sejarah dan kita perlu melihatnya dalam kerangka konsep-konsep budaya yang berubah pula. Oleh karena studi-studi terhadap masyarakat primitif diperlukan untuk mengamati evaluasi ide-ide dan bentuk-bentuk yang ada di situ. Dengan demikian, antropologi hukum memberikan bantuan yang sangat berharga terhadap studi tentang hukum pada umumnya. Menurut para ahli antropologi, hukum adalah suatu bentuk dan manifestasi sosio-kultur (Satjipto Rahardjo, 1991: 285).

Dalam bagian ini, penulis bermaksud mengkaji/menganalisis apa yang dimaksud dengan karakteristik budaya *siri'* dari visi antropologi hukum, sekalipun tidak dalam konsep masyarakat primitif. Karena masyarakat Bugis-Makassar dengan pola tatanan atas dasar budaya *siri'* bukan lagi termasuk ke dalam katagori masyarakat primitif. Dikatakan bukan masyarakat primitif karena sejak dahulu kala, suku Bugis-Makassar memiliki struktur pemerintahan yang disebut dengan *Kerajaan*. Misalnya, Kerajaan Gowa, Bone, Luwu, Wajo, Tanatoraja, Mandar dan lain-lain.

Pola tatanan kerajaan-kerajaan tersebut atas dasar *siri'* sudah mengenal teknologi sekalipun masih sederhana. Sebagai contoh, masyarakat bahari sejak dahulu kala menggunakan perahu semacam pinisi nusantara yang digunakan Armada Laut Indonesia dalam rangka Arung Samudra awal tahun 1997.

Budaya *siri'* sebagai bagian dari hukum adat Bugis-Makassar, melakukan fungsi-fungsi yang esensial untuk mempertahankan masyarakat, terutama bentuk-bentuk masyarakat Bugis-Makassar yang tergambar sebagai anatomi *siri'*.

Karakteristik pertama:

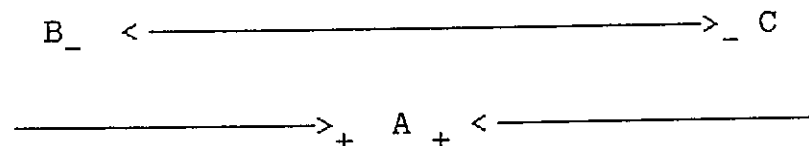
Dalam perkembangan masyarakat Bugis-Makassar secara integral (*integrated relation*), pola tatanan kehidupan masyarakat terdapat karakter yang disebut dengan "bilateral kinship" atau pola kerukunan kekerabatan tradisional yang menjalin hubungan bilateral. Dasar untuk menjalin hubungan bilateral kinship ini adalah *budaya siri'*. Kekerabatan *bilateral* yang dimaksud adalah hubungan bilateral antar kerajaan di Sulawesi Selatan pada zaman kerajaan-kerajaan di masa lalu. Hingga kini masih berlaku. Prinsip yang digunakan adalah saling menjunjung tinggi dan menghargai harkat dan martabat satu sama lain. Dominasi nilai-nilai budaya *siri'* harus didahulukan dalam segala hal, tidak terkecuali masalah hukum adat pidana.

Pola kekerabatan bilateral (*bilatheral kinship*) di mana nilai-nilai budaya *siri'* sebagai ukuran umumnya, dipengaruhi oleh garis hubungan geneologis leluhur (lihat figur 1 hal.192). Pada figur 1

tersebut, terlihat betapa A yang memiliki garis keturunan keningratan yang tinggi, karena ibu dan ayahnya tidak tercampur darah di luar darah keningratan. Sehingga dengan demikian, ia memiliki posisi garis keturunan keningratan lebih tinggi daripada B dan C

Adapun B dan C sebenarnya juga memiliki garis keturunan darah keningratan, tetapi hanya separuh. Dalam pola seperti ini, bilamana terjadi perselisihan atau pertikaian antara B dan C, maka A merupakan penentu hubungan bitateral yang baik. Karena B dan C menilai bahwa A adalah yang tertinggi derajat keningratannya di kalangan mereka.

Seorang figur sentral seperti A akan menjadi ukuran publik (public conpention) sebagai standar pemersatu antara B dan C. Jadi menjadi ukuran pemulihat *siri* yang terganggu untuk menghindari perselisihan yang berkelanjutan. Perhatikan kembali figur di bawah ini:



Hubungan antara B dan C mmenunjukkan adanya suatu konflik. Reciprokasi antara B dan C masing-masing negatif. Artinya, hubungan keduanya tidak saling menguntungkan. Dalam hal seperti ini bisa

bermakna saling menyerang, saling acuh-tak acuh satu sama lain.

Kondisi kehidupan sosial seperti itu tentulah tidak menguntungkan semua pihak. Karena sama-sama mempertahankan harga dirinya (*siri'-nya*). Masing-masing pihak menyatakan diri benar dan masing-masing pihak menyatakan pihak lain bersalah. Konfigurasi hubungan sosial seperti ini dibutuhkan pihak ketiga sebagai penengah yang dapat diterima oleh semua lapisan masyarakat atau para pihak yang saling bertikai tersebut.

Akan halnya dengan seorang figur sentral seperti A, ia dilahirkan baik secara patrilineal maupun matrilineal, keduanya memiliki derajat keningratan yang sama tinggi sejak nenek moyangnya. Dengan demikian A memperoleh predikat garis keturunan yang tangguh dalam arti "*matase darana*" "*derajat keturunan yang murni*". Maka tak pelak ia mesti terpilih menjadi figur sentral (menjadi raja, pemimpin, sekaligus hakim) untuk memecahkan persoalan sebagai mana gambaran kasus di muka.

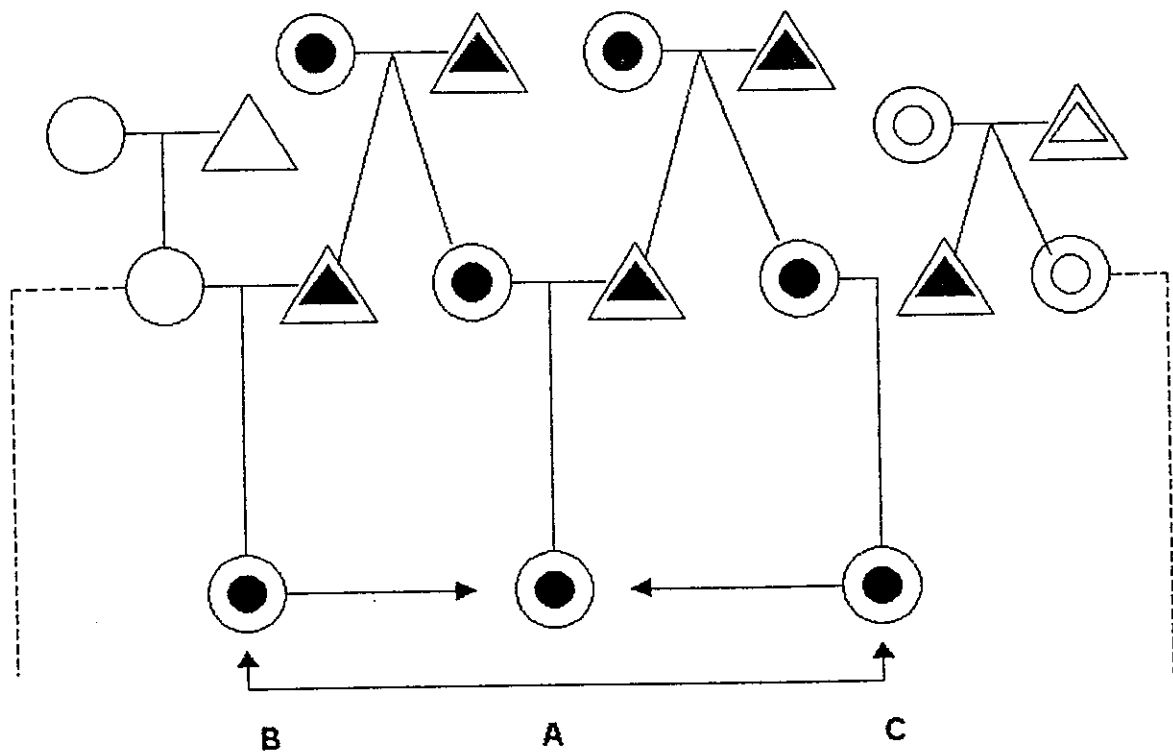
Akan tetapi bedanya dengan B dan C yang sudah memiliki garis keturunan yang sudah tercampur (sepihak orang tuanya bukan turunan ningrat), dapat saja menjadi figur sentral (pemimpin, hakim dan

lain-lain) kecuali jika orang seperti A tidak ada. Sebagai misal, raja-raja zaman dahulu hampir semuanya memiliki selir (istri simpanan dari kalangan bukan sebangsanya atau sederajatnya). Atau mungkin ia tertarik dengan wanita lain yang bukan bangsawan lalu dikawini dan membuahkan putra putri. Putra-putri dari kalangan itulah yang dimaksudkan sebagai B dan C dalam figur 1 tulisan ini.

Dapatlah difahami bahwa rupa pola bilateral kinship mempunyai karakter yang berpola *geneologis* yang mengutamakan derajat kebangsawanan dalam memilih figur sentral sebagai simbol *siri'* kolektif figur mana tidak bakal akan dibantah putusannya. Menurut kebiasaan orang-orang Bugis-Makassar, dalam struktur kehakiman dikenal pula yang namanya "Dewan Adat". Bilamana A yang menengahi perselisihan yang terjadi antara B dan C, maka seberat apapun *siri'* yang terganggu terhadap para pihak, akan terselesaikan dengan baik setelah melalui musyawarah antara A dengan dewan adat yang juga dihadiri oleh segenap ruling kelas kerajaan. Tunduknya B dan C dalam putusan itu disebut karakter *siri'* yang berpola bilateral kinship.

POLA KEKERABATAN BILATERAL (BILATHERAL KINSHIP)

Figur 1.



Figur Sentral

(Pusat penentuan Masseddi Siri / Sitelli)
Inilah yang menjadi Public Compention
Ukuran publik

Karakteristik kedua:

Tomanurung adalah lambang keadilan yang menyeluruh (*the hold of justice*). Begitu kira-kira keyakinan masyarakat Bugis-Makassar terhadap siapa yang disebut *Tomanurung* itu. Bukan hanya di bidang sistem pemidanaan tetapi juga di bidang politik, ekonomi, sosial budaya, dan bahkan pertahanan keamanan. Tetapi dalam bahasan ini penulis tidak bermaksud membahas karakteristik siri' sedemikian luas itu. Karena di samping luas juga memerlukan wawasan dan penelitian yang lebih cermat.

Tomanurung menurut keyakinan orang-orang Bugis-Makassar adalah "Orang yang berdarah putih" (*maddara takku*), darahnya putih seperti getah pohon kattus. Demikian yang ditulis Anton dalam makalahnya yang berjudul *Transpormasi Nilai-nilai Budaya Tradisional Pada Kesenian Sulawesi Selatan Masa Kini*, yang disampaikan pada Musyker Kesenian Tk.I Sulawesi Selatan, yang berlangsung pada tanggal 20-22 Februari 1997 di Ujung Pandang.

Konsep hubungan *Tomanurung* adalah menganut pola *hierarhcical society*, yaitu pola hubungan sosial yang berstratifikasi yang menganut pola hirarkhis, tetapi bukan otoriter. Pola hubungan kemasyarakatan yang dianut sekalipun berpola vertikal, tetapi

tidak bersifat otoriter. Karena *Tomanurung* sendiri bermakna "Orang yang suci". Itulah sebabnya ia dilahirkan dengan berdarah putih sebagai cirinya.

Berdarah putih artinya perlambang "kesucian" dari segala perbuatan yang tercela. *To* asal kata *tau* yang berarti "manusia" atau orang, dan *manurung* menurut kepercayaan masyarakat Bugis-Makassar adalah 'Orang yang diturunkan dari kayangan atau langit. Dalam Buku *I La Galigo*, tulisan Kern, 1993 hal. 20, disebutkan bahwa yang dimaksud dengan *Tomanurung* adalah orang yang diturunkan dari langit tidak lain dari "*Batara Guru*", *Putra Dewata* dari langit yang diturunkan ke alam (Bumi lahir) untuk menjadi pemimpin di Bumi.

Menurut hemat penulis, *Tomanurung* bermakna "orang yang diciptakan dari *nuur* atau cahaya. Karena *To* berarti manusia atau orang, dan *manuurung* asal katanya adalah *nuur* yang mendapat tambahan "*ma*" atau "*mim*" dalam bahasa Arab, serta ditambah dengan akhiran "*ng*". Bilamana awalan "*ma*" dan akhiran "*ng*" ditanggalkan, maka yang tertinggal adalah kata "*nuur*", yang bermakna "*cahaya*" menurut bahasa Arab dan bahasa Indonesia.

Dalam bahasa Arab kata *manuron* (manurung, menurut dialeg Bugis-Makassar) dapat disepadankan

dengan makna kata "*Ahmad bilaa mim*" (kata Ahmad tanpa mim), lalu menjadi "*Ahad*" berarti "satu" (Esa). Huruf "*ma*" dalam kamus bahasa Arab mempunyai arti yang sangat bervariasi. Misalnya, "tidaklah", "apakah", "selama", "apa", "alangkah", dan lain-lain.

Jika kita mengambil contoh di dalam Alquran, Allah berfirman yang artinya: "Tidaklah Aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk menyembah kepada-Ku" (Q,S:51:56). Dalam kalimat ini, kata "*ma*" berarti "tidaklah" yang bermakna "ciptaan yang bertujuan". Manusia dan jin diciptakan karena "bertujuan". Inilah inti makna dari kata "*ma*", kata mana menunjukkan "penegasan" atas sesuatu.

Contoh lain, di dalam Alquran sering pula ditemukan kalimat "*maa-ahsan*" yang berarti "alangkah indahnyanya". di sini kata "*maa*" berarti "alangkah". Apabila kata-kata tersebut dibias kedalam kata *maanuron*, maka kata *maanuron* bermakna "tidaklah cahaya itu, atau alangkah cahaya itu" - diciptakan.

Penulis sendiri berasumsi bahwa istilah *Tomanurung* kata dasarnya adalah *manuuron* (yang tepat untuk bahasa Arab). Akan tetapi yang disaksikan oleh mata kepala masyarakat biasa adalah berupa orang (wujud manusia), maka ungkapan itu ditambah dengan

istilah *to* = tau (Bugis dan Makassar)= berupa orang lalu dengan demikian kata *manuuron* berubah sebutan menjadi *Tomanurung*. Demikian pula halnya dengan kebiasaan orang-orang Bugis-Makassar, bila menyebut suatu kata yang berakhiran "n" biasanya disengaukan menjadi "ng". Misalnya, "makan" diucapkan "makang", jalan-jalan, diucapkan "jalang-jalang" dan seterusnya. Nah ! kata *manuron* tadi, karena mendapat tambahan istilah bugis, secara otomatis istilah itu membaur ke dalamnya tanpa disadari.

Bilamana istilah *Tomanurung* itu disepadankan dengan kalimat "maa-ahsan" dalam bahasa Arab yang bermakna alangkah indahnya itu, maka kata *ma-nuron* dapat bermakna "alangkah cahaya itu (diciptakan)" atau "alangkah cahaya itu tercipta". Seolah-olah seperti itulah sebutannya. Atas dasar itulah, hemat penulis, singkat makna dari istilah *Tomanurung* adalah "Orang yang diciptakan dari cahaya" serasi dengan keyakinan orang-orang Bugis-Makassar bahwa *Tomanurung* itu berdarah putih.

Berpijak dari sifat *Tomanurung* adalah "suci", maka karakter *siri'* menurut pola hubungan hierarchal society adalah sama dengan makna yang terkandung dalam nama *Tomanurung* itu sendiri yaitu "kesucian". Jadi *siri'* sama dengan kesucian. Karena *siri'* difahami sebagai suatu kesucian, maka mutlak

harus dijaga dan dipelihara dan dilindungi.

Figur 2 hal.206 menunjukkan A diibaratkan sebagai *Tomanurung*, di mana semua lapisan masyarakatnya patuh dan tunduk tetapi bukan dalam arti otoriter sebagaimana kebanyakan manusia-manusia sekarang di zaman modern ini. Secara hirarkhis masyarakat tunduk kepada *Tomanurung* bukan karena dia berdarah putih, tetapi karena kebijaksanaanya dalam memimpin bangsanya. Perbuatan, ucapan, dan aplikasi kebijakannya semua dalam posisi yang seimbang (equality) dan tidak ada yang berlebihan ataupun dibuat-buat apalagi dipaksakan.

Tomanurung dalam mendistribusikan kebijakan keadilan kepada lapisan masyarakatnya dilakukan dengan sejujurnya. Ia memberikan sesuatu kepada masyarakat sesuai dengan kedudukan masyarakat itu sendiri. Itulah sebabnya pola hubungannya disebut masyarakat yang berstratifikasi (hierarchical society), hal mana bukanlah sesuatu yang mustahil.

Dalam konsep Thomistik, keadilan dibagi menjadi dua macam, yaitu keadilan *distributif* dan keadilan *komutatif*. Yang pertama, mengalokasikan barang-barang kepada orang-orang sesuai (*proporsional*) dengan martabatnya. Keadilan komutatif menyangkut hubungan antar individu satu sama lain dan penyesu-

aian-penyesuaian yang harus dilakukan apabila terjadi perbuatan-perbuatan yang tidak sesuai dengan hukum (Satjipto Rahardjo, 1991: 265).

Menurut keyakinan masyarakat Bugis-Makassar, *Tomanurung* atau *Batara Guru*, apa yang dilaksanakan diatas Bumi lahiriah ini adalah penjelmaan dari kehendak Sang Pencipta. Ia mentransfer perilaku hukum dan keadilan berdasarkan petunjuk-petunjuk dari Sang Dewata, yaitu Tuhan. Hal ini sesuai dengan namanya yaitu *Tomanurung* = orang yang diturunkan dari alam atas yaitu langit. Itulah sebabnya masyarakatnya meyakini benar jika apa yang dipersembahkan itu, adalah kebenaran. Satu di antara sekian banyak bentuk-bentuk perilaku sosialnya adalah seperti yang diutarakan oleh Petta Nabba, bahwa "jangan terlalu mudah menyatakan sesuatu itu putih jika memang hitam, sebab terlalu jauh perbedaannya" Masyarakat manapun akan tahu bahwa hal itu sangat berbeda.

Terlepas dari konsep *Tomanurung*, adalah baik jika dikemukakan pandangan dari *St. Thomas Aquinos* (Satjipto Rahardjo, 1991: 264-245), sebagai bandingan sekilas, sebagai berikut:

St. Thomas Aquinas adalah filsuf terbesar dari *Aliran Scholastic* di abad pertengahan. Ia menerima pengaruh dari *Aristoteles*, tetapi menyatakannya dengan dogma agama Kristen, sehingga merupakan suatu sistem pemikiran

tersendiri. Thomas Aquinas merumuskan hukum sebagai "peraturan yang berasal dari akal untuk kebaikan umum yang dibuat oleh seorang yang mempunyai kewajiban untuk menjaga masyarakatnya dan mengundangkannya". Oleh karena dunia ini diatur oleh tatanan ketuhanan. Hukum ketuhanan adalah yang tertinggi. Thomas Aquinas membedakan empat macam hukum, yaitu *lex aeterna*, *lex naturalis*, *lex divita*, dan *lex humana*.

Lex aeterna adalah rencana pemerintahan sebagai mana dibuat oleh Sang Raja Diraja. Ia adalah akal keilahian yang menuntun semua gerakan dan tindakan alam semesta. Tetapi tidak ada manusia yang mampu untuk menangkap *lex aeterna* dalam keseluruhannya. Bagian yang bisa ditangkap itu disebut sebagai *lex naturalis*. *Lex naturalis* ini memberikan pengarahan kepada kegiatan manusia melalui petunjuk-petunjuk umum. Petunjuk yang paling dasar adalah, bahwa yang baik harus dilakukan, sedang yang buruk dihindari. Mengenai apa yang disebut sebagai baik, Thomas Aquinas mengaitkannya kepada apa yang merupakan kecenderungan alamiah pada manusia. Pertama, adalah insting manusia yang alamiah untuk mempertahankan hidupnya. Kedua, daya tarik antara kedua jenis kelamin dan hasrat untuk membesarkan dan mendidik anak-anak. Ketiga, manusia mempunyai hasrat alamiah untuk mengenal Tuhan dan kecenderungan untuk menolak ketidaktahuan. Keempat, manusia ingin hidup dalam masyarakat dan oleh karena itu adalah suatu hal yang alamiah pada manusia untuk menghindari perbuatan yang merugikan orang-orang yang hidup bersamanya.

Dalam filsafat Thomas, *lex aeterna* yang mengandung asas-asas yang abstrak itu dilengkapi dengan petunjuk-petunjuk khusus yang berasal dari Tuhan tentang bagaimana manusia itu harus menjalani hidupnya. Fungsi itu dijalankan oleh *lex divina*, yaitu yang tercantum dalam Kitab-kitab Suci dan tercantum dalam Perjanjian-perjanjian Baru dan Lama. Yang terakhir adalah *lex humana*. Rumusan hukum ini adalah rumusan Thomas Aquinas mengenai hukum sebagaimana sebagaimana tersebut di muka. Sejak akal merupakan sumber utama dalam hukum itu harus menjelaskan kepada dalil-dalil dari akal. Hukum yang tidak adil dan tidak dapat diterima akal, yang bertentangan dengan norma alam, tidak dapat disebut sebagai hukum, tetapi hukum yang menyimpang.

Antara konsep *St. Thomas Aquinas* dengan konsep *Tomanurung* tentang hukum pada prinsipnya memiliki banyak persamaan. Sama-sama mengakui konsep hukum yang paling benar adalah *Hukum Tuhan*. Sama-sama mengakui adanya hukum buatan manusia tetapi diilhami oleh hukum Tuhan, dan sama-sama mengakui bahwa hukum yang tidak adil dan tidak masuk di akal jangan sampai diterapkan kepada masyarakat. Bedanya antara Thomas dan konsep *Tomanurung* adalah, Thomas Aquinas tidak menyebutkan (atau mungkin tidak diketahui) siapa pembawa *lex aeterna* itu. Dalam Konsep *Tomanurung* tidak lain adalah *Batara Guru*.

Berkenaan dengan draft keseimbangan (equality) di mana keadilan dan kepastian hukum harus diterapkan dengan sebanding, Liliana (1995: 61), yang mengutip pendapat Soerjono Soekanto, mengatakan bahwa keadilan sebagai tugas hukum adalah penyerasian antara kepastian dan kesebandingan hukum. Secara ideal kepastian hukum merupakan pencerminan dari asas *neminem laedere* sedangkan kesebandingan hukum merupakan pencerminan dari asas *suum cuique tribuere*. Pandangan Soerjono tersebut secara sempurna dinyatakan sebagai berikut:

Asas *neminem laedere* yakni jangan merugikan orang lain. Secara luas asas ini berarti apa yang anda tidak ingin alami, janganlah menyebabkan orang lain mengalaminya. Asas *suum cuique tribuere* yakni bertindaklah sebanding. Secara luas asas ini berarti apa yang boleh anda mendapat, biarkanlah orang lain berikhtiar

mendapatkannya.

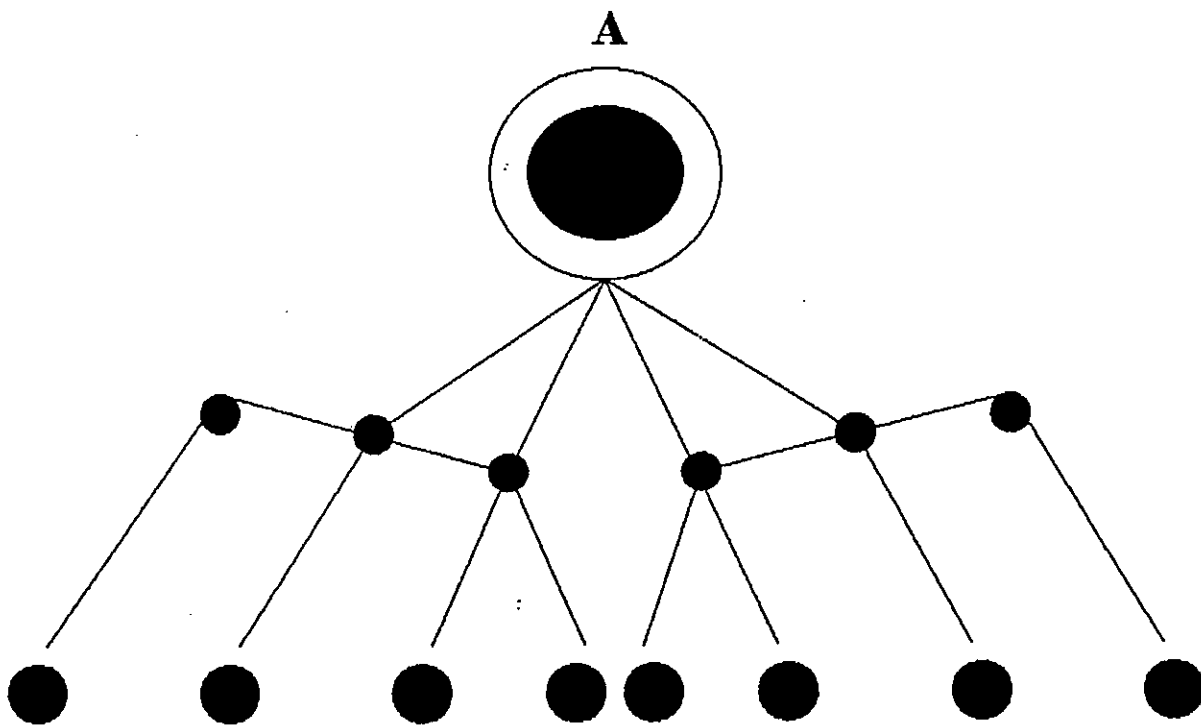
Kedua asas tersebut di atas merupakan satu kutub dalam citra keadilan. Asas *neminem laedere* merupakan sendi *equality* yang ditujukan terhadap umum tanpa kecuali dengan lain perkataan, sendi ini merupakan asas bagi pergaulan hidup. Asas *suum cuique tribuere* merupakan sendi *equity* yang diarahkan pada penyamaan apa yang tidak berbeda dan membedakan apa yang tidak sama. Dalam pergaulan hidup sendi *equity* akan dialami pada hal-hal yang khusus dan konkrit.

Oleh karena asas *tepa saira* yakni *neminem laedere* dan *suum cuique tribuere* merupakan kutub-kutub citra keadilan, maka keadilan sebagai keadaan merupakan keserasian antara kedua asas tersebut. Sebagai proses, maka keadilan merupakan penyerasian kedua asas tersebut. Demikian Soerjono Soekanto.

Konsep *Tomanurung* sendiri dalam menerapkan hukum *siri'* sebagai perwujudan pola kekerabatan yang hierarkhis (*hierarchical society*), prinsip kesebandingannya inipun mengacu kepada *siri'* dalam arti positif (perhatikan kembali penjelasan *siri'* positif, gambar c, figur *siri'* positif, halaman 139).

Konsep Hubungan Tomanurung (Hierarchical Society)

Figur 2

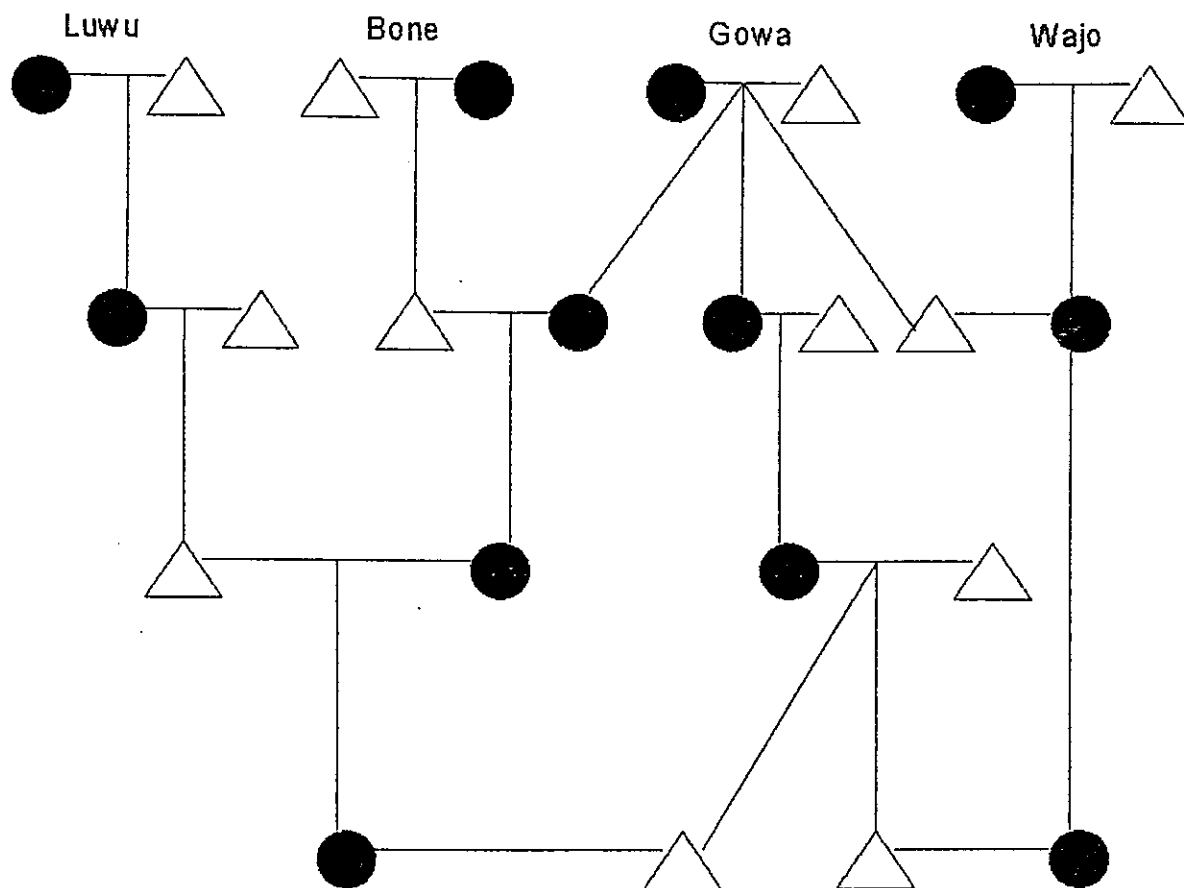


Karakteristik ketiga:

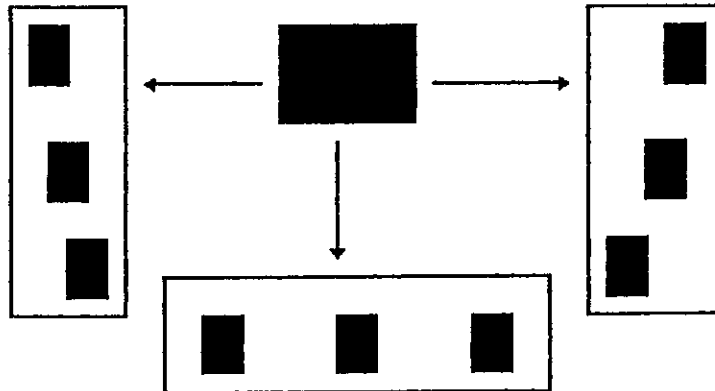
Karakteristik yang ketiga budaya *siri'* adalah *masseddi siri'* yang didasarkan kepada regali (*arajang*) atau *kalompoang*. *Kalompoang* sebagai instrumen resiprokasi antar wilayah hukum kerajaan, merupakan kebiasaan tradisional. Atas dasar regali (*arajang*) ini, maka terbentuk suatu sikap saling menghargai antar wilayah hukum, adat-istiadat masing-masing, kebiasaan-kebiasaan yang berbeda maupun yang sama masing-masing wilayah, termasuk saling menjunjung tinggi harkat dan martabat antar masyarakat.

Dalam konsep regali, masing-masing wilayah kerajaan terdapat wilayah-wilayah persekutuan. Dari wilayah -wilayah persekutuan ini biasanya dikuasai oleh kerajaan tertentu. Kebiasaan-kebiasaan tertentu, adat-istiadat tertentu itu yang berlaku di wilayah kerajaan yang menguasai daerah-daerah persekutuan, itu pula yang berlaku di daerah-daerah persekutuan yang dikuasai tersebut. Resiprokasi yang menjalin suatu kesepakatan antara daerah-daerah yang dikuasai dengan daerah atau wilayah kerajaan yang menguasai inilah disebut "*Ikatan masseddi siri'*" (perhatikan figur 3a dan 3b hal. berikut).

Figur 3.a. Regalie (Pola Arajang,Kalompoang)

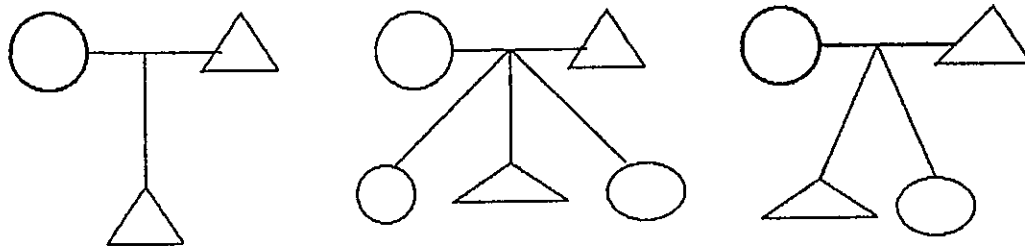


Figur 3.b



Tiap-tiap kerajaan mempunyai koneksi
dan ini disebut siri koneksi.

Figur 4. Pola Perkawinan



1. Bentuk pertanggung jawaban antara anak dan ibu disebut pertanggung jawaban **siri mutlak**.
2. Bentuk pertanggung jawaban antara anak dan ayah disebut pertanggung jawaban **siri relatif**.
3. Bentuk pertanggung jawaban antara anak dengan anak siri sitelli dalam arti keluarga.

Wilayah-wilayah persekutuan itu biasa juga disebut wilayah hukum koneksi. Masing-masing daerah swapraja itu membentuk satu koneksi yang terdiri dari beberapa residen. Ikatan siri' yang dianut adalah ikatan siri' koneksi. Ini adalah istilah lain dari *ikatan masseddi siri'* seperti di atas. Model atau konfigurasi kemasyarakatan seperti ini, disebut oleh Emile Durkheim sebagai bentuk konfigurasi "soidaritas". Bentuk solidaritas menurut Durkheim ada dua, yaitu *solidaritas mekanik* dan *solidaritas organik* (Satjipto Rahardjo, 1991: 289-290).

Hukum yang menindak ini kiranya bisa disamakan dengan hukum pidana kita sekarang. Menurut Durkheim, dasar dari hukum ini adalah *solidaritas sosial* yang disebutnya *solidaritas mekanik*. Solidaritas jenis ini ditimbulkan dari kesamaan yang mengaitkan individu dengan masyarakatnya. di dalam masyarakat yang demikian itu terdapat kesamaan antara para anggotanya mengenai kebutuhan-kebutuhan, perikelakuan, kepercayaan dan sikap. Perasaan kesamaan itu tidak hanya menarik para anggota menjadi satu, melainkan sekaligus juga menjadi landasan berdirinya masyarakatnya. Dengan demikian serangan terhadap masyarakatnya akan dihadapi dengan kesadaran bersama pula berupa penindakan terhadap serangan tersebut, dalam hal ini berupa pembedanaan...

"Dalam hal-hal yang terjadi, kekuasaan yang diserang oleh kejahatan dan yang menindaknya adalah kekuasaan yang sama juga. Ia merupakan hasil dari kesamaan (*likeness*) sosial dan kesamaan itu menimbulkan efek dipertahankannya kohesi sosial yang lahir dari kesamaan itu. Kekuasaan inilah yang dilindungi oleh hukum pidana terhadap segala hal yang melemahkan, baik dengan cara menuntut dari kita masing-masing suatu minimum kesamaan, yang tanpa itu seseorang akan merupakan bahaya bagi kesatuan maupun dengan cara memaksa kita untuk menghormati lambang yang mengekspresikan dan

menyarikan kesamaan ini ...".

Dalam segi dinamikanya, diferensiasi ini menimbulkan kebutuhan akan adanya kerjasama antara para individu anggota masyarakat. Solidaritas yang ditimbulkan oleh keadaan yang demikian itu adalah *solidaritas organik*. Hukum yang dibutuhkan bukan lagi yang bekerja secara menindak, melainkan yang memberikan penggantian, sehingga keadaannya menjadi pulih kembali seperti semula. Demikian penjelasan Satjipto Rahardjo tentang apa itu *sosolidaritas organik*.

Menurut kata-kata Durkheim sendiri, lanjut Satjipto, "... yang membedakan sanksi adalah, bahwa ia tidak bersifat mengenakan denda, tetapi hanya semata-mata untuk memulihkan kepada keadaan semula. Terhadap seorang yang melakukan perkosaan hukum tidaklah dikenakan penderitaan sesuai dengan perbuatannya yang salah itu, orang tersebut hanya dihukum untuk menyesuaikan perbuatannya kepada hukum.

Pola kekerabatan masyarakat Bugis-Makassar dengan dasar regali (*arajang* atau *kalompoang*) melalui prinsip *masseddi siri'* ini, daerah-daerah persekutuan swapraja sebagaimana yang dijelaskan di muka, memiliki sikap ketergantungan moral satu sama lain. Bilamana terdapat pelanggaran atas nilai-nilai moral yang disebut *maseddi siri'* itu, maka yang melakukan pelanggaran itu dinilai sebagai suatu pelanggaran yang sangat berat dan hukumannya pun sangat berat. Sebagai contoh, perjanjian tiga wilayah kerajaan yaitu Bone, Luwu dan Wajo (tahun perjanjian peneliti kurang tahu), bersepakat untuk bersatu dalam segala hal. Nama perjanjian itu adalah "*TellumpoccoE*". Salah satu isi perjanjian itu berbunyi yang artinya (terjemahan bebas penylis),

"Barangsiapa yang melanggar perjanjian ini, maka ia dinyatakan seperti dalam ujung tanduk". Hukumannya pun sangat berat.

Fenomena ke-solidaritas-an yang dimiliki masyarakat Sulawesi Selatan seperti ini dengan prinsip *masseddi siri'* atau *siri'koneksi* dapat juga diartikan sebagai simbol teritorial. Karena batas-batas wilayah persekutuannya jelas.

Karakteristik keempat:

Karakteristik budaya *siri'* yang keempat ini didasarkan kepada pola perkawinan. Dalam pola perkawinan terdapat tiga macam bentuk pertanggungan jawab *siri'* atas suatu perbuatan pidana:

1. Pertanggungan jawab *siri'* kepada Istri (mutlak),
2. Pertanggungan jawab *siri'* kepada Ibu kandung (mutlak),
3. Pertanggungan jawab *siri'* kepada Ayah kandung (relatif).

Mengapa bentuk-bentuk pertanggungan jawab *siri'* menurut pola perkawinan ini berbeda antara 1,2 dan 3? Ibu dan istri sama-sama mutlak sifatnya, sedangkan Ayah sifatnya relatif. Jika istri dan ibu/ayah kandung berbeda adalah logis. Tetapi Ibu dan Ayah kandung yang berbeda bentuk pertanggungan jawab *siri'* terhadapnya adalah mustahil. Tetapi masyara-

kat Bugis-Makassar ternyata lain.

1) Pertanggungjawaban kepada istri

Bentuk hak atas istri adalah hak mutlak bagi seorang suami. Mulai dari nafkah bathin hingga kepada nafkah lahiriah. Hak seorang suami atas istrinya adalah hak yang bersifat privat atas dasar hukum perkawinan (tali perkawinan yang sah). Secara yuridis formal maupun secara yuridis empirik (hukum tidak tertulis), mengakui secara mutlak hukum perkawinan yang sah. Ini berarti hak terhadap istri juga mutlak sifatnya. Hukum-hukum yang mengakui hak atas istri:

- a. Atas dasar hukum formal, yaitu undang-undang tentang perkawinan,
- b. Atas dasar hukum agama,
- c. Atas dasar hukum adat.

Dengan dasar-dasar hukum seperti itu sebagai alas hak suami atas istri, maka tidak ada orang, individu, masyarakat, ras, agama, dan bahkan bangsa yang tidak mengakui bahwa hak atas istri adalah sifatnya mutlak. Bagi masyarakat Bugis-Makassar, pembelaan atas harkat dan martabat atas istri, diminta atau tidak diminta, termasuk suatu kewajiban mutlak. Artinya, intervensi secara privat yang berlebihan terhadap istri orang lain adalah taruhan antara hidup dan mati. Masalah "taruhan antara hidup dan mati"

bagi hukum formil seperti, undang-undang perkawinan masih dapat dihindari. Tetapi menurut dasar hukum agama dan hukum adat, adalah tidak memberi jalan samasekali. Kasus posisi inter-fensi secara privat yang berlebihan atas hak-hak kekeluargaan orang lain atau dalam bahasa hukum disebut "*zinah*" itu sering kali berbenturan antara dasar hukum yang disebutkan pertama dengan dua dasar hukum yang disebutkan terakhir (antara undang-undang negara dengan hukum agama dan hukum pidana adat).

Dalam hukum agama islam misalnya, Nabi menyebutkan yang artinya antara lain: "Haram hukumnya melamar seorang gadis yang sudah dilamar oleh seorang pemuda, lalu dilamar pula oleh pemuda yang lain". Hadist ini mendasari, bahwa jangankan seorang wanita yang sudah menjadi istri yang sah menurut hukum, gadis yang status lamaran saja sudah tertutup kemungkinan pemuda lainnya untuk mengajukan lamaran. Tentulah lebih-lebih lagi jika seorang wanita sudah berstatus istri orang lain.

Perbenturan antara dua kubu hukum mengenai hak seorang suami kepada istri tersebut menunjukkan terdapat cela-cela kelemahan hukum positif kita dewasa ini. Dalam kelemahan-kelemahan yang

terdapat dalam hukum ini (dibaca; hukum hak atas istri), berarti ada lembaran-lembaran hukum kita yang kosong, sekaligus membuka kemungkinan atas lembaran-lembaran hukum yang kosong tadi itu untuk diisi dengan terciptanya ketidakadilan.

2) Pertanggungungan jawab *siri'* kepada Ibu kandung

Pertanggungungan jawab *siri'* kepada Ibu kandung adalah antara ibu dan anak. Berarti melalui garis turunan darah. Anak adalah turunan langsung tanpa perantara. Sifat pertanggungungan jawab *siri'* di sini adalah "*sangat mutlak*". Penulis tidak perlu menjelaskannya karena sudah jelas.

3) Pertanggungungan jawab *siri'* kepada Ayah kandung

Antara anak kandung dengan ayah klandung juga merupakan turunan langsung. tetapi sekalipun turunan langsung namun sedikit berbeda dengan bentuk pertanggungungan jawab *siri'* dengan ibu kandung. Perbandingan pertanggungungan jawab antara ibu kandung dengan ibu kandung menurut Nabi, adalah 3 berbanding satu. Artinya tiga kali untuk ibu dan satu kali untuk ayah.

Atas dasar seperti itulah, maka bagi masyarakat Bugis-Makassar menganut prinsip netral mengenai pertanggungungan jawab *siri'* kepada ayah

kandung. Prinsip netral artinya, jika seorang ayah meminta kepada anaknya agar dirinya dibela harkat dan martabatnya, maka barulah menjadi kewajiban. Tetapi sepanjang sang ayah melarang anaknya untuk berbuat demikian, maka anak waji untuk mendengarkan larangan itu. Dengan demikian pertanggung jawaban *siri'* terhadap ayah kandung adalah sifatnya relatif.

Perhatikan pula figur 4 pada hal. 209 di muka.

C. DATA DAN ANALISIS STATISTIK

Yang dimaksudkan dengan data di sini adalah sampel penelitian, baik subyek penduduknya maupun daerah-daerah sampel penelitian. Jumlah sampel yang telah ditetapkan adalah kurang lebih 50 ditambah dengan partisipan seminar hasil penelitian data lapangan yaitu 20. Daerah-daerah sampel penelitian meliputi Kotamadya Ujung Pandang, Kabupaten Gowa, Kabupaten Bone, dan Kabupaten Luwu. Jadi terdapt empat daerah lokasi penelitian.

Rincian sampel adalah sebagai berikut:

1. Kotamadya Ujung Padang:

- hakim pengadilan negeri 4 orang,
- aparat polisi 2 orang,
- budayawan 5 orang,
- eksnarapidana 1 orang,
- pengacara 6 orang.

2. Kabupaten Bone:

- hakim pengadilan negeri 2 orang,
- budayawan 1 orang,
- pengacara 4 orang,
- eks narapidana.

2. Kabupaten Gowa:

- hakim pengadilan negeri 2 orang,
- anggota polisi 7 orang,
- budayawan 3 orang,

- pengacara 3 orang,
- eks narapidana 0 orang.

3. Kabupaten Luwu:

- Hakim pengadilan negeri 2 orang,
- anggota polisi 3 orang,
- budayawan, 3 orang,
- pengacara 2 orang,
- eks narapidana.

Jadi jumlah keseluruhan adalah 50 orang.

Adapun yang menjadi ukuran untuk mengetahui ada tidaknya hubungan antara budaya *siri'* dengan tindak pidana pembunuhan, atau perlu tidaknya unsur budaya *siri'* diperhitungkan di dalam setiap pengambilan keputusan pengadilan, merupakan titik berat yang akan diteliti dalam penelitian ini melalui suatu metode yang telah ditetapkan.

Sampel Hakim Pengadilan Negeri dari empat daerah:

Tabel 1:

Kota	Jawaban		
	sangat perlu	netral	tidak perlu
U.P	3	-	1
Gowa	2	-	-
Bone	-	1	1
Luwu	2	-	-
F	7	1	2

Berdasarkan tabel 1 berupa data dari hakim pengadilan negeri empat kabupaten, dapat ditabulasi-

kan dalam persentasi sikap sebagai berikut: Tabel 2:

Sikap	Frekuensi	%
yang menyatakan harus	7 orang	70
yang menyatakan netral	1 orang	10
yang menyatakan tidak perlu	2 orang	20
Jumlah	10 orang	100

Tabel 1 di atas menunjukkan bahwa dari tarap pernyataan hakim-hakim sebagai salah satu subyek sampel peneltian ini, 7 orang di antara 10 menyatakan sikap bahwa *siri'* harus menjadi pertimbangan dalam setiap pengambilan kepiutusan perkara pidana yang berlatar belakang *siri'*. atau 70 persen dari 100 persen. Ini berarti 2/3 suara (pernyataan) yang menghendaki budaya *siri'* harus menjadi bagian sarana pengambilan keputusan pengadilan setiap perkara pidana pembunuhan atau delik pencemaran nama baik orang lain. Sisahnya, yaitu 1 orang atau 10 persen yang bersikap nertal, dan 2 orang atau 20 persen menyatakan tidak perlu.

Alasan yang menarik adalah alasan yang dikemukakan oleh Andi Zainal Abidin, seorang hakim senior di Pengadilan Negeri Sungguminasa, bahwa dijadikannya *siri'* sebagai salah satu aspek yang harus dipertim-

bangkan dalam setiap perkara pidana yang berlatar belakang *siri'* karena pertimbangan alasan yang dapat meringankan si terpidana. Ini adalah sesuatu yang menarik, karena ternyata Pengadilan Negeri Sungguminasa, disamping memberlakukan hukum pidana tertulis di satu sisi, dan pada sisi lain hukum-hukum tidak tertulis tetap dipelihara.

Pertimbangan-pertimbangan yang dilakukan oleh Pengadilan Negeri Sunnguminasa (khusus dalam perkara pidana yang berlatar belakang *siri'*) adalah sangat refresentatif. Penulis berpendapat demikian karena putusan seperti itu mewakili dua aspirasi, yaitu aspirasi hukum pidana tertulis, dan aspirasi hukum pidana tidak tertulis (dalam hal ini budaya *siri'*). Ini berarti tarap pendapat dengan data 70 persen yang menyatakan "harus menjadi pertimbangan" adalah rasional (*reasonable grounds*), menunjukkan alasan-alasan yang masuk akal. Oleh karena persentasi jajak pendapat dari hakim 70 persen cukup beralasan, maka pengadilan negeri lainnya di Sulawesi Selatan patut memperetimbangkan nilai-nilai *budaya siri'* dalam setiap perkara pidana adat.

Kemudian, 1 orang atau 10 persen yang menyatakan sikap netral. alasannya bahwa seringkali nilai-nilai hukum adat tergeser karena alasan unsur-unsur hukum pidana tertulis. Dilihat dari sudut ini, maka ada di

antara hakim yang tidak memperhatikan unsur-unsur hukum tidak tertulis, seperti *siri'*. Padahal setiap daerah mempunyai atau kaya dengan nilai-nilai budaya yang justru merupakan kekayaan hukum nasional yang patut menjadi kebanggaan bangsa Indonesia.

Adapun yang berpendapat tidak perlu, yaitu 2 orang atau 20 persen, alasannya cukup mengagetkan. Salah satu alasannya adalah bahwa "budaya *siri'* tidak perlu dipertimbangkan lagi dalam setiap kasus pidana yang berkaitan dengan *siri'*, karena pada umumnya orang-orang yang terlibat dalam dunia peradilan adalah tidak jujur". Nampaknya alasan ini cukup rasional juga, karena tidak menyalahkan pihak tertentu. Termasuk di sini, tidak mengesampingkan nilai-nilai budaya *siri'*. yang disalahkan adalah para pelaku praktik peradilan itu sendiri yang tidak lagi mengindahkan nilai-nilai budaya *siri'*. Jajak sikap yang satu ini bukan hanya terpenetrasi pada tingkat mikro, tetapi pada tingkat makro sekalipun nampaknya sesuatu yang dapat terbukti secara empirik. Tingkat makro artinya secara menyeluruh.

Sampel dari anggota kepolisian:

Data dari kepolisian dibawah ini yaitu pengetahuan anggota polisi terhadap persepsi pelaku tindak pidana yang berlatar belakang *siri'*. Unsur-unsur

yang diteliti di sini yaitu (dapat dilihat kembali pada halaman 100). Tabel 3:

Kota	Sikap terhadap budaya <i>siri'</i>			%
	sangat perlu	netral	tidak perlu	
U.P.	2 = 100 %	-	-	100
Gowa	6 = 83,4 %	1=16,6%	-	100
Bone	-	-	-	-
Luwu	2 = 66,6 %	-	1 = 33,4 %	100
F	10 = 250,0 %	1=16,6%	1 = 33,4 %	300

Berdasarkan data pada tabel 3 di atas maka sikap anggota polisi terhadap penting tidaknya nilai-nilai budaya *siri'* diperhatikan dalam setiap perkara pidana yang berlatar belakang *siri'*, dapat diidentifikasi menjadi sebagai berikut: Tabel 4:

Sikap anggota polisi terhadap budaya <i>siri'</i>	Frekuensi pendapat dari 4 Kabupaten	%
1. Sangat perlu	10 orang	250,0
2. Nertal	1 orang	16.4
3. tidak perlu	1 orang	33,4

jajak sikap dari anggota kepolisian menunjukkan bahwa 250,0 persen menyatakan budaya *siri'* adalah sesuatu yang sangat penting untuk diperhitungkan dalam setiap perkara pidana yang berlatar belakang *siri'*, hanya 16,6 persen dari 300 persen yang menyatakan netral, dan yang menyatakan tidak perlu,

hanya 1 orang atau 33,4 persen.

Jika data kepolisian digunakan standar 13 = 100 %, maka tabulasi frekuensinya sebagai berikut (tabel 5)

Sikap anggota polisi terhadap budaya <i>siri'</i>	Frekuensi pendapat dari 4 Kabupaten	%
1. Sangat perlu	10 orang	84,64
2. Netral	1 orang	7,69
3. Tidak perlu	1 orang	7,69

Catatan: hasil tabel 5 sama maknanya dengan hasil pada tabel 4.

Peneliti menetapkan beberapa indikator sebagai ukuran mengenai pengetahuan anggota polisi mengenai persepsi para pelaku tindak pidana pembunuhan atau pencemaran nama baik orang lain, yang berlatar belakang *siri'*:

- 1) Apakah budaya *siri'* sangat peka bagi mereka, dan apakah *siri'* terlalu mudah mengundang peristiwa bedarah?
- 2) Adakah tingkat perbedaan pemahaman mereka mengenai *siri'*?
- 3) Apakah budaya *siri'* sudah mengakar sedemikian rupa di kalangan mereka?
- 4) Apakah mereka pada umumnya mereka tidak dapat membedakan antara *siri'* positif dan *siri'* negatif?

Melalui indikator-indikator itulah dapat diketahui tingkat pemahaman individu-individu atau orang

orang yang biasanya melakukan tindak pidana yang berlatar belakang *siri'*. Sehingga diperoleh tabulasi sebagai berikut (Tabel 6):

Tahap Pengetahuan Masyarakat	Frekuensi				%
	a	b	c	d	
1. Tidak tahu	1	0	0	1	16,66
2. Kurang tahu	1	1	2	0	33,33
3. Tahu persis	10	11	10	12	350
Jumlah	12	12	12	12	400

Tabulasi frekuensi di atas menunjukkan bahwa berdasarkan pengalaman anggota polisi dalam menangani perkara-perkara pidana pembunuhan dan pencemaran nama baik orang lain, membuktikan bahwa para pelaku tindak pidana yang dimaksud mengerti tentang *siri'*. Dari 12 orang polisi yang diwawancara langsung peneliti, 10 di antaranya yang menyebutkan bahwa pada pokoknya, pelaku-pelaku kejahatan tersebut peka terhadap *siri'*. Pada item b juga membuktikan bahwa tidak ada yang tidak tahu jikalau *siri'* itu mudah mengundang peristiwa berdarah. Berikutnya, pada item c dan d, menunjukkan 93 persen mengetahui, bahwa di antara mereka (para pelaku delik) tidak dapat membedakan mana *siri' positif* dan mana *siti' yang negatif*.

Sampel Budayawan/Antropolog (Tabel 7):

Kota	Sikap budayawan/antropolog		%
	berhubungan	dapat menjadi pevensi	
U.P.	2 = 33,2 %	5 = 66,8 %	100
Gowa	3 = 50,0 %	3 = 50,0 %	100
Bone	1 = 50,0 %	1 = 50,0 %	100
Luwu	3 = 50,0 %	3 = 50,0 %	100
F	9 = 183,2 %	12 = 216,8 %	

Yang dimaksud sikap budayawan dan antropolog pada tabel 6 adalah sikap budayawan terhadap budaya *siri'* apakah budaya *siri'* di Sulawesi Selatan punya keterkaitan dengan hukum pidana tertulis, dan apakah budaya *siri'* dapat menjadi sarana preventif terhadap delik pembunuhan dan pencemaran nama baik orang lain. Ternyata hasil persentasi menunjukkan bahwa 216,8 persen yang menyatakan budaya *siri'* dapat menjadi sarana preventif tindak pidana. 12 orang yang menyatakan seperti itu. Berarti sangat mutlak sifatnya untuk dijadikan sarana preventif. sementara 183,2 persen yang menyatakan budaya *siri'* berhubungan dengan hukum pidana. Artinya, *siri'* merupakan bagian dari hukum pidana tertulis menurut penilaian masyarakat Bugis-Makassar di Sulawesi Selatan. Dapat dilihat kembali data pada halaman 92 (tabel 2)

Sampel pengacara (Tabel 8):

Kota	Sikap pengacara mengenai siri'			%
	harus	netral	tidak perlu	
U.P.	-	1 = 16,6	5 = 83,4	100
Gowa	-	-	3	100
Bone	-	1 = 25	3 = 75	100
Luwu	1 = 50	1 = 50	-	100
F	1 = 50	3 = 91,6	11 = 258,4	

Jajak sikap dari pengacara sebanyak 15 orang dipastikan berbanding terbalik dengan sikap para hakim pengadilan negeri dan kepolisian.

Dengan demikian,	Jawaban	F
	Harus	39
	Netral	18
	Tidak perlu	14

Pandangan dari 50 orang sampel tentang penting tidaknya, berhubungan atau tidaknya budaya *siri'* dengan masalah tindak pidana. Gambaran ini juga menunjukkan apakah budaya *siri'* dapat menjadi sarana prevensi tindak pidana (delik). Kesemua hal-hal tersebut dapat diidentifikasi pada tabel 9 sebagai berikut:

Sikap	Sanmgat perlu	Netral	Tidak perlu
Hakim	7	1	2
Polisi	10	2	1
Budayawan	10	7	0
Pengacara	1	3	11
Rata-rata	7	3,25	3,5

berdasarkan data pada tabel 9 tersebut, maka, dapat

diperoleh kejelasan, bahwa nilai rata-rata dari empat subyek pendukung responden (hakim, polisi, budayawan dan pengacara), angka tertinggi, yaitu yang menyatakan "sangat perlu" memperoleh nilai rata rata 7 dari 28 orang. Sedangkan yang berpendapat "netral" dan yang menyatakan tidak perlu, masing-masing bernilai rata-rata 3,25 dan 3,5. atau:

$A \geq B + 0,50$, dan $A \geq C$. Atau $A = B + C$.

A = pendapat yang menyatakan sangat perlu,

B = pendapat yang menyatakan netral,

C = pendapat yang menyatakan tidak perlu.

Oleh karena pendapat yang menyatakan budaya siri' sangat perlu menjadi pertimbangan dalam setiap proses perkara pidana yang berlatar belakang siri', yaitu item A dua kali lebih besar daripada item B dan C, maka siri' mutlak harus menjadi pertimbangan.

Berdasarkan data statistik di atas maka langkah langkah selanjutnya, adalah menentukan *array*, *range*, *membuat tabel frekuensi*, *diagram batang*, *menentukan mean*, *menentukan median*, dan terakhir *menentukan modus*

1. Array:

0	1	1	1
2	2	2	7
9	10	11	12

2. Range (kisaran):

$$\frac{12 - 0}{2} = 6$$

3. Standar Deviasi (*Deviation Standart*)

Untuk mengetahui standar deviasi atau nilai simpangan baku dari data penelitian ini, maka terlebih dahulu penulis buat tabel frekuensi:

Kelas	X	F	F.X1	F.kum.	BB
0 - 4	2	7	14	0	-0,5
5 - 9	7	2	14	7	4,5
10-14	12	3	26	9	9,5
	21	12	54	12	

Untuk mengetahui standar deviasi berdasarkan tabel di atas, penulis gunakan rumus sebagai berikut:

$$SD = \sqrt{\frac{\sum (X_i - X)^2}{n - 1}}$$

X_i = nilai ke-i

X = nilai rata-rata

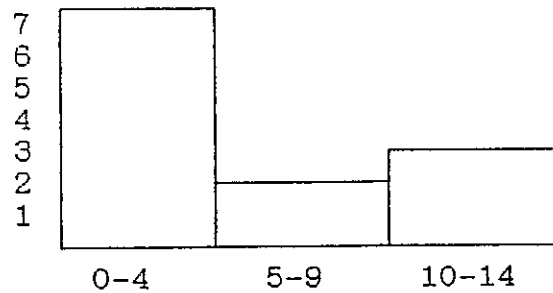
X_i	$(X_i - X)^2$
7	9
2	4
3	1
X = 4	14

$$SD = \sqrt{\frac{14}{3-1}} = \sqrt{7} = 2,16$$

Jadi standar deviasinya adalah 2, 16.

Jadi standar deviasi dalam penelitian ini adalah 2, 16, suatu standar penyimpangan yang masih tergolong batas-batas sangat wajar.

4. Diagram batang:



$$5. a. \text{Mean: } \bar{X} = \frac{\sum f \cdot x}{n} = \frac{54}{12} = 4,5$$

Jadi nilai rata-rata yang merupakan analogi mean dari teori kemungkinan, berkisar pada 5-9, yang berarti pula, tingkat pendapat yang netral tentang *siri'* itu penting tergolong rendah.

$$b. \text{Median: } B + \frac{(n/2) - f}{f_m - f} \cdot i$$

B = batas bawah = 4,5
 f_m = frekuensi setelah kelas median = 9
 f_k = frekuensi kelas median = 7
 $i(c)$ = interval kelas = 5

$$\text{Median} = 4,5 + \frac{12/2 - 7}{9 - 7} \cdot 5$$

$$= 4,5 + \frac{6 - 7}{2} \cdot 5 =$$

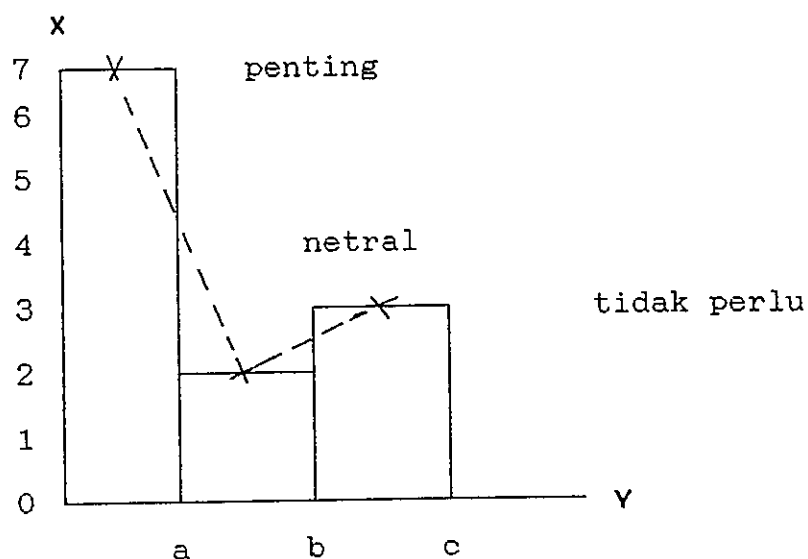
$$= 4,5 + (-2,5) = 2.$$

Jadi, kelas median atau titik tengahnya adalah 2, jadi berada pada kelas interval 0-4. Dengan demikian kecenderungan pendapat yang menyatakan bahwa nilai-nilai budaya *siri'* penting, adalah lebih besar.

c. Modus (nilai atau frekuensi yang sering muncul)

Berdasarkan distribusi tabel di atas, maka diperoleh gambaran bahwa nilai yang sering muncul adalah pada tingkat jakak pendapat 0 - 4, yaitu angka 1 dan 2 sebanyak 7 kali. Dengan demikian terlihat bahwa tendensi sentralnya mengenai *siri'* berkaitan dengan hukum dan sangat penting artinya dalam penetapan putusan sangat tinggi.

Diagram poligon tentang hubungan antara budaya *siri'* dengan hukum pidana (delik pembunuhan dan pencemaran nama baik orang lain) dalam kaitan penting tidaknya dipertimbangkan:



x = frekuensi,
y = tingkat jakak pendapat,
a = batas 0 - 4
b = batas 5 - 9
c = batas 10-14

SIMPULAN SEMENTARA

Setelah mengamati uraian-uraian di muka, maka dapat lah ditarik suatu kesimpulan sebagai berikut:

1. Menyimak pernyataan sikap dari para hakim mengenai penting tidaknya budaya *siri'* menjadi pertimbangan dalam setiap pengambilan keputusan atas perkara pidana yang berlatar belakang *siri'*, yaitu 7 orang di antara 10 orang hakim, atau 70 persen yang menyatakan penting. Berarti budaya hukum *siri'* sangat perlu menjadi pertimbangan dalam setiap putusan pengandilan atas perkara pidana yang berlatar belakang *siri'*.
2. Adapun jajak pendapat dari anggota polisi dengan jumlah responden yaitu 13 orang, 10 orang yang menyatakan budaya *siri'* sangat perlu atau 216,6 persen berbanding 50,6 dan 33,4 persen. Dengan demikian, pendapat anggota polisi pun menghendaki agar budaya *siri'* jangan diabaikan.
3. Budayawan dan antropolog pada umumnya berpendapat, bahwa budaya hukum *siri'* adalah sesuatu yang berhubungan dengan hukum bilamana di Sulawesi Selatan. Dan diyakini pula bahwa budaya *siri'* dapat menjadi langkah prevensi delik. Nilai rata-rata yaitu 100 persen.
4. Sikap antara polisi dan pengacara adalah berbanding terbalik. Polisi menyatakan budaya *siri'* sangat penting dengan frekuensi 78,92 persen atau 10 orang di antara 13 orang. Sedangkan pengacara berpendapat tidak perlu,

yaitu 158,4 persen atau 11 orang diantara 15 orang.

5. Dengan demikian, berdasarkan pada kesimpulan kesimpulan 1, 2, 3 dan 4 maka sebagai kesimpulan umum dapat dipastikan bahwa budaya siri' di Sulawesi Selatan adalah sesuatu yang sangat dibutuhkan dalam pertimbangan hukum dan sebaiknya jangan diabaikan. Dari ketiga kelompok responden tersebut, dapat dinyatakan 3 berbanding satu antara yang menyatakan penting dengan tidak penting. Dan untuk itu tidaklah berlebihan jika kita berpendapat, bahwa budaya siri' dapat menjadi langkah preventif terhadap delik, sesuai dengan apa yang dikemukakan oleh para budayawan.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. KESIMPULAN

Berdasarkan uraian-uraian di muka maka penulis dapat menarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Bahwa setelah menganalisis data-data baik data primer maupun data sekunder yang ada, ternyata sejumlah besar masyarakat Sulawesi Selatan kurang memahami makna *siri'* yang sebenarnya, terkecuali masyarakat-masyarakat tertentu saja.

Dari data Kepolisian yang dihimpun dari empat kabupaten setempat yang menunjukkan, bahwa pada umumnya pelaku-pelaku tindak pidana pembunuhan dan delik pencemaran nama baik orang lain, hanya mengerti *siri'* dari sisi luar saja. Dan tidak mengerti makna *siri'* yang sebenarnya atau hakikat *siri'* yang sebenarnya. Sehingga dengan demikian, mereka melakukan perbuatan berupa tindak pidana, juga atas dasar *siri'*, tetapi *siri'* yang negatif.

Sementara itu, bagi masyarakat yang sekalipun pernah melakukan tindak pidana pembunuhan dan atau pencemaran nama baik orang lain, tetapi setelah diberikan pemahaman tentang bagaimana *siri'* positif itu dapat menjamin kehidupan masa depan yang lebih baik, ternyata masyarakat atau individu tersebut

benar-benar dapat merubah perikelakuannya dari yang negatif menjadi perikelakuan yang positif. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa "Sosialisasi nilai nilai budaya *siri'* dengan baik, bagi masyarakat Bugis-Makassar adalah dapat mencegah terjadinya perbuatan berupa tindak pidana".

2. Bertitik tolak dari data empirik yang ada, langkah prevensi delik dari budaya *siri'* positif merupakan langkah preventif tindak pidana yang baik dan efektif. Cara yang digunakan masyarakat Bugis-Makassar untuk menjadikan *siri'* sebagai instrumen prevensi delik ada dua kemungkinan. Pertama, merubah *siri'* negatif menjadi *siri'* positif. Pola-pola perubahan dari *siri'* negatif menjadi *siri'* positif dapat digunakan metode *resiprokasi* sebagai mana yang dikemukakan oleh *Durkheim*. Kedua, memper- tahankan dan memelihara nilai-nilai budaya *siri'* positif. Perubahan *siri'* negatif menjadi *siri'* positif dan pemeliharaan *siri'* positif terhadap diri pribadi seseorang atau individu tidak terlepas dengan sosialisasi nilai-nilai budaya *siri'* dalam arti yang sebenarnya, sebagaimana pada kesimpulan pertama di atas.

Mensosialisasikan nilai-nilai budaya *siri'* tidaklah cukup hanya dengan menguraikan nilai-nilai *siri'* itu di atas kertas, tetapi perlu pendekatan

secara integral. Pendekatan secara integral (*integrated approach*) merupakan sesuatu yang sangat penting menuju ke arah tercapainya tujuan langkah preventif. Ini berarti semua aspek subyektif seperti tokoh-tokoh masyarakat, dan aspek obyektif seperti pola perilaku kebiasaan-kebiasaan yang sudah mempola dalam kehidupan masyarakat harus turut serta diperhitungkan. Dalam kerangka inilah, maka langkah-langkah prevensi di mana nilai nilai budaya *siri'* sebagai instrumen utama dapat tercapai dengan baik.

3. Perbedaan persepsi di kalangan masyarakat Bugis-Makassar mengenai budaya *siri'* merupakan salah satu pemicu terjadinya tindak pidana pembunuhan dan pencemaran nama baik orang lain.

Menurut masyarakat awam, ia mengartikan *siri'* sebagai sesuatu yang bebas pandang. Bebas pandang artinya, kadang kala masyarakat atau individu itu menempatkan *siri'* pada suatu letak yang tidak proporsional dan destruktif. Padahal *siri'* pada hakekatnya menghendaki sesuatu yang konstruktif. Sebagai misal, seseorang yang disentuh oleh orang lain tanpa sengaja yang kebetulan berpapasan dengan nya. Lalu yang disentuh tanpa sengaja oleh orang lain tadi menganggap diri *ripakasiri* (dipermalukan) Karena ia menganggap dirinya disentuh (disenggol)

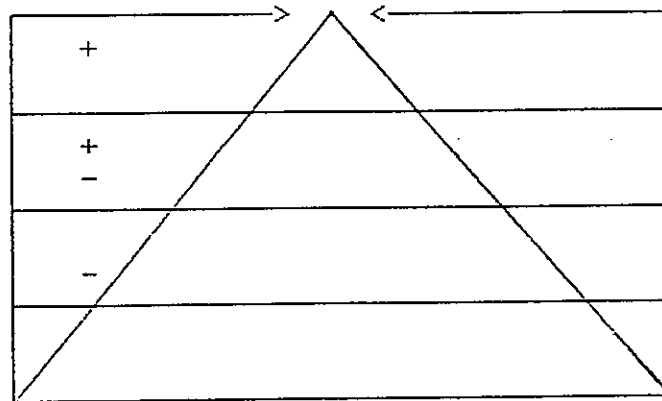
itu dipermalukan, maka terjadilah perkelahian atas dasar *siri'* menurut pemikiran yang disengkol tadi. Persepsi-persepsi semacam inilah masih banyak dijumpai di kalangan masyarakat awam di daerah ini.

Berbeda dengan persepsi masyarakat tertentu seperti, masyarakat budaya, masyarakat ilmiah, dan sebagainya menempatkan *siri'* dengan cara tidak bebas pandang. Mereka menempatkan nilai-nilai budaya *siri'* pada proporsi dan posisi yang konstruktif sesuai dengan makna dan situasinya. Ia tahu benar kapan dan tidaknya *siri'* menjunjung tinggi hak-hak orang lain, dan kapan waktu dan tidaknya nilai-nilai budaya *siri'* harus berkorban demi membela harkat dan martabat diri, keluarga, bangsa dan agama. Dengan demikian, adanya perbedaan persepsi di kalangan masyarakat dan individu Bugis-Makassar terhadap nilai-nilai budaya *siri'*, merupakan salah satu faktor penentu terjadi tidaknya suatu tindak pidana atau delik.

4. Hasil penelitian hukum tentang budaya *siri'* ini dapat menyanggah asumsi opini publik (*asumce public opinion*) yang menyatakan, bahwa *siri'* identik dengan pertumpahan darah. Asumsi ini dapat dibenarkan apabila dirubah anggapannya menjadi "*siri' negatif cenderung menimbulkan peristiwa berdarah*". Karena disamping *siri'* negatif, terdapat juga *siri'*

positif. *Siri'* positif sifatnya konstruktif dan *siri'* negatif sifatnya destruktif.

5. Teori ini penulis sebut *teori perilaku siri'* yang terdiri dari empat karakter atau dapat juga disebut strukrur piramida *siri'* (perhatikan gambar berikut:



Penjelasannya adalah sebagai berikut:

- a. *Siri'* dengan simbol positif, artinya seseorang yang mengetahui hakikat *siri'* positif, dapat dipastikan bahwa ia tidak akan melakukan tindak pidana. Karena ia memahami bahwa *siri'* sebagai harkat dan martabat adalah milik semua orang, baik sebagai individu maupun sebagai masyarakat.
- b. Simbol plus minus, mencerminkan bahwa perilaku seseorang sedang mengalami transisi antara perilaku baik dan buruk selalu dalam pertimbangan seimbang. Oleh karena itu, tindakannya cenderung pada dua kemungkinan, yaitu dapat menjurus ke hal-hal yang positif (*siri'* positif), dan dapat juga menjurus ke tindakan yang negatif

(*siri'* negatif).

- c. Simbol minus artinya *siri'* negatif. Tindak pidana yang dilakukan karena diyakini atas dasar *siri'*, tetapi *siri'* negatif.
- d. Tidak ada simbol sama sekali. Artinya, orang yang tak ada *siri'*nya sama sekali. Kecenderungan orang melakukan tindak pidana di sini tidak ada tendensi lain kecuali kejahatan semata. Jadi perbuatannya tanpa latar belakang *siri'* sebagaimana *siri'* negatif.

Peta perilaku *siri'* seperti di atas, sangat penting. Terutama kepada aparat penegak hukum yang ingin mengetahui karakter *siri'* Bugis-Makassar dalam kaitannya dengan tindak pidana.

Tujuannya adalah dapat memberikan pemahaman kepada bukan hanya aparat penegak hukum, tetapi juga kepada masyarakat luas, bahwa suatu tindak pidana pembunuhan, atau pencemaran nama baik orang lain, murni sebagai kejahatan ataukah tindak pidana itu berlatar belakang *siri'*. Jika delik itu berlatar belakang *siri'*, maka di mana letak batasnya sesuai dengan bentuk piramida *siri'* di atas. Hal ini dimaksudkan agar dalam menjatuhkan putusan, di samping adil menurut hukum, juga adil menurut penerimaan dan pertimbangan masyarakat.

B. S A R A N

Tak dapat disangkal bahwa kondisi sosial dewasa ini berupa dinamika perkembangan hukum, khususnya sistem peradilan pidana, ada kecenderungan "ketidakmampuan hukum" untuk melakukan fungsinya (dapat dibaca: langkah-langkah represif dari hukum pidana), kenyataan-kenyataan mana sering menimbulkan kekhawatiran pada masyarakat pencari keadilan. Dalam kondisi di mana hukum tidak berdaya (upaya represif kurang efektif), maka salah satu alternatif yang terbaik adalah "upaya-upaya preventif". Hemat penulis, sosialisasi nilai-nilai budaya *siri'* yang positif adalah langkah yang paling tepat. Karena *siri'* positif sifatnya sangat konstruktif, sesuatu yang sangat dibutuhkan dalam semua sub-sistem hukum termasuk sistem hukum pidana.

Budaya *siri'* sebagai indikator perkembangan masyarakat Bugis-Makassar, terutama dalam perspektif hukum pidana, Soedarto (1977: 111) menegaskan, bahwa: "Dalam bidang pelaksanaan hukum pidana, faktor perkembangan masyarakat dapat digunakan untuk mendatangkan putusan hakim yang dapat memberikan kepuasan kepada fihak-fihak yang bersangkutan, karena sesuai dengan rasa keadilan.

Jika seandainya *item-item* materi hukum yang ada di dalam perundang-undangan itu adalah kepribadian hukum dari undang-undang itu sendiri, maka penulis

berkeyakinan bahwa nilai-nilai budaya masyarakat di seluruh nusantara yang terpelihara secara ajek dan apik, itu merupakan kepribadian masyarakat dan individu, ruling kelas, termasuk aparat penegak hukum. Satu di antara sekian ribu macam nilai-nilai budaya yang apik adalah *SIRI'*.

Yang berkaitan dengan UU. No. 14 Tahun 1970

Dari visi teoretis, bahwa menggali nilai-nilai budaya daerah sebagai bagian dari budaya nasional, adalah sangat penting. Mengingat, bahwa secara organik telah diamanatkan di dalam suatu undang-undang, yakni Undang-undang No.14 Tahun 1970, utamanya Pasal 27 (1). Dengan indikasi seperti itu maka sangat diharapkan bahwa seorang hakim (misal) dalam memutus suatu perkara, nilai-nilai budaya *siri'* tidak hanya tetuang dalam pertimbangan-pertimbangan secara tertulis, tetapi juga tertuang dalam diri dan kepribadiannya sebagai seorang hakim. Karena bila tidak, maka putusan perkara tersebut boleh jadi hanya merupakan obralan putusan pengadilan.

Yang berkaitan dengan KUHP

Saran penulis yang tak kurang pentingnya adalah, bahwa menjelang disahkannya RUU KUHP Baru sebagai produk nasional bangsa Indonesia sendiri, kiranya Pasal 1, Pasal 2 dan Pasal 33 Konsep jo. Pasal 5 ayat 3b UU Drt. No.1 Tahun 1951, tetap dipertahankan dalam pengesahan.

Karena, hemat penulis, bahwa kandungan pasal-pasal tersebut merupakan ciri khas KUHP nasional yang sangat berbeda dengan KUHP yang bersumber dari negeri Belanda. Dengan demikian, sebaiknya di dalam Pasal 52 Konsep KUHP Baru, tentang Pedoman Pemidanaan (1) ditambahkan satu poin sebagai poin ke-11, yaitu "Apabila tindak pidana yang dilakukan merusak harkat dan martabat orang lain". Hal ini penting karena dalam pedoman pemidanaan tersebut, tidak ada satu poin pun pedoman bagi hakim untuk korban, melainkan hanya kepada pelaku tindak pidana.

Untuk Sistem Peradilan Pidana Indonesia/KUHAP

Selanjutnya, Sistem Peradilan Pidana di Indonesia semestinya jangan memakai sistem tertutup. Karena sistem tertutup sifatnya "kaku". Oleh karena itu Sistem Peradilan Pidana Indonesia harus terbuka. Terbuka dalam arti integral (interaksi, interkoneksi, dan interdependensi) dengan lingkungan. Lingkungan bukan hanya secara mikro tetapi juga dalam arti makro.

Dalam menegakkan kepastian hukum dan keadilan, seorang aparat penegak hukum harus memperhatikan dua hal. Pertama, *intrinsically justice* dan *intrinsically wrong*. *Intrinsically justice*, yakni keadilan yang bersifat intrinsik (keadilan menurut hukum + keadilan menurut masyarakat). Sedangkan *intrinsically wrong*,

yakni kesalahan menurut masyarakat dan kesahahan menurut moral. Dua sisi intrinsik dalam hukum ini adalah sifatnya sangat empirik yang tak dapat diabaikan begitu saja dalam peradilan pidana. Artinya, hakim yang memutuskan perkara, hendaknya jangan melihat suatu permasalahan dalam konteks yang hitam putih. Kedua, *intrinsically legal*. Yang kedua ini tidak terlalu sulit, karena acuannya terdapat di dalam undang-undang. Tetapi harus diingat, bahwa undang-undang hanya merupakan separuh aspek (jika kita enggan gunakan istilah "aspek kecil") dari seluruh aspek-aspek hukum yang ada di luar undang-undang tersebut.

Nilai-nilai budaya *siri'* menurut hemat penulis adalah suatu yang dapat mensebandingkan antara kepastian hukum menurut undang-undang dan keadilan menurut pandangan masyarakat. Oleh sebab itu, nilai-nilai *siri'* sangat baik untuk dijadikan barometer dalam setiap pengambilan keputusan hakim, terutama perkara pidana di setiap pengadilan di Sulawesi Selatan, sebagaimana ide-ide Prof. Soedarto di muka.

Tak pelak, terbuka kemungkinan konsep nilai-nilai budaya *siri'* dapat dijadikan *RUH* dalam setiap produk undang-undang. Dalam kaitan ini, perkenalkan penulis meminjam kembali ucapan Prof. Andi Zainal, yang menyatakan, bahwa "Undang-undang yang jelek, tetapi dijalankan oleh aparat penegak hukum yang bermental

baik, adalah jauh lebih baik daripada undang-undang yang baik tetapi dijalankan oleh aparat penegak hukum yang bermental jelek".

Gunakanlah *siri'* sebagai instrumen untuk merubah orang jahat menjadi orang baik.

Tak mengurangi nilai daripada ungkapan di atas, penulis ingin berkata "Undang-undang yang baik adalah sangat arif bila dijalankan oleh aparat penegak hukum yang bermental baik pula". Amiin !!!

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Quran, Surah Al-Mujaadalah Ayat 11 dan Al Kautsar.....
- Andi Zainal Abidin Farid, 1983, *Bunga Rampai Hukum Pidana*, Pradnya Paramita, Jakarta.
- _____, 1983, *Persepsi Orang Bugis, Makassar Tentang Hukum, Negara, Dan Dunia Luar*, Alumni, Bandung.
- _____, 1987, *Asas-Asas Hukum Pidana Bagian Pertama*, Alumni, Bandung.
- _____, 1995, *Hukum Pidana I*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Arief, Nawawi, Barda, 1994, *Perbandingan Hukum Pidana*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- _____, 1991, *Upaya Non-Penal Dalam Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, Seminar Kriminologi VI, UNDIP, Semarang.
- _____, (tanpa tahun) *Kebijakan Kriminal*, UNDIP, Semarang.
- _____, 1994, *Kebijakan Legislatif Dalam Penanggulangan Kejahatan Dengan Pidana Penjara*, Ananta, Semarang.
- _____, 1994, *Beberapa Aspek Pengembangan Ilmu Hukum Pidana (Menyongsong Generasi Baru Hukum Pidana Indonesia)*, Pidato Pengukuhan Sebagai Guru Besar Dalam Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang.
- _____, 1994, *Perbandingan Hukum Pidana*, Raja Grafindi Persada, Jakarta.
- _____, 1996, *Bungan Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Abdulah, Hamid, 1985, *Manusia Bugis Makassar, Suatu Tinjauan Historis terhadap Pola Tingkah Laku dan Pandangan Hidup Manusia Bugis Makassar*, Inti Idayu Press, Jakarta.
- Ahmad, Qadiry, Abdullah, 1993, *Manusia Dan Kejahatan*, Al-Kaustar, Jakarta.
- Andi Hamzah, 1984, *Pengusutan Perkaran Melalui Sarana Teknik dan Sarana Hukum*, Ghalia Indonesia,

- Jakarta.
- _____, 1992, *Hukum Pidana Politik*, Pradnya Paramita, Jakarta.
- _____, 1991, *Perkembangan Hukum Pidana Khusus*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Auerbach, Jerold, S., 1983, *Justice Without Law*, Oxford University Press, New York.
- Afandi, Wahyu, 1984, *Aneka Putusan Hakim Bismar Siregar*, Alumni, Bandung.
- Ahmad, Kamri, 1996, *Budaya Siri' Di Sulawesi Selatan Sebagai Pola Tatana Hidup* (Laporan Penelitian) tidak dipublikasikan, Bimbingan Prof. Koesnadi Hardjasoemantri, S-2 UNDIP, Semarang.
- Anthon, A., 1997, *Transformasi Nilai Budaya Budaya Tradisional Pada Kesenian Sulawesi Selatan Masa Kini* (makalah disajikan pada Musyker Daerah Tk.I Sul-Sel, yang dilaksanakan di Ujung Pandang, tanggal 20-22 Feb. 1997).
- Bouman, P.J., 1976, *Ilmu Masyarakat Umum*, Pembangunan, Jakarta.
- Ball, John, 1982, *The Legal History of Indonesia*, Ougtershaw Press, Sydney.
- Bo Svenssen, Stalkholm, *Punishment In Moderation*, (artikel dari Roeslan Saleh, 1997, Program S2 Ilmu Hukum UNDIP, Semarang).
- Black, Donald, 1976, *The Behavior of Law*, Academic Press. INC, New York.
- Black, James, A dan
Champion, Dean, J., 1992, *Metode dan Masalah Penelitian Sosial* (diterjemahkan oleh, Koeswara, E. dkk dari judul asli *Methods and Issues In Social Research*), Eresco, Bandung.
- Campbell, Tom, 1994, *Tujuh Teori Sosial*, Kanisius, Jakarta.
- Craib, Ian, 1994, *Teori-Teori Sosial Modern*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Durkheim, Emile, *Reciprocation and Allocation* (artikel dari Roeslan saleh, 1997, Program S2. Ilmu Hukum UNDIP, Semarang).
- Elrick, Machrup (editor), 1995, *Kapita Selekta Hukum: Mengenang Almarhum Prof. H. Oemar Seno Adji*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Exner, Franz, *Punishment* (artikel dari Roeslan Saleh, 1997

- Friedmann, W., 1993, *Teori dan Filsafat Hukum*, Grafindo, Persada, Jakarta.
- Gazalba, Sidi, 1974, *Antropologi Budaya II*, Bulan Bintang, Jakarta.
- Harsono, Hs, C.I., 1995, *Sistem Baru Pembinaan Narapidana*, Djambatan, Jakarta.
- Hardiwinoto, Soekoco, 1995, *Kumpulan Pidato Pengukuhan Guru Besar Fakultas Hukum UNDIP*, Semarang
- Hadikusuma, Hilman, 1984, *Hukum Pidana Adat*, Alumni, Bandung.
- Henri, Harsono, tanpa tahun, *Metode Riset*, LPPI, Jakarta.
- Hadi, Sutrisno, 1986, *Metodologi Research 1*, UGM, Yogyakarta
- , 1990, *Metodologi Research 2*, Andi Offset Yogyakarta.
- Judiantoro dan
Widodo, Hartono, 1983, *Mencari Hukum Suatu Pemikiran*, Alumni, Bandung.
- Johnson, Paul, Doyle, 1986, *Teori Sosiologi Klasik dan Modern*, (di-Indonesia-kan oleh Robert. L) Gramedia, Jakarta.
- Koeswira, S., 1991, *Teori-Teori Keperibadian*, Eresco, Jakarta.
- Kern, R.A., 1993, *I Lagaligo*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta.
- Kusuma, Mulyana, W., 1983, *Kejahatan, Penjahat, dan Reaksi Sosial*, Alumni, Bandung.
- , 1982, *Analisa Kriminologi tentang Kejahatan-Kejahatan Kekerasan*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Koentjaraningrat, 1983, *Manusia dan Kebudayaan di Indonesia*, Djambatan, Jakarta.
- Kramer Sr., A.L.N., 1950, *Kamus Kecil Indonesia-Belanda dan Belanda-Indonesia*, Gravenhage, Jakarta
- Keraf, Gorys, 1989, *Komposisi*, Nusa Indah, Jakarta.
- Krippendorff, Klaus, 1991, *Analisis Isi: Pengantar Metode dan Metodologi*, Rajawali Press, Jakarta.
- Lev, Daniel, S., 1990, *Hukum Dan Politik Di Indonesia*,

Lysen, A., 1981, *Individu. dan Masyarakat*. Sumur, Bandung.

Lamintang, P.A.F., *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Baru, Bandung.

Loqman, Loebby, 1993, *Delik Politik di Indonesia*, IND-HILL-CO, Jakarta.

Muladi, 1992, *Bunga Rampai Hukum Pidana*, Alumni, Bandung.

_____, 1992, *Lembaga Pelepasan Bersyarat*, Alumni, Bandung.

_____, 1990, *Proyeksi Hukum Pidana Materiel di Masa Datang*, (Pidato Pengukuhan Sebagai Guru Besar Fakultas Hukum UNDIP, Semarang.

_____, 1995, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, UNDIP, Semarang.

Muladi dan Arief, Nawawi, Barda, 1992, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, lumni, Bandung.

Mansuri, Suparman dkk, 1995, *Pelecehan Seksual: Pergumulan Antara Tradisi Hukum dan Kekuasaan*, UII, Yogyakarta.

Moeljatno, 1985, *Fungsi dan Tujuan Hukum Pidana Indonesia*, Bina Aksara, Yogyakarta.

_____, 1994, *KUHP*, Bumi Aksara, Jakarta.

Mertokusumo, Sidigno, 1985, *Mengenal Hukum*, Liberty, Yogyakarta.

Machmud, Hasan, A., 1976, *Silasa (Setetes Embun di Tanah Gersang)*, Yayasan Kebudayaan Sulawesi Selatan Tenggara, Ujung Pandang.

Marsuki, Laica, 1995, *SIRI' Bagian Kesadaran Hukum Rakyat Bugis-Maakassar, (Sebuah Telaah Filsafat Hukum)*, Hasanuddin University Press, Ujung Padang.

Muhadjir, Noeng, H., 1996, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Rake Sarasin, Yogyakarta.

Marmosudjono, Sukarton, 1989, *Penegakan Hukum di Negara Pancasila*, Garuda Metropolitan Press, Jakarta.

Mahadi, 1991, *Uraian Singkat Tentang Hukum Adat Sejak PR Tahun 1854*, Alumni Bandung.

- Moein, M.G., A., 1977, *Menggali Nilai Sejarah Kebudayaan Sulselra*, SKU Makassar Press, U. Pandang.
- Nenot, Philippe and Selznick Phillip, (tanpa tahun), *Law and Society In Transition: Toward Responsive Law*, Harper and Row, New York.
- Neter, Aryeh, 1978, *Crime and Punishment: A Radical Solution*, Scarborough Book, New York.
- Pauls, Baut, & Herman Beny, K., 1988, *Kompilasi Deklarasi Hak Asasi Manusia*, YLBH, Jakarta.
- Peters, A.A.G., 1990, *Hukum dan Perkembangan Sosiologi Hukum*, Sinar Harapan, Jakarta.
- Pecker, Herbert, L., 1958, *The Limite of The Criminal Sanction*, Stanford University Press, California.
- Prakosos, Djoko, 1988, *Pemecahan Perkara Pidana (Splitsing)*, Liberty, Yogyakarta.
- Rahardjo, Satjipto, 1977, *Pemanfataan Ilmu-Ilmu Sosial Bagi Pengembangan Ilmu Hukum*, Alumni, Bandung.
- _____, 1988, *Sosiologi Hukum Dalam Pembangunan Hukum Nasional*, Persahi, Jakarta.
- _____, 1991, *Ilmu Hukum*, Citra Adya Sakti, Bandung.
- Rahardjo, Satjipto, dan Tabah, Anton, 1993, *Polisi Pelaku dan Pemikir*, Gramedia, Jakarta.
- Rahman Rahim, H.A., 1992, *Nilai-Nilai Utama Kebudayaan Bugis*, Hasanuddi University Press, Ujung Pandang.
- Soehardjo Ss., 1994, *Filsafat hukum*, UNDIP, Semarang.
- Saleh, Ruslan, 1984, *Segi Lain Hukum Pidana*, Ghalia, Jakarta.
- _____, 1995, *Masih Saja Tentang Kesalahan*, Karya Dunia Fikir, Jakarta.
- _____, 1995, *Menahan Diri Disamping Teliti Dalam Menggunakan Hukum Pidana*, Program S2 Ilmu Hukum UNDIP, Semarang.
- Sudarto, 1977, *Hukum dan Hukum Pidana*, Alumni, Bandung.
- _____, 1983, *Hukum dan Perkembangan Masyara-*

kat, Sinar Baru, Bandung.

- _____, 1986, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Alumni, Bandung.
- Soekanto, Soerjono, 1982, *Teori Sosiologi Tentang Pribadi Dalam Masyarakat*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- _____, 1983, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Rajawali, Jakarta.
- _____, 1984, *Perspektif Teoritis Studi Hukum Dalam Masyarakat*, Rajawali, Jakarta.
- Soekanto, Soerjono, 1988, *Identifikasi Hukum Positif Tidak Tertulis Melalui Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Ind.Hill-Co, Jakarta
- _____ dan
Mamudji, Sri, 1986, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, Rajawali, Jakarta.
- Soesanto, I.S., 1995, *Kriminologi*, UNDIP, Semarang.
- Soesilo, 1984, *Pokok-Pokok Hukum Pidana Peraturan Umum dan Delik-Delik Khusus*, Politesia, Bogor.
- Sutherlen dan Cressey, 1974, *Control of Crime* (disadur oleh Sudjono,) Tarsita, Bandung.
- Sangaribuan, Masri, dan
Effendi, 1982, *Metode Penelitian Survei*, Matahari Terbit, Jakarta.
- Soemitro, Hanitidjo, Ronny, 1983, *Masalah-Masalah Sosiologi Hukum*, Sinar Baru, Bandung.
- _____, 1988, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- _____, 1990, *Hukum dan Masalah Penyelesaian Konflik*, Agung, Semarang.
- _____, 1985, *Studi Hukum dan Masyarakat*, Alumni, Bandung.
- _____, 1984, *Permasalahan Hukum Di Dalam Masyarakat*, Alumni, Bandung.
- Sadly, Hasan, 1961, *Sosiologi Untuk Masyarakat Indonesia*, Pembangunan, Jakarta.
- Smith, J.C., dan
Hogen, Brian, (Edisi VI), *Criminal Law*, ELBS, Betterworth, London.

- Schafer, Stephen, 1973, *The Political Criminal: The Problem of Morality of Crime*, Free Press, New York.
- Skolnick, Jeromi, H., 1966, *Justice Without Trial: Law Enforcement in Demokratio Society*, John Wiley & Son, USA.
- Sugangga, IGN, 1995, *Implementasi Hukum Adat Dlam Pembangunan Hukum Nasional dan pada Pembangunan Jangka Panjang Kedua*, Orasi Ilmiah Dalam Rangka Dies Natalis Fakultas Hukum UNDIP, Semarang.
- Siregar, Bismar, 1983, *Berbagai Segi Hukum dan Perkembangan Dalam Masyarakat*, Alumni, Bandung.
- Slamet, Y., 1993, *Analisis Kuantitatif untuk Data Sosial*, Dabara Publisher, Surakarta.
- Soerjadi, P.A., 1980, *Pendahuluan Teori Kemungkinan dan Statistik*, ITB. Bandung.
- Trisna, R., Mr., 1959, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Tiara, Jakarta.
- Tedjosaputro, Liliana, 1995, *Etika Profesi Notaris Dalam Penegakan Hukum Pidana*, Bayu Indra Grafika, Yogyakarta.
- van Vollenhoven, C., 1981, *Orientasi Dalam Hukum Adat Indonesia*, Jambatan, Jakarta.
- Rancangan Undang-Undang KUHP Baru, 1993, Dep. Kehakiman, Jaakarta.
- GBHN (Bahan Referensi Pentaran), 1993, Jakarta.

Surat Kabar Harian:

- *Harian Kompas*,
 - *Harian Suara Merdeka*,
 - *Harian Jawa Pos*,
 - *Harian Pajar*,
 - *Harian Republika*,
 - *Harian Surya*,
 - *Harian Pedoman Rakyat*.
- Maajalah-Majalah.